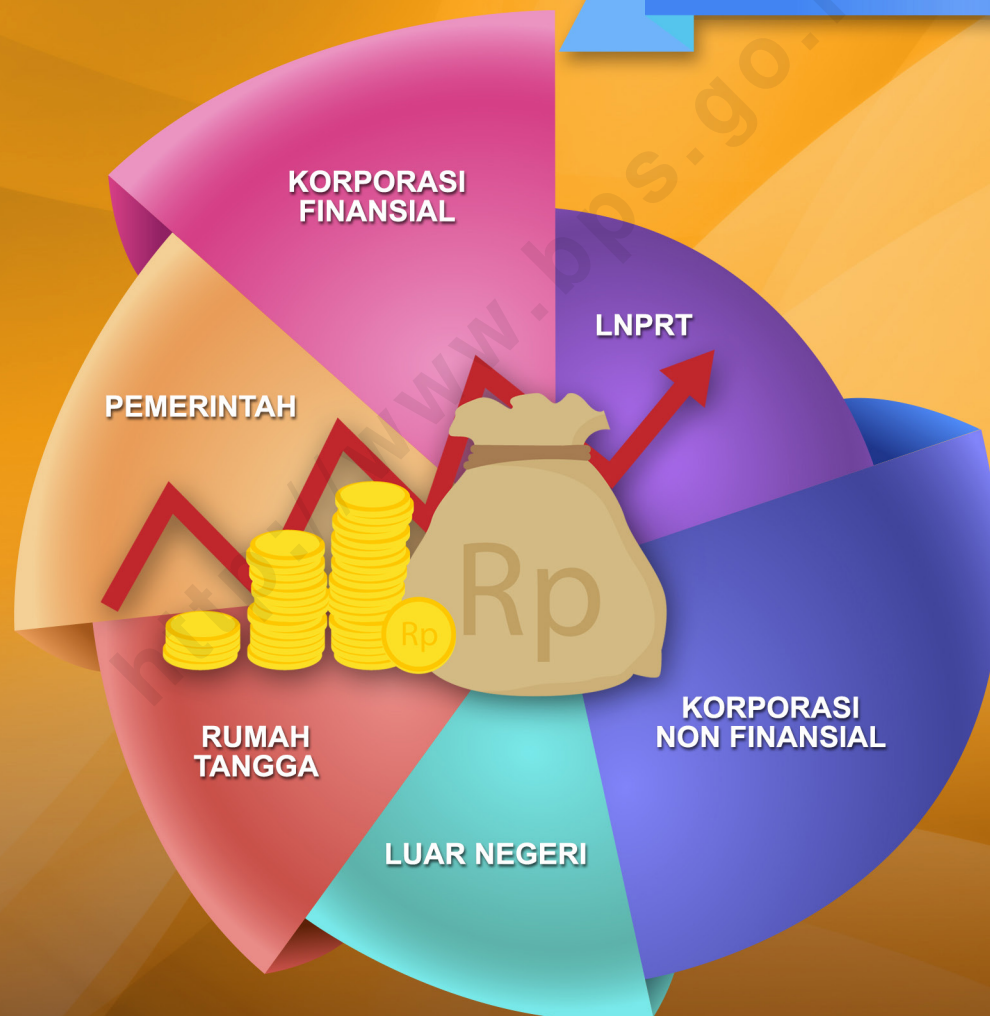




Katalog: 9502002

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

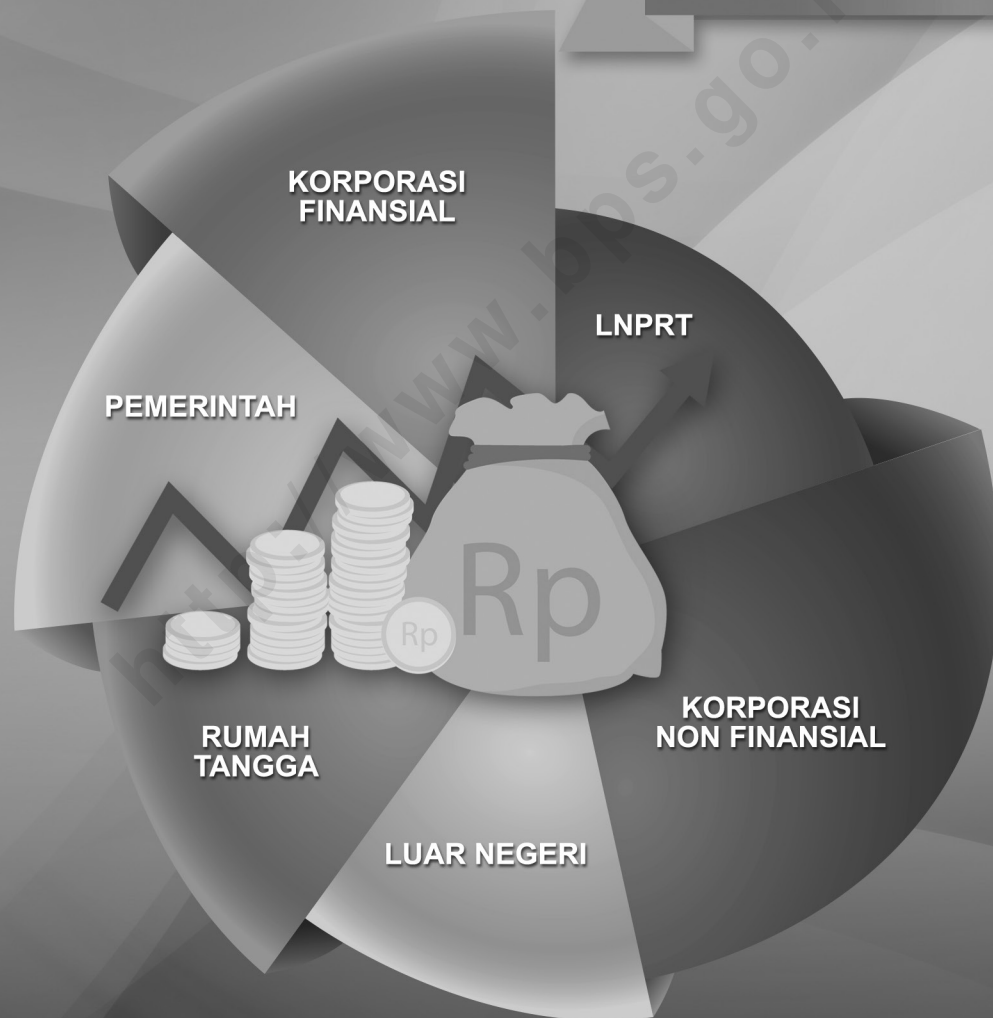
2011-2015



BADAN PUSAT STATISTIK

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

2011-2015



NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN 2011-2015

ISSN: 0854-6967

Nomor Publikasi: 07230.1602

Katalog BPS: 9502002

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv+103 Halaman/ *Pages*

Naskah:

Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Bagian Penggandaan Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia Tahunan 2011-2015 adalah publikasi yang menyajikan gambaran serta informasi mengenai data investasi di Indonesia selama periode-periode tersebut. Data yang disajikan mencakup informasi mengenai perkembangan investasi nonfinansial dan investasi finansial tahunan dalam berbagai kategori transaksi finansial yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (sektor institusi). Sektor institusi dalam publikasi ini terdiri dari: Korporasi NonFinansial, Korporasi Finansial, Pemerintahan Umum, Rumah Tangga, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), dan Luar Negeri.

Publikasi Neraca Arus Dana Tahunan ini merupakan seri pertama yang penyusunan datanya mengacu pada *System of National Accounts* (SNA) 2008. Untuk meningkatkan kualitas data yang disajikan, beberapa data dalam publikasi ini akan direvisi pada penerbitan berikutnya apabila ada perbaikan data dan/atau penyempurnaan metodologi.

Kami menyadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca dan pengguna data sangat diharapkan demi perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, November 2016

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK



Dr. SUHARIYANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
Ringkasan Eksekutif.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
BAB II. KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA	5
2.1 Penjelasan Umum.....	5
2.2 Kerangka Teori NAD.....	6
2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional.....	6
2.4 Kegunaan Neraca Arus Dana	8
BAB III. KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA	11
3.1 Kerangka NAD Indonesia	11
3.2 Sumber Data dan Metode Penyusunan	24
BAB IV. KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA.....	33
4.1 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia tahun 2015	33
4.2 Perkembangan Tabungan Bruto.....	37
4.3 Perkembangan Investasi.....	39
4.4 Perkembangan Celah Tabungan dan Investasi (<i>S-I Gap</i>) Tahun 2011-2015	46
4.5 Percepatan Uang Beredar (<i>Velocity of Money</i>) dan Pendalaman Sektor Keuangan (<i>Financial Deepening</i>)	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2011-2015 (Triliun Rupiah)	37
Tabel 4.2	Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2011-2015 (Persen)	37
Tabel 4.3	Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB tahun 2011-2015 (Persen)	38
Tabel 4.4	Investasi Non-Finansial Menurut Sektor Tahun 2011-2015 (Triliun Rupiah) ...	41
Tabel 4.5	Struktur Investasi Non-Finansial Menurut Sektor Tahun 2011-2015 (Persen).	42
Tabel 4.6	Struktur Investasi Non-Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2011-2015 (Persen)	43
Tabel 4.7	Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial Tahun 2015 (Triliun rupiah)	44
Tabel 4.8	Komposisi Perubahan Kepemilikan Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif Menurut Sektor tahun 2015 (Triliun Rupiah)	44
Tabel 4.9	Investasi Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik Menurut Jenis Investasi Tahun 2015 (Triliun Rupiah)	45
Tabel 4.10	<i>S-I Gap</i> Menurut Sektor Tahun 2011-2015 (Triliun Rupiah)	46
Tabel 4.11	Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto Tahun 2011-2015	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Proporsi Investasi Indonesia Tahun 2014 dan 2015 (Persen).	39
Grafik 4.2	Perkembangan Investasi Indonesia Tahun 2011-2015 (Triliun Rupiah)	40
Grafik 4.3	Perkembangan Pertumbuhan Investasi Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015 (Persen)	41
Grafik 4.4	Rasio M1 dan M2 Terhadap PDB Tahun 2011-2015 (Persen)	49
Grafik 4.5	<i>Velocity of Money</i> Tahun 2011-2015	50

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	L1-1 - L1-12
Lampiran 2. Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	L2-1 - L2-8
Lampiran 3. Matrik NAD Menurut Kategori Transaksi dan Sektor	L3-1 - L3-10
Lampiran 4. Matrik NAD Indonesia Menurut Sektor	L4-1 - L4-12

<http://www.bps.go.id>

Ringkasan Eksekutif

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data finansial yang lengkap menggambarkan penggunaan tabungan dan sumber dana lainnya untuk membiayai investasi yang dilakukan oleh sektor-sektor institusi pada periode waktu tertentu. Neraca Arus Dana (NAD) juga menampilkan kegiatan transaksi finansial antar berbagai sektor menggunakan berbagai jenis surat hutang (instrumen finansial) pada periode waktu tertentu.

Tabungan dalam istilah NAD merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran dari kegiatan ekonomi. Penerimaan meliputi, surplus usaha dari kegiatan memproduksi barang dan jasa, penerimaan dari balas jasa faktor produksi yang dimiliki (upah/gaji, deviden, bunga, sewa, dsb), dan *current transfer* (subsidi, pajak, bantuan luar negeri, dan pensiun). Pengeluaran mencakup pengeluaran untuk konsumsi, *current transfer* (seperti pajak, dll), dan pengeluaran lainnya (selain pengeluaran untuk kegiatan produksi) seperti pembayaran deviden dan bunga. Tabungan dalam konteks ini adalah tabungan bruto, yaitu tabungan (sesuai penjelasan diatas) ditambah dengan penyusutan barang modal.

Tabungan merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk investasi. Sumber lainnya untuk berinvestasi adalah penerimaan yang berasal dari transaksi keuangan seperti, penerimaan dari hasil penerbitan saham/obligasi, penerimaan pinjaman, dan sebagainya. Sedangkan investasi yang dilakukan oleh berbagai sektor institusi mencakup investasi finansial dan investasi nonfinansial (investasi riil). Investasi finansial adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu sektor institusi dengan menggunakan berbagai instrumen finansial seperti saham, Surat Utang Negara (SUN), pinjaman, Surat Berharga Bank Indonesia (SBI), surat berharga jangka pendek, dan sebagainya. Investasi nonfinansial (investasi riil) mencakup penambahan serta pengurangan barang-barang modal dan inventori (stok) yang dilakukan oleh suatu sektor institusi. Sektor-sektor institusi dalam Neraca Arus Dana tahunan dibagi menjadi Korporasi Non Finansial, Korporasi Finansial, Pemerintah, Rumah Tangga, Lembaga Non Profit (LNPR), dan Luar Negeri.

NAD disajikan dalam bentuk matrik, yaitu suatu sajian dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Baris pada matrik NAD menunjukkan kategori transaksi, yaitu jenis-jenis transaksi baik transaksi finansial maupun nonfinansial, seperti pembentukan modal tetap bruto, pinjaman, saham, surat berharga jangka panjang, dan sebagainya. Sedangkan kolom pada matriks NAD menunjukkan pembagian sektor-

sektor institusi. Setiap sektor institusi mempunyai dua kolom yaitu kolom perubahan aset dan kolom perubahan kewajiban. Kolom perubahan aset digunakan untuk mencatat semua perubahan (arus) aset (harta) baik aset finansial maupun aset nonfinansial, sedangkan kolom perubahan kewajiban digunakan untuk mencatat perubahan (arus) kewajiban finansial dan ekuitas.

NAD dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan perumusan kebijakan khususnya di bidang ekonomi dan moneter. NAD juga dapat dipakai untuk melengkapi penyusunan Sistem Neraca Nasional serta Sistem Neraca Sosial Ekonomi Finansial (SNSEF). NAD merupakan sistem data tertutup yang di dalamnya melibatkan sektor Luar Negeri. Sebagai suatu sistem data tertutup berlaku bahwa setiap perubahan aset di suatu sektor akan diikuti perubahan kewajiban dalam jumlah yang sama di sektor yang lain. Dengan demikian, untuk masing-masing kategori transaksi berlaku identitas baris yang menunjukkan bahwa jumlah arus penggunaan dana (kenaikan harta) sama besarnya dengan jumlah arus sumber dana (kenaikan kewajiban finansial) untuk ekonomi secara keseluruhan. Pada masing-masing sektor berlaku identitas kolom yang menunjukkan bahwa jumlah perubahan aset akan sama dengan perubahan kewajiban ditambah perubahan ekuitas.

Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2015

Kondisi perekonomian makro Indonesia, khususnya ekonomi finansial selama tahun 2011 hingga 2015 dapat dideteksi melalui matrik NAD 2011-2015. Beberapa indikator utama yang dapat diketahui dari matrik NAD dalam hubungannya dengan gambaran perekonomian makro Indonesia adalah tabungan bruto, investasi nonfinansial, Saving Investment Gap (S-I gap), dan investasi finansial.

Memasuki tahun 2015 perkembangan perekonomian global mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan 2014 dengan nilai pertumbuhan sebesar 3,1 persen (y-on-y) sedangkan tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 persen (y-on-y). Sementara itu, ekonomi Indonesia melambat dengan pertumbuhan 4,79 persen (c-to-c). Padahal pada tahun 2014 Indonesia mampu mencapai angka 5,02 persen (c-to-c). Perlambatan tersebut dipicu oleh melambatnya laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR dan ekspor barang. Meskipun demikian, selama tahun 2015 terjadi percepatan pertumbuhan pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja barang. Dari sisi produksi, pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen akibat pertumbuhan industri komunikasi yang

diselenggarakan oleh swasta yang didukung oleh peningkatan inovasi dalam bidang telekomunikasi, seperti teknologi jaringan 4G LTE. Secara rata-rata rupiah terdepresiasi sebesar 13,2 persen dari Rp 11.885 per dolar AS pada tahun 2014 menjadi Rp 13.458 per dolar AS pada tahun 2015.

Perkembangan suku bunga (sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi pasar uang) selama tahun 2015 menunjukkan kondisi yang menurun dibanding tahun 2014. Suku bunga deposito pada tahun 2015 (7,94 persen) lebih rendah dibandingkan tahun 2014 (8,78 persen). Penurunan suku bunga kredit dipengaruhi oleh meningkatnya resiko kredit yang diindikasikan melalui tren peningkatan rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) pada tahun 2015. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada akhir tahun 2015 sebesar 12,8 persen sedangkan akhir tahun 2014 sebesar 12,9 persen.

Kinerja industri perbankan mengalami sedikit perlambatan selama tahun 2015. Pertumbuhan kredit perbankan tahun 2015 sebesar 10,4 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 11,6 persen. Selain itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami perlambatan menjadi 7,3 persen pada akhir tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 12,3 persen. Sementara itu, kinerja Bank Umum berdasarkan rasio keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) terjaga baik. Kinerja Bank Umum yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR) pada tahun 2015 yang berada jauh di atas cadangan minimum 8 persen dan rendahnya rasio kredit bermasalah (NPL) gross yang di bawah 5 persen.

Kondisi pasar saham domestik menunjukkan penurunan kinerja selama tahun 2015. Pada akhir tahun 2015 IHSG tercatat pada level 4.593,01 turun 12,13 persen dari IHSG pada akhir tahun 2014 yang tercatat pada level 5.226,95. Sejalan dengan pasar saham, kinerja pasar obligasi selama tahun 2015 tercatat juga mengalami penurunan. Hal tersebut ditunjukkan melalui peningkatan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun yang tercatat pada akhir tahun 2015 sebesar 8,8 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 7,8 persen.

Perkembangan Tabungan Bruto

Selama kurun waktu 2011-2015, tabungan bruto menurut sektor memperlihatkan kecenderungan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 12,12 persen. Pada tahun 2015 secara sektoral, sektor Korporasi Non Finansial mengalami peningkatan tabungan bruto tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sebaliknya sektor Korporasi Finansial, Luar Negeri, dan Pemerintah mengalami penurunan

tabungan bruto pada tahun 2015. Secara keseluruhan, sektor yang memiliki peranan yang paling dominan pada pembentukan tabungan bruto adalah sektor Korporasi Non Finansial. Dalam pembentukan tabungan bruto, rata-rata kontribusi sektor ini mencapai 68,69 persen selama periode 2011-2015.

Selama periode 2011-2015, struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masing-masing sektor cenderung bervariasi. Total tabungan bruto seluruh sektor terhadap PDB berkisar 32 hingga 35 persen. Jika dilihat menurut sektor, struktur tabungan bruto terhadap PDB sektor Korporasi Non Finansial paling dominan dibandingkan sektor lainnya. Selama periode tersebut, persentase pada sektor Korporasi Non Finansial berkisar antara 21,58 persen (tahun 2014) hingga 25,53 persen (tahun 2011).

Perkembangan Investasi

Pada umumnya peran investasi non finansial lebih dominan dibandingkan dengan investasi finansial. Pada tahun 2014 kontribusi yang diberikan investasi non finansial terhadap total investasi mencapai 50,01 persen. Tahun 2015 kontribusinya naik menjadi 81,86 persen. Kenaikan kontribusi investasi non finansial pada tahun 2015 disebabkan terjadi penurunan pada kontribusi investasi finansial yaitu dari 49,99 persen di tahun 2014 menjadi 18,14 persen di tahun 2015.

Selama periode 2011-2015 nilai total investasi Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif. Pertumbuhan total investasi mengalami kontraksi pada tahun 2013 dan 2015 dengan kontraksi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 33,29 persen. Sedangkan nilai investasi non finansial dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan investasi non finansial tertinggi pada tahun 2012 yang mencapai 16,97 persen sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2013 sebesar 6,88 persen.

Tren yang berfluktuatif juga ditunjukkan oleh nilai investasi finansial selama periode 2011-2015. Nilai investasi finansial terendah terjadi pada tahun 2015. Investasi finansial juga mengalami beberapa kali kontraksi pertumbuhan pada tahun 2011, 2013, dan 2015. Kontraksi terdalam terjadi pada tahun 2015 sebesar 75,8 persen.

Perkembangan Celah Tabungan dan Investasi (*S-I Gap*)

S-I Gap (Saving Investment Gap) dapat menggambarkan kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (*net lending*) atau memperoleh hutang dari sektor lain (*net borrowing*) dalam membiayai investasi non finansialnya. Dalam kaitan dengan sektor Luar Negeri (LN), jika *S-I Gap* sektor ini negatif berarti sektor LN memperoleh pinjaman dari sektor lainnya. Dalam hal ini, sektor lainnya

mengalami *net lending*, begitu pula sebaliknya. Selama tahun 2011-2015, sektor Korporasi Non Finansial dan Pemerintah senantiasa mengalami *net borrowing*. Kekurangan dana tersebut dapat disediakan terutama oleh sektor Rumah Tangga. Secara umum, selama tahun 2011-2015 sektor Rumah Tangga, Korporasi Finansial, dan LNPRT merupakan sektor surplus.

Perkembangan Uang Beredar

Pada tahun 2011-2015, posisi M2 pada suatu periode sangat dipengaruhi oleh posisi uang kuasi. Selama periode 2011-2015 kontribusi uang kuasi terhadap pembentukan M2 rata-rata sebesar 75,53 persen. Kontribusi lainnya ditentukan oleh M1 yang rata-rata kontribusinya terhadap M2 sebesar 24,03 persen, dan sisanya sebesar 0,45 persen berasal dari surat berharga selain saham. Pertumbuhan uang kuasi meningkat lebih pesat dibandingkan pertumbuhan M1. Selama periode 2011-2015, uang kuasi tumbuh rata-rata sebesar 13,42 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan M1 yang rata-rata tumbuh sebesar 11,89 persen. Hal ini mencerminkan bahwa uang kuasi lebih diminati untuk dimiliki oleh masyarakat dibandingkan uang kuasi.

***Velocity of Money* dan *Financial Deepening* Indonesia**

Gambaran lain yang menunjukkan keadaan perekonomian nasional dalam kaitannya dengan uang beredar adalah pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*) dan percepatan perputaran uang beredar (*velocity of money*). Sektor Keuangan Indonesia masih dianggap dangkal (*shallow*) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia. Masih dangkalnya sektor Keuangan Indonesia tercermin dari perkembangan rasio M2/PDB. Pada akhir tahun 2011 rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah selama periode 2011–2015 yaitu sebesar 36,74 persen. Namun, seiring dengan berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah, rasio tersebut sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan dangkalnya sektor Keuangan Indonesia, yakni (i) rendahnya intermediasi yang dilakukan oleh institusi-institusi di sektor Keuangan, (ii) rendahnya pemanfaatan pasar modal dalam pembiayaan investasi, dan (iii) terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan Indonesia.

Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2011-2015 menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya rasio antara PDB dengan M1 selama periode tersebut yang hanya berada di kisaran angka 10 sampai 11 persen. Perlambatan perputaran uang beredar yang terjadi selama tahun 2011-2015 disebabkan pertumbuhan yang terjadi pada kedua variabel tersebut sangat berfluktuasi serta tidak sejalan antara satu dengan lainnya.

<http://www.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan investasi sangat dirasakan oleh semua sektor produksi guna memperbesar penciptaan nilai tambah dan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan investasi tersebut, berbagai dana diperlukan guna membiayainya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti pinjaman dan hibah. Proses pembiayaan investasi dalam pelaksanaannya memerlukan peran lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya sebagai perantara yang menghubungkan penyedia dana (selanjutnya disebut sebagai sektor surplus) dengan sektor yang membutuhkan dana (sektor defisit)¹. Pada masa lalu, peranan lembaga keuangan ini kurang begitu menonjol. Sedangkan di lain pihak, penyedia dana hanya melakukan investasi finansialnya pada instrumen-instrumen yang masih terbatas seperti tabungan dan deposito. Akibatnya, belum semua dana digunakan secara optimal untuk pembiayaan investasi. Sementara itu, sektor produksi (investor) masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dananya.

Melihat kenyataan tersebut, sejak permulaan dasawarsa 1980, pemerintah mulai melakukan reformasi ekonomi khususnya di bidang perbankan, misalnya penentuan tingkat suku bunga. Dengan demikian, pemilik dana dapat melakukan investasi finansial dengan pilihan yang lebih luas dan menarik. Di samping itu, dengan meningkatnya kegiatan pasar modal yang ditunjukkan oleh makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang "*go-public*", menyebabkan para pemilik dana mempunyai alternatif tambahan dalam berinvestasi finansial yang bersifat langsung yaitu dengan cara membeli saham dan sertifikat di pasar modal. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, arus finansial dari sektor surplus ke sektor defisit melalui instrumen-instrumen yang ada menjadi tidak sederhana lagi. Perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam sektor finansial ini perlu dicatat dan dipantau secara berkala dalam satu sistem data yang lengkap, komprehensif, dan konsisten, sehingga berguna sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan moneter secara lebih tepat. Sistem data tersebut selanjutnya disebut Neraca Arus Dana (NAD).

¹ Dalam kaitan neraca arus dana, sektor surplus merupakan sektor yang memiliki tabungan lebih besar dari kebutuhan investasi realnya, sebaliknya disebut sektor defisit. Selanjutnya investasi riil merupakan besarnya pembentukan modal yang dilakukan oleh masing-masing sektor.

Selama ini, sistem data mengenai statistik produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian nasional (sektor riil) telah disajikan secara berkala baik dalam Produk Domestik Bruto (PDB), Tabel Input-Output Indonesia, maupun dalam bentuk neraca-neraca lainnya². Sebagian besar neraca-neraca ini hanya menggambarkan besarnya produksi, nilai tambah, pengeluaran konsumsi, dan pembentukan modal yang terjadi di masing-masing sektor. Gambaran mengenai bagaimana sektor-sektor ini memperoleh dan memanfaatkan tabungannya, baik untuk membiayai investasi riil maupun untuk investasi finansial belum tercakup di dalam sistem tersebut. Demikian pula sektor-sektor yang terpaksa melakukan pinjaman untuk membiayai investasi riil karena tabungannya tidak memadai, serta jenis-jenis instrumen finansial apa yang digunakan untuk melakukan pinjaman tersebut belum tergambar dalam neraca-neraca di atas. Neraca Arus Dana mencoba mencatat seluruh transaksi ini dari sisi finansialnya, sehingga arus finansial yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit dapat tergambar. Arus finansial tersebut akan merefleksikan perubahan harta dan kewajiban finansial melalui perubahan instrumen-instrumen seperti tabungan, pembelian saham, penambahan surat hutang, penambahan pinjaman dan sebagainya.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan di atas, pada tahun 1987, Badan Pusat Statistik telah membuat suatu studi mengenai *Neraca Arus Dana Indonesia* untuk tahun 1980. Usaha ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan NAD yang sebenarnya walaupun data yang digunakan masih sangat terbatas. Pada tahun 1991, NAD Indonesia 1984-1988 telah berhasil disusun untuk pertama kalinya yang merupakan hasil kerja Tim Teknis yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Untuk menghasilkan publikasi tersebut, Tim Teknis telah bekerja selama lebih kurang dua tahun dengan dukungan biaya dan konsultan dari Bank Dunia/IBRD.

Berdasarkan pengalaman penyusunan tersebut, kini Tim Teknis telah dapat menyusun NAD Indonesia secara berkala. Sejak tahun 2016 ini Publikasi NAD telah mengalami perubahan bentuk format dan jenis instrumen keuangan yang disajikannya. Perubahan ini mengacu pada sistem neraca nasional terbaru yang dikenal sebagai SNA 2008. Pada masa mendatang, usaha untuk memperbaiki sistem NAD baik dari segi mutu maupun analisisnya terus dikembangkan.

² Keseluruhan neraca tersebut dibuat berdasarkan Sistem Neraca Nasional (SNA), yang disarankan oleh PBB, System of National Accounts 2008

1.2 Maksud dan Tujuan

Publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2011-2015 merupakan realisasi dari hasil kerja Tim Penyusun NAD Badan Pusat Statistik. Penerbitan publikasi ini mempunyai tujuan antara lain:

- a. Memperkenalkan wawasan penggunaan sistem data makro yang berkaitan dengan arus penyediaan dan penggunaan dana antar sektor.
- b. Melengkapi sistem data neraca nasional yang selama ini terus dikembangkan dan disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik.
- c. Menyebarkannya data dan informasi yang terdapat di dalam neraca arus dana sebagai bahan referensi bagi para pengguna data khususnya di bidang ekonomi moneter.
- d. Menyajikan analisis deskriptif yang berkaitan dengan neraca pembiayaan sektoral, keterkaitan finansial antar sektor, *velocity of income*, dan penyebab "*financial deepening*" berdasarkan data NAD 2011-2015.
- e. Dasar untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan NAD Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan NAD tahunan ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab I: Pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi tulisan ini, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teori Neraca Arus Dana, menguraikan mengenai definisi dan kerangka teori NAD. Selain itu, dijelaskan pula hubungan NAD dengan sistem neraca nasional. Kegunaan dan keterbatasan NAD akan dijelaskan pula di akhir bab ini.

Bab III: Neraca Arus Dana Indonesia, membahas mengenai kerangka NAD Indonesia, sumber data, dan metode penyusunan.

Bab IV: Analisis Deskriptif Neraca Arus Dana Indonesia, menguraikan secara deskriptif mengenai Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2015, Perkembangan Tabungan Bruto, Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*) dan Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*).

<http://www.bps.go.id>

BAB II

KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

2.1 Penjelasan Umum

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data yang dirancang untuk memperlihatkan transaksi finansial³ antar berbagai sektor ekonomi, misalnya: pemerintah, perusahaan pemerintah, asuransi, bank umum, korporasi nonfinansial, dan sebagainya. Setiap sektor dalam NAD memiliki seperangkat sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial, seperti: deposito, obligasi, pinjaman, dan sebagainya. Instrumen finansial ini merupakan komponen harta atau kewajiban finansial dari masing-masing sektor. Karena memasukkan sektor Luar Negeri sebagai salah satu sektornya, maka disebut juga sebagai sistem yang terbuka untuk setiap transaksi. Dengan kata lain, setiap pembelian instrumen finansial pada suatu sektor akan menjadi penjualan di sektor lain. NAD juga dapat dilihat sebagai suatu perangkat data yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan dengan sektor-sektor surplus dan defisit.

NAD merupakan salah satu bagian dari sistem neraca nasional. Sistem ini mencakup semua neraca yang menggambarkan seluruh aspek kegiatan ekonomi dalam bentuk terpadu (*integrated accounts*). Termasuk dalam sistem ini adalah neraca pendapatan nasional, neraca pembayaran, tabel input-output, dan neraca sosial ekonomi. Seluruh neraca-neraca itu menggambarkan berbagai ragam aspek kegiatan ekonomi. Neraca pendapatan nasional dan tabel input-output menggambarkan kegiatan produksi atau pembelian dan penjualan barang dan jasa sehingga dikenal juga dengan sebutan neraca riil. Sedangkan NAD sebagai neraca modal dalam neraca pembayaran menunjukkan neraca keuangan yang memungkinkan terjadinya kegiatan di sektor riil.

Bab ini menjelaskan secara umum kerangka teori dan cara penyusunan NAD. Selain itu, akan diuraikan pula kedudukan NAD dalam sistem neraca nasional. Bagi para pengguna NAD, diberikan pula uraian tentang kegunaan NAD untuk perencanaan dan analisis ekonomi makro. Sedangkan pada akhir bab ini diuraikan beberapa masalah dan keterbatasan NAD.

³ Transaksi Finansial adalah transaksi yang dicerminkan oleh instrumen-instrumen finansial dalam neraca akhir tahun.

2.2 Kerangka Teori NAD

Secara sederhana, NAD menggambarkan bagaimana tabungan dalam perekonomian digunakan untuk membiayai investasi. Dalam ekonomi makro, ada satu persamaan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tabungan sama dengan investasi, tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk masing-masing sektor ekonomi secara terpisah. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah investasi (I) atau $Y = C + I$. Jika tabungan (S) didefinisikan sebagai $S = Y - C$, maka $S = I$. Umumnya, pendapatan sektor Rumah Tangga secara makro selalu lebih besar dari pengeluaran. Sebaliknya, sektor korporasi Non-Finansial selalu defisit. Dengan demikian, sektor korporasi Non-Finansial harus meminjam dari sektor Rumah Tangga. Sektor lainnya, misalnya Bank, merupakan perantara keuangan yang menghimpun dana dari beberapa sektor dan menyalurkannya ke sektor lain. NAD menyediakan data keuangan secara rinci mengenai pinjam-meminjam tersebut melalui berbagai instrumen finansial.

Data NAD biasanya disajikan dalam bentuk matriks. Kolomnya menggambarkan sektor dan barisnya menggambarkan berbagai jenis instrumen finansial. Setiap sektor mempunyai dua kolom, yaitu kolom pertama menunjukkan perubahan harta (penggunaan dana) dan kolom kedua menyatakan perubahan kewajiban (sumber dana). Kenaikan jumlah harta maupun kewajiban suatu sektor dicerminkan oleh arus finansial positif. Sebaliknya, penurunan harta atau kewajiban ditunjukkan oleh arus finansial negatif. Arus tersebut menunjukkan konsep "net" dalam pengertian bahwa suatu sektor dapat mempunyai arus yang berasal dari transaksi bulanan, harian, dan mungkin untuk instrumen finansial tertentu dapat terjadi setiap saat.

2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional

Dalam sistem neraca nasional (SNA 2008), neraca lengkap (*Integrated System of National Accounts*) secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) neraca pokok yaitu: neraca berjalan, neraca akumulasi dan balance sheet. Neraca berjalan mencatat kegiatan ekonomi dalam kurun waktu satu tahun. Neraca berjalan terdiri dari neraca produksi, neraca pendapatan yang dihasilkan, neraca distribusi pendapatan primer, neraca distribusi pendapatan sekunder dan neraca penggunaan pendapatan. Neraca akumulasi mencatat penambahan aset finansial/non finansial dalam kurun waktu tertentu. Neraca Akumulasi ini terdiri dari neraca modal, neraca finansial, neraca perubahan volume dan neraca perubahan harga (revaluasi). Neraca Finansial ini dikenal sebagai Neraca Arus Dana (NAD). Sementara itu, *Balance Sheet* mencatat nilai awal dan akhir dari aset-aset baik aset finansial maupun aset non-finansial pada awal/akhir tahun.

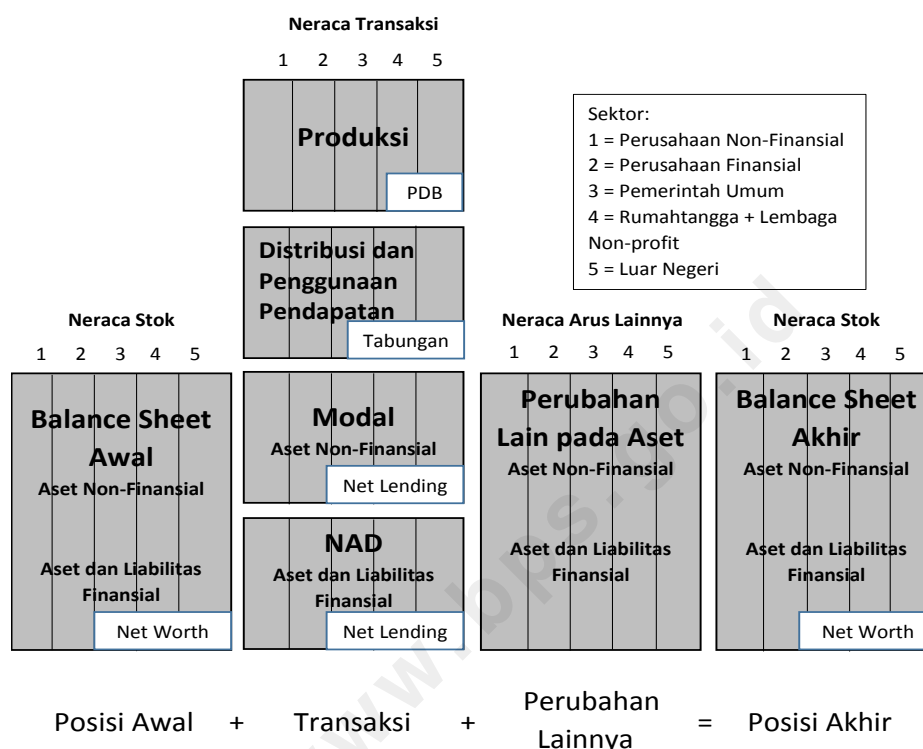
Bila sistem neraca nasional dikaitkan dengan sistem neraca arus dana, maka ada dua neraca yang mempunyai hubungan erat, yaitu neraca penggunaan pendapatan dengan neraca modal. Dari neraca penggunaan pendapatan dapat diturunkan Tabungan Bruto, sedangkan dari neraca modal dapat diturunkan Pembentukan Modal Tetap dan Pinjaman Neto. Dalam NAD, pinjaman neto ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perubahan instrumen-instrumen finansial baik di sisi penggunaan maupun sumber.

Neraca Penggunaan Pendapatan (*Use of Disposable Income Account*) merupakan salah satu dari neraca distribusi pendapatan yang menggambarkan tentang penggunaan *disposable income* (pendapatan disposable). Pendapatan *disposable* adalah total seluruh pendapatan yang berasal dari pendapatan dari faktor produksi (tenaga kerja dan modal) ditambah dengan pendapatan kepemilikan ditambah pendapatan dari transfer berjalan (*current transfer*) dikurangi seluruh total pengeluaran yaitu pembayaran kepemilikan dan pengeluaran transfer berjalan. Jadi pendapatan *disposable* merupakan pendapatan bersih sebelum dikurangi pengeluaran untuk konsumsi. Selisih pendapatan *disposable* dengan pengeluaran konsumsi disebut tabungan (*saving*). Neraca Penggunaan Pendapatan (*Use of Disposable Income Account*) merupakan neraca terakhir dalam kelompok neraca berjalan (*current accounts*). Angka tabungan yang berasal dari Neraca Penggunaan Pendapatan selanjutnya dicatat sebagai sumber pada Neraca Modal (*Capital Account*). Neraca Modal mencatat sumber dan penggunaan dana menurut rincian transaksi modal. Penggunaan dana untuk transaksi modal diantaranya adalah Pembentukan Modal Bruto atau harta riil yang terdiri dari Pembentukan Modal Tetap Bruto ditambah Perubahan Inventori.

Tujuan penyusunan NAD adalah menyediakan data rinci mengenai kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi dari beberapa sektor surplus ke beberapa sektor defisit dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai suatu sistem data keuangan yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus konsisten dengan data dari neraca riil (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca pendapatan nasional. Kegiatan pasar finansial sebagian ditentukan oleh variabel-variabel dari sektor riil melalui keputusan atas besarnya tabungan dan investasi, dan sebagian lagi ditentukan oleh variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga dan penawaran berbagai jenis instrumen finansial. NAD menyediakan data yang penting untuk melakukan analisis secara empiris, misalnya untuk melihat interaksi antara tabungan dan investasi, hutang dan piutang, perilaku perantara finansial, dan penentuan tingkat suku bunga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, serta Neraca Modal dengan Neraca Arus Dana dapat digambarkan dalam bagan 1 berikut ini.

BAGAN 1
Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional



Berdasarkan Bagan 1, dapat ditelusuri neraca berjalan yang menyajikan data mengenai rincian pendapatan dan pengeluaran masing-masing sektor. Selisih pendapatan dan pengeluaran ini menghasilkan Tabungan Bruto, karena di dalamnya masih termasuk komponen penyusutan barang modal. Dalam Neraca Modal digambarkan bagaimana barang modal dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan. Selisih antara Tabungan Bruto yang berasal dari Neraca Pendapatan dan Pengeluaran dengan jumlah Pembentukan Barang Modal merupakan Pinjaman Neto. Nilainya bisa positif atau negatif. Selanjutnya Pinjaman Neto tersebut dalam NAD dirinci lagi ke dalam berbagai jenis instrumen finansial dan sektor pelakunya.

2.4 Kegunaan Neraca Arus Dana

Salah satu manfaat dalam penyusunan NAD adalah tersedianya suatu perangkat data keuangan makro dalam bentuk yang lengkap dan konsisten. Lengkap dalam pengertian bahwa NAD melibatkan seluruh instrumen finansial dan pelakunya. Sementara konsisten berarti bahwa data keuangan yang disajikan harus mengikuti aturan tertentu. Misalnya, jumlah sumber dan penggunaan setiap instrumen finansial

untuk keseluruhan ekonomi harus sama besarnya. Begitu pula jumlah seluruh sumber dan penggunaan untuk setiap sektor harus sama besarnya. Dengan demikian NAD dapat digunakan sebagai dasar analisis ekonomi makro, khususnya dalam bidang moneter.

2.4.1 *Pangkalan Data*

NAD merupakan suatu pangkalan data (data base), yang menyediakan catatan-catatan transaksi keuangan secara lengkap dan konsisten. Berdasarkan informasi ini dapat dibuat analisis deskriptif mengenai kegiatan menyeluruh pasar uang dan modal.

2.4.2 *Alat Analisis*

NAD banyak dipakai oleh para pengguna data sebagai alat analisis. Para pengamat ekonomi makro yang tertarik untuk menganalisis kaitan antara sektor finansial dan riil dapat menggunakan informasi tabungan dan investasi riil. Pengamat lain yang tertarik untuk melihat secara lebih tajam perilaku keuangan sektor tertentu, misalnya sektor korporasi Non Finansial, dapat menggunakan data deret berkala untuk menghitung berbagai jenis rasio, seperti rasio dana yang berasal dari hutang-hutang terhadap modal saham, dan dari pinjaman jangka pendek terhadap pinjaman jangka panjang. Terlebih lagi jika data yang tersedia tidak hanya dalam bentuk arus tetapi juga dalam bentuk level, maka pengamat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Sektor Rumah Tangga merupakan sektor yang sering diminati para pengamat ekonomi. Jumlah perubahan harta dan kewajiban lancar seperti deposito dan kredit konsumen dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pengeluaran rumah tangga.

2.4.3 *Penerapan Teori Portfolio*

Berdasarkan teori portfolio, pelaku ekonomi baik sebagai individu maupun perusahaan melakukan investasinya ke berbagai jenis instrumen finansial sesuai dengan hubungan antara hasil dan risiko yang ditawarkan oleh pasar. Jika biaya transaksi masing-masing jenis portfolio diabaikan, maka para pelaku ekonomi akan merubah perilaku investasinya sesuai dengan perubahan rasio keuntungan masing-masing portfolio. Dalam konteks keseimbangan umum, perubahan relatif dari penawaran suatu aset hanya akan diterima pelaku ekonomi jika keuntungan relatif atas aset tersebut juga meningkat atau harganya lebih rendah. Dalam model portfolio yang lengkap, biaya transaksi juga diperhitungkan sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis. Teori portfolio ini dapat diterapkan secara sederhana dengan menggunakan kerangka NAD.

2.4.4 Arus Penawaran dan Permintaan untuk Menentukan Suku Bunga

Pengamat ekonomi yang tertarik untuk meramalkan tingkat suku bunga dapat memanfaatkan arus finansial sebagai alatnya. Prosedur sederhana yang dapat dilakukan adalah memperkirakan jumlah permintaan satu atau lebih instrumen finansial melalui tingkat pertumbuhan portfolio sektor-sektor yang biasanya memegang instrumen tersebut seperti bank dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian secara terpisah diperkirakan penawaran instrumen tersebut. Adanya kelebihan permintaan dibanding penawaran terhadap satu atau lebih instrumen, pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan penawaran hingga mencapai titik keseimbangan umum. Melalui proses iterasi dan penyesuaian untuk mencapai titik keseimbangan tersebut akan dapat diperkirakan tingkat suku bunga dan arus finansial yang terjadi.

2.4.5 Penerapan untuk Perencanaan dan Proyeksi

Sistem data NAD dapat digunakan untuk memperkirakan arus finansial, tabungan, dan investasi sektoral sebagai masukan bagi perencanaan sektoral dan nasional. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan variabel-variabel tersebut adalah menggunakan rasio tetap masing-masing sektor. Prosedur sederhana ini harus dimodifikasi supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Hal ini dilakukan karena dua hal yaitu : pertama, arus finansial biasanya berfluktuasi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk melakukan modifikasi dapat digunakan rasio rata-rata tiga sampai lima tahunan. Kedua, hendaknya dibuat secara iteratif dan disesuaikan dengan memperhatikan konsistensi angka-angka dalam kerangka NAD baik secara sektoral maupun keseluruhan. Kadang-kadang, dalam proses penyesuaian ini didapatkan pula beberapa informasi tidak langsung. Dalam konteks menyusun perencanaan, dapat dimulai dengan memperkirakan investasi riil untuk masing-masing sektor, kemudian diikuti dengan memperkirakan besarnya tabungan yang dapat diciptakan masing-masing sektor dengan menggunakan rasio NAD. Berdasarkan perkiraan tersebut dapat diperkirakan nilai dari pinjaman neto dan variabel-variabel terkait lainnya.

BAB III

KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA

3.1 Kerangka NAD Indonesia

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, NAD adalah suatu sistem pencatatan statistik finansial yang menggambarkan transaksi pinjam-meminjam antar berbagai sektor di dalam suatu perekonomian. Berdasarkan hal itu, paling tidak ada dua hal yang harus dijelaskan lebih lanjut yaitu melalui instrumen finansial apa proses pinjam-meminjam itu dilakukan dan sektor-sektor perekonomian mana saja yang menjadi pelakunya. Untuk menggambarkan arus finansial antarsektor melalui instrumen finansial tertentu, lazimnya digunakan matriks yang barisnya menggambarkan instrumen finansial dan kolomnya menunjukkan sektor (pelaku ekonomi). Bagaimana menentukan pembagian sektor dan instrumen finansial yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia akan dijelaskan secara lebih rinci, berikut ini.

3.1.1 Pembagian Sektor

Dalam penyusunan statistik, khususnya untuk keperluan analisis tertentu, lazim dilakukan penggolongan unit-unit analisis ke dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Penggolongan ini sangat berguna untuk melihat secara lebih tajam ciri khas kelompok dan perbandingan antarkelompok. Dalam statistik produksi misalnya, unit-unit analisis dikelompokkan menurut kegiatan ekonominya, seperti sektor pertanian, industri, dan sebagainya⁴. Berbeda dengan itu, NAD membagi perekonomian menurut kelompok institusi⁵. Alasan pembagian tersebut adalah transaksi finansial dan keputusan investasi yang dilakukan dalam suatu sistem perekonomian lebih ditentukan oleh pelaku ekonomi, seperti Rumah Tangga, Pemerintah, dan sebagainya.

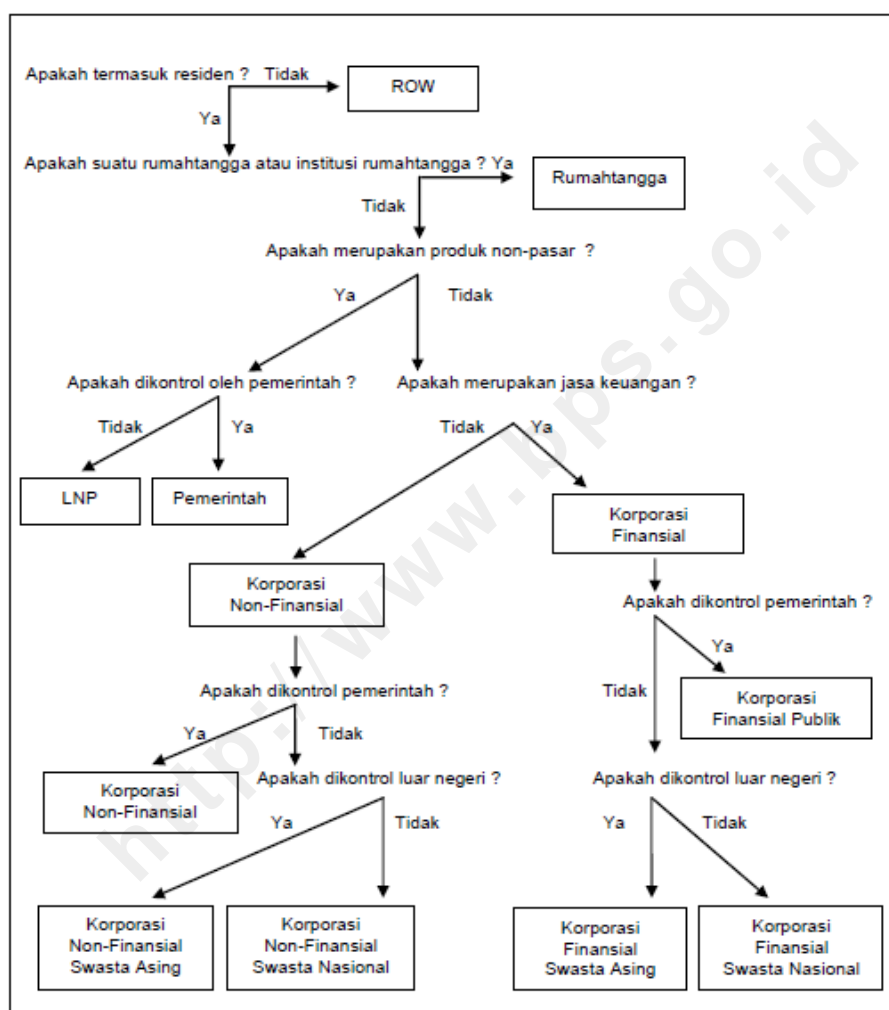
Salah satu tujuan penyusunan NAD adalah untuk mengetahui perilaku pinjam-meminjam berbagai pelaku ekonomi melalui penggunaan instrumen-instrumen finansial. Untuk menunjang maksud tersebut, perekonomian harus dibagi menjadi sektor-sektor tertentu, sehingga lebih mudah dianalisis. Unit-unit ekonomi yang mempunyai motivasi serupa terhadap keputusan finansial dikelompokkan ke dalam satu sektor. Dengan demikian, paling sedikit perekonomian harus dibagi ke dalam enam sektor, yaitu Korporasi Non Finansial, Korporasi Finansial, Pemerintah, Rumah Tangga, LNPRT, dan Luar Negeri; karena keenam sektor tersebut mempunyai perilaku yang sangat berbeda. Pemerintah misalnya, merupakan suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab

⁴ Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) lazim dipakai untuk keperluan penyusunan statistik produksi. KLUI merupakan hasil modifikasi dari International Standard Industrial Classification (ISIC).

⁵ Dalam publikasi ini istilah sektor dan institusi digunakan untuk maksud yang sama.

terhadap pelayanan kepada masyarakat dan seringkali melakukan investasi dalam jumlah besar. Korporasi Finansial (khususnya Bank) berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada investor. Sedangkan motivasi Korporasi Non Finansial adalah mencari keuntungan dari investasi yang ditanam. Dalam praktiknya, sektor-sektor tersebut (kecuali Luar Negeri) perlu dipecah lagi sesuai dengan kebutuhan. Berikut bagan pembagian sektor dalam NAD.

BAGAN 2
Pembagian Sektor dalam NAD



Penjelasan untuk masing-masing sektor institusi adalah sebagai berikut:

1. Sektor Korporasi Non-Finansial

Korporasi non-finansial adalah korporasi yang aktivitas utamanya memproduksi barang atau jasa non-finansial. Seluruh korporasi non-finansial residen termasuk dalam sektor korporasi non-finansial, dan di dalam praktek mencakup sebagian besar korporasi. Selain itu, mencakup lembaga non-profit (LNP) yang terlibat produksi pasar non-finansial seperti rumah sakit, sekolah, atau perguruan tinggi

yang memungkinkan mereka menutup biaya produksi, atau asosiasi bisnis yang dibiayai korporasi non-finansial, atau *un-incorporated enterprises* yang berperan mempromosikan dan melayani kepentingan enterprise.

2. Sektor Korporasi Finansial

Sektor Korporasi Finansial mencakup seluruh korporasi residen yang aktivitas utamanya menyediakan jasa keuangan, termasuk jasa perantara keuangan, asuransi, dan dana pensiun, serta unit yang memfasilitasi perantara keuangan. Selain itu, sektor (termasuk LNP) lain yang terlibat dalam produksi pasar keuangan, seperti yang dibiayai oleh pelanggan enterprise finansial yang berperan mempromosi dan melayani kepentingan enterprise.

3. Sektor Pemerintah

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), serta pemerintah desa dan unit dana jaminan sosial (*social security funds*) yang dikendalikan pemerintah. Termasuk LNP yang terlibat produksi non-pasar yang dikendalikan unit pemerintah. Namun dalam publikasi ini hanya dicakup sektor pemerintah pusat saja.

4. Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga

Sektor LNPRT terdiri dari seluruh LNP residen (kecuali yang dikendalikan oleh pemerintah) yang menyediakan barang atau jasa non-pasar untuk rumah tangga atau masyarakat luas.

5. Sektor Rumah Tangga

Rumah Tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang berbagi tempat tinggal yang sama, yang menyatukan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaan serta mengkonsumsi barang dan jasa tertentu secara kolektif, utamanya kelompok perumahan dan makanan. Masing-masing anggota rumah tangga punya klaim atas sumber daya kolektif rumah tangga. Paling tidak, keputusan yang mempengaruhi konsumsi atau flow ekonomi lain diambil untuk rumah tangga secara keseluruhan.

Sektor Rumah Tangga terdiri dari seluruh rumah tangga residen, termasuk institusi rumah tangga yang terdiri dari kelompok individu yang tinggal di rumah sakit, panti jompo, biara, penjara, dan sejenisnya untuk periode yang cukup lama. Seperti telah dicatat, bahwa suatu unit usaha (*un-incorporated enterprises*) milik rumah tangga (usaha rumah tangga) diperlakukan sebagai bagian integral dari rumah tangga bukan merupakan bagian yang terpisah dari rumah tangga, kecuali jika pembukuan cukup detail dalam mencatat aktivitas yang dilakukan, yang akan diperlakukan sebagai kuasi korporasi.

Selain unit institusional residen yang dialokasikan pada kelima sektor institusi

tersebut, ada juga unit institusional non-residen yang bertransaksi dengan unit residen dialokasikan pada luar negeri. Pada neraca total ekonomi yang menunjukkan hubungan dengan luar negeri lebih mudah untuk mengacu pada rumah tangga atau korporasi non-residen, karena transaksi dengan luar negeri dicatat seolah-olah luar negeri merupakan *de facto* untuk sektor yang ke enam.

Dari ke lima sektor institusi di atas masing-masing dapat dibagi lagi ke dalam sub-sektor. Tidak ada cara tunggal yang digunakan dalam mengalokasi ke dalam sub-sektor untuk semua tujuan atau semua negara, sehingga dalam men-sub-sektor dapat digunakan cara yang berbeda. Membagi total ekonomi ke dalam sektor dimaksudkan untuk meningkatkan kegunaan neraca di dalam analisis ekonomi, dengan cara mengelompokkan unit institusi sesuai dengan tujuan dan sifatnya. Sektor dan sub-sektor juga diperlukan dalam targeting atau monitoring kelompok tertentu dalam suatu rencana kebijakan. Contoh, sektor Rumah Tangga dibagi ke dalam sub-sektor agar dapat mengamati kelompok masyarakat yang dipengaruhi atau mendapatkan manfaat dari proses pembangunan, kebijakan ekonomi pemerintah, atau langkah-langkah kebijakan sosial. Pembagian sektor ke dalam sub-sektor tergantung pada: jenis analisis yang akan dilakukan, kebutuhan pembuat kebijakan, ketersediaan data, dan kondisi ekonomi dan pengaturan institusi di dalam suatu negara.

Sub-sektor dari masing-masing sektor institusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sektor Korporasi Non-Finansial

Terdapat dua kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi sub-sektor di dalam sektor korporasi non-finansial. Salah satu kriteria menunjukkan LNP yang terpisah dari unit dalam sektor ini. Unit LNP itu digambarkan sebagai LNP bisnis non-finansial (FPIs). Kriteria ke dua menunjukkan unit pengendali yang dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Korporasi non-finansial publik,
- b. Korporasi non-finansial swasta nasional, dan
- c. Korporasi non-finansial dikendalikan pihak asing

2. Sektor Korporasi Finansial

Korporasi finansial dapat dibagi menjadi tiga, yaitu korporasi perantara finansial, bantuan finansial, dan finansial lainnya. Korporasi perantara finansial adalah unit institusi yang pada neraca mereka dikenakan kewajiban untuk tujuan memperoleh aset finansial dengan terlibat dalam transaksi finansial di pasar uang. Di dalamnya termasuk korporasi asuransi dan dana pensiun. Korporasi penunjang keuangan adalah unit institusi yang terlibat dalam melayani pasar uang, tetapi tidak mengambil alih kepemilikan aset dan kewajiban finansial yang ditangani. Korporasi finansial lainnya adalah unit institusi yang menyediakan jasa

keuangan, di mana sebagian besar aset atau kewajibannya tidak tersedia di pasar uang terbuka.

Sektor Korporasi Finansial dibagi menjadi sembilan sub-sektor sesuai dengan jenis aktivitas di pasar dan likuiditas dari kewajibannya. Sembilan sub-sektor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah institusi keuangan nasional yang bertugas mengendalikan seluruh aspek kunci dari sistem keuangan.

b. Korporasi Depositori selain Bank Sentral

Korporasi depository di luar bank sentral, terlibat dalam intermediasi keuangan sebagai aktivitas utamanya. Untuk tujuan ini, mereka memiliki kewajiban dalam bentuk deposito atau instrumen finansial (seperti sertifikasi deposito jangka pendek) sebagai pengganti deposito.

c. Dana Pasar Uang (*MMFs*)

Dana pasar uang (*MMFs*) adalah skema investasi kolektif yang menghimpun dana dengan menerbitkan saham atau *units* pada publik. Hasilnya diinvestasikan dalam instrumen pasar uang, saham, atau *unit MMFs*, instrumen hutang yang dapat dipindah-tangankan dengan sisa jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun, deposito bank, dan instrumen yang mengejar tingkat pengembalian mendekati suku bunga instrumen pasar uang. Saham *MMFs* dapat di-pindah-tangan-kan secara langsung pada pihak ke tiga melalui cek atau sarana lain, karena sifat skema instrumen investasi, saham, atau *units MMFs* dianggap sebagai *close substitutes* untuk deposito.

d. Dana Investasi *non-MMFs*

Dana investasi *non-MMFs* adalah skema investasi kolektif yang menghimpun dana dengan cara menerbitkan saham atau *units* pada publik. Hasilnya diinvestasikan dalam bentuk aset finansial selain aset jangka pendek dan dalam aset non-finansial (umumnya *real estate*).

e. Intermediasi Keuangan Lain, kecuali Asuransi dan Dana Pensiun (*ICPFs*)

Intermediasi keuangan lain kecuali asuransi dan dana pensiun terdiri dari Korporasi Finansial yang terlibat dalam menyediakan jasa finansial dengan menimbulkan kewajiban dalam bentuk selain mata uang, deposito, atau *close substitutes* untuk deposito pada rekening mereka sendiri guna memperoleh aset finansial yang terlibat dalam transaksi di pasar uang.

f. Penunjang Keuangan

Penunjang keuangan terdiri dari Korporasi Finansial yang utamanya terlibat dalam aktivitas yang terkait dengan transaksi aset dan kewajiban finansial, atau dengan menyediakan konteks regulasi untuk transaksi ini, tetapi dalam

kondisi tertentu yang tidak termasuk dalam penunjang untuk mengambil pemilikan aset dan kewajiban finansial yang ditransaksikan.

g. Institusi *Captive Financial* dan Pemberi Pinjaman Uang

Institusi *captive financial* dan pemberi pinjaman uang terdiri dari unit institusi yang memberi jasa keuangan di mana sebagian besar aset dan kewajibannya tidak ditransaksikan dalam pasar uang terbuka.

h. Korporasi Asuransi (*ICs*)

Korporasi asuransi, terdiri dari usaha berbadan hukum, entitas mutual, dan entitas lain, yang fungsi utamanya adalah menyediakan asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, kebakaran atau bentuk lain bagi individu atau kelompok unit institusi; atau jasa reasuransi bagi korporasi asuransi lain.

i. Dana Pensiun (*PFs*)

Skema asuransi kesehatan sosial dapat diatur majikan atau pemerintah, mereka dapat diatur perusahaan asuransi atas nama karyawan, atau unit institusi yang terpisah dibentuk untuk menyimpan dan mengelola aset guna memenuhi dan mendistribusikan dana pensiun. Sub-sektor dana pensiun terdiri dari asuransi sosial dana pensiun yang terpisah dari unit institusi yang mendirikan.

3. Sektor Pemerintah

Peng-subsektor-an sektor pemerintah membolehkan unit LNP pemerintah dan dana jaminan sosial dikeluarkan untuk masing-masing pemerintah pusat, daerah dan pemerintah desa.

Metode pertama dalam men-sub-sektor-kan pemerintah adalah:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);
- c. Pemerintah Desa;
- d. Dana Jaminan Sosial;

Metode ke dua dalam men-sub-sektor-kan pemerintah adalah:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);
- c. Pemerintah Desa;

Pilihan antara kedua metode *sub-sectoring* tergantung pada ukuran, atau kepentingan dana jaminan sosial dalam suatu negara, dan bagaimana hal itu dikelola.

4. Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga

LNPRT jeins pertama terdiri dari yang dibentuk oleh masyarakat untuk menghasilkan barang jasa untuk kepentingan anggota. Jasa disediakan secara

gratis dan dibiayai oleh anggota secara reguler. LNP semacam ini termasuk ke dalam sektor LNPRT seperti organisasi profesi, partai politik, serikat dagang, tempat ibadah, organisasi agama, sosial, dan budaya, tempat rekreasi atau klub olahraga amatir; tidak termasuk lembaga serupa yang dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan LNPRT jenis ke dua terlibat dalam aktivitas bantuan (charities), relief, atau agen bantuan yang didirikan untuk tujuan filantropis, serta tidak melayani kepentingan anggota yang mengendalikan LNPRT. Seperti LNPRT yang menyediakan barang dan jasa pada basis non-pasar untuk kepentingan rumah tangga, termasuk rumah tangga yang terkena bencana alam atau perang. LNPRT jenis yang ke tiga mencakup yang menyediakan jasa kolektif seperti unit penelitian yang hasilnya tersedia gratis, kelompok lingkungan, dll. Jenis LNPRT ini lebih tidak umum dari jenis LNPRT sebelumnya, dan mungkin tidak selalu tampil secara signifikan di suatu negara.

5. Sektor Rumah Tangga

Sektor Rumah Tangga terdiri dari seluruh unit rumah tangga residen. Ada banyak cara di mana sektor Rumah Tangga di-sub-sektor-kan, dan statistisi memberi pertimbangan pada berbagai kemungkinan. Lebih dari satu metode diadopsi jika ada suatu permintaan untuk pemecahan masalah yang berbeda dari sektor Rumah Tangga oleh pengguna data, analis, atau pengambil kebijakan. Rumah Tangga dapat dikelompokkan ke dalam sub-sektor sesuai sumber pendapatan terbesar. Metode lainnya di dalam pembentukan sub-sektor memerlukan seseorang sebagai referensi yang diidentifikasi untuk setiap rumah tangga.

6. Luar Negeri

Dalam penyusunan NAD Indonesia, data untuk sektor Luar Negeri diperoleh dari Bank Indonesia. Data tersebut diperoleh dari transaksi luar negeri yang ada pada Neraca Pembayaran (*Balance of Payment*) dan Posisi Investasi Internasional (*International Investment Position/IIP*). Kedua neraca tersebut diperoleh dari Publikasi resmi Bank Indonesia. Neraca BoP dan IIP secara konsep sudah sesuai dengan SNA 2008 karena disusun menurut manual yang terbaru yaitu BoP manual 6.

Secara lengkap definisi masing-masing sektor di atas diberikan pada Lampiran 1, dalam publikasi ini.

3.1.2 Pembagian Kategori Transaksi

Baris-baris NAD pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian atas (*above the line*) dan bagian bawah (*below the the line*). Bagian atas berisi Tabungan Bruto dan Perolehan Aset (harta) Non-Finansial yang dalam istilah lain

disebut investasi riil. Tabungan Bruto dibagi menjadi dua yaitu Penyusutan Barang Modal dan Tabungan Neto. Sedangkan Perolehan Aset Non-Finansial terdiri dari Aset yang dapat diproduksi (*produced assets*) dan aset yang tidak dapat diproduksi (*non produced assets*). *Produced assets* terdiri dari aset tetap (*fixed assets*) atau barang modal, perubahan stok, dan perolehan barang berharga. Sedangkan contoh dari *non produced assets* adalah tanah. Semua rincian tersebut berasal dari sektor riil yang biasanya dituangkan dalam neraca modal nasional dan merupakan jembatan menuju ke bagian bawah NAD atau juga bagian finansial.

Sebelum masuk ke bagian finansial untuk kepentingan pengecekan konsistensi, diperkenalkan beberapa baris pembantu. Pertama, pinjaman neto yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan investasi bruto. Akan tetapi, karena matriks NAD disajikan menurut sektor, maka selalu terjadi perbedaan antara tabungan dan investasi real. Jika angka baris ini positif berarti sektor yang bersangkutan mengalami kelebihan dana (sektor surplus). Sebaliknya, jika negatif disebut sektor yang kekurangan dana (sektor defisit). Matriks NAD dapat digunakan untuk menelusuri aliran dana dari sektor surplus ke sektor defisit melalui berbagai instrumen finansial yang nantinya digambarkan pada bagian bawah.

Nilai pinjaman neto dapat pula dihitung berdasarkan selisih jumlah penggunaan finansial dengan sumber finansial. Logikanya, per definisi pinjaman neto adalah bagian investasi finansial. Begitu pula selisih jumlah penggunaan dan sumber juga akan merupakan investasi finansial, tetapi diperoleh dari mutasi/transaksi finansial. Apabila angka ini negatif berarti jumlah sumber finansial lebih besar dari jumlah penggunaannya. Sebaliknya, jika selisih tersebut positif menunjukkan jumlah penggunaan lebih besar dari sumber. Perbedaan kedua pendekatan ini dimunculkan pada baris selisih statistik. Dengan demikian, terdapat lima baris penunjang yaitu pinjaman neto, selisih statistik, investasi finansial neto, jumlah penggunaan finansial, dan jumlah sumber finansial. Di bawah baris penunjang ini selanjutnya merupakan bagian NAD yang berisi berbagai instrumen finansial.

NAD idealnya menampung seluruh jenis instrumen finansial yang dipakai oleh masing-masing sektor dalam perekonomian Indonesia. Jika pendekatan ini ditempuh maka daftar instrumen akan menjadi sangat panjang, sehingga sulit untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari daftar ini. Untuk itu dilakukan penggolongan jenis instrumen yang sejenis atau mempunyai sifat hampir sama, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen khas yang dimiliki oleh sektor tertentu. Misalnya, Cadangan Asuransi dan Dana Pensiun dimunculkan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan

sektor Asuransi dan Dana Pensiun. Begitu pula transaksi kategori pajak yang hanya menggambarkan hubungan utang dan piutang pajak antara sektor Pemerintah dengan sektor-sektor wajib pajak. Untuk itu pembagian transaksi finansial dalam NAD dikelompokkan ke dalam beberapa instrumen finansial sbb:

1. Emas Moneter dan SDRs

a. Emas moneter

Emas moneter merupakan emas dengan mana otoritas moneter (atau pihak lain yang tunduk pada kontrol efektif dari otoritas moneter) mempunyai hak dan dipegang sebagai aset cadangan. Emas moneter terdiri dari emas batangan (termasuk emas yang dipegang dalam neraca alokasi emas) dan neraca emas tidak dialokasi pada non-residen yang memberi hak untuk mengklaim pengiriman emas.

b. SDRs

Special Drawing Rights (SDRs) merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF dan dialokasi pada anggotanya untuk melengkapi cadangan aset yang ada. *Department of Special Drawing Rights IMF* mengelola cadangan aset dengan mengalokasi *SDRs* di antara negara anggota *IMF* dan badan internasional (secara kolektif dikenal sebagai peserta).

2. Uang Tunai dan Simpanan

a. Uang tunai

Uang tunai terdiri dari uang kertas dan koin dengan nilai nominal yang tetap dan diterbitkan atau di bawah otoritas bank sentral atau pemerintah (koin *commemorative* yang tidak beredar harus dikeluarkan, sebagaimana yang belum diterbitkan, atau uang tunai *demonetized*). Suatu perbedaan harus tergambar antara mata uang domestik (yaitu mata uang yang menjadi kewajiban unit residen, seperti bank sentral, bank lain, dan pemerintah pusat) dan mata uang asing yang merupakan kewajiban unit non-residen (seperti bank sentral, bank lain, dan pemerintah dari negara lain).

b. Simpanan *transferable*

Simpanan *transferable* (simpanan yang dapat ditranfer) terdiri dari seluruh simpanan yang:

- i. dapat ditukarkan dengan uang kertas dan uang logam atas permintaan pada nilai nominal dan tanpa penalty atau pembatasan; dan
- ii. dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran melalui cek, wesel, giro order, debet/kredit langsung, atau fasilitas pembayaran langsung lainnya.

c. Posisi antar bank

Posisi antar bank umumnya dapat diidentifikasi dan berguna untuk mencatat kategori instrumen secara terpisah. Hal ini merupakan salah satu alasan dalam memisahkan pinjaman dan simpanan antar bank dari pinjaman dan simpanan lain. Alasan ke dua tertuju pada penghitungan biaya jasa perantara keuangan yang diukur tidak langsung (FISIM).

d. Simpanan *transferable* lainnya

Simpanan *transferable* lainnya adalah di mana satu pihak atau kedua belah pihak dalam transaksi, atau baik kreditur atau debitur atau kedua posisi itu, merupakan institusi bukan bank.

e. Simpanan lainnya

Simpanan lainnya terdiri dari seluruh klaim, selain simpanan transferable yang dinyatakan oleh bukti simpanan. Bentuk simpanan tertentu yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tabungan (yang selalu tidak dapat ditransfer), deposito berjangka, dan sertifikat deposito yang tidak dapat dinegoisasi. Kategori ini juga mencakup saham atau bukti simpanan semacam itu yang diterbitkan asosiasi tabungan dan pinjaman, pembangunan masyarakat, serikat kredit dsj. Simpanan dengan kemampuan transfer terbatas, yang dikecualikan dari kategori simpanan yang transferable disertakan di sini. Klaim terhadap IMF yang merupakan komponen cadangan devisa dan tidak dibuktikan melalui pinjaman, dicatat dalam bentuk simpanan lain. (Klaim pada IMF yang dibuktikan melalui pinjaman, harus masuk dalam pinjaman). Pembayaran marjin yang dibayar tunai terkait kontrak finansial derivatif (dijelaskan di bawah), termasuk dalam simpanan lain, seperti halnya overnight dan perjanjian membeli kembali jangka sangat pendek jika dianggap bagian dari definisi uang nasional yang diperluas. Perjanjian membeli kembali lainnya diklasifikasi sebagai pinjaman.

3. Surat Hutang (*Debt Securities*)

Surat hutang atau sekuritas hutang merupakan *negotiable instruments* yang memberikan suatu bukti hutang. Surat hutang mencakup tagihan, obligasi, sertifikat simpanan yang *negotiable*, *commercial paper*, *debentures*, sekuritas aset *backed*, dan instrumen sejenis yang umum diperdagangkan di pasar finansial.

Sekuritas hutang yang jatuh tempo dalam jangka pendek dan jangka panjang didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Sekuritas hutang jangka pendek, mencakup sekuritas yang mempunyai saat jatuh tempo *original* satu tahun atau kurang. Sekuritas dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang diklasifikasi sebagai jangka pendek, bahkan jika dikeluarkan di bawah fasilitas jangka panjang, seperti dalam menerbitkan fasilitas *note*.
- b. Sekuritas hutang jangka panjang mencakup sekuritas yang mempunyai saat

jatuh tempo *original* lebih dari satu tahun. Klaim dengan tanggal jatuh tempo *optional* terakhirnya lebih dari satu tahun dan klaim dengan tanggal jatuh tempo tidak terbatas, diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

4. Pinjaman

Pinjaman merupakan aset finansial yang:

- a. Dibuat saat kreditur meminjamkan dana secara langsung pada debitur, dan
- b. Dibuktikan dengan dokumen yang tidak dapat dinegoisasi (*negotiable*).

Pinjaman dapat dibagi lagi atas basis pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Pinjaman jangka pendek terdiri dari pinjaman yang mempunyai original jatuh tempo satu tahun atau kurang. Pinjaman yang dibayar kembali atas permintaan kreditur diklasifikasi sebagai jangka pendek, bahkan ketika pinjaman itu diharapkan berumur lebih dari setahun.
- b. Pinjaman jangka panjang terdiri dari pinjaman yang mempunyai masa jatuh tempo lebih setahun.

5. Ekuitas dan Dana Investasi Saham

a. Ekuitas

Ekuitas terdiri dari semua instrumen dan catatan pengakuan klaim pada nilai sisa dari suatu korporasi atau kuasi-korporasi setelah klaim dari seluruh kreditur dipenuhi. Ekuitas diperlakukan sebagai tanggungan dari unit institusi yang menerbitkan.

Ekuitas dibagi lagi menjadi:

i. Saham terdaftar

Saham terdaftar merupakan sekuritas ekuitas yang tercatat di dalam bursa saham.

ii. Saham tidak terdaftar

Saham tidak terdaftar merupakan sekuritas ekuitas yang tidak terdaftar dalam bursa saham.

iii. Ekuitas lainnya

Ekuitas lainnya merupakan ekuitas yang tidak berbentuk sekuritas.

b. Dana investasi saham atau *units*

Dana investasi merupakan investasi kolektif yang berlangsung jika para investor mengumpulkan dana untuk investasi aset finansial atau aset non-finansial.

i. Saham MMF atau *units*

MMF merupakan dana investasi yang diinvestasikannya atau utamanya dalam pasar uang sekuritas jangka pendek seperti *treasury bills*, *certificates of deposit*, dan *commercial paper*. MMF terkadang secara fungsional mirip dengan simpanan *transferable*, seperti akun dengan hak

menulis cek yang terbatas. Jika dana saham tersebut termasuk uang beredar dalam pelaporan ekonomi, mereka dicatat sebagai bagian yang terpisah *to allow* rekonsiliasi dengan statistik moneter. Saham atau unit MMF merepresentasi suatu klaim yang proporsional atas nilai MMF yang dibentuk.

ii. Dana investasi saham lainnya atau units

Dana investasi saham lainnya atau unit menggambarkan klaim atas suatu proporsi nilai dana investasi yang dibangun selain dari dana pasar uang.

6. Asuransi, Skema Pensiun, dan Jaminan Terstandar

a. Cadangan teknis asuransi non-jiwa

Cadangan teknis asuransi non-jiwa terdiri dari pembayaran di muka atas premi asuransi non-jiwa dan cadangan neto guna memenuhi klaim asuransi non-jiwa yang mungkin terjadi.

b. *Entitlement* asuransi jiwa dan jaminan hari tua

Entitlement asuransi jiwa dan jaminan hari tua memperlihatkan perluasan klaim finansial milik pemegang polis yang ditawarkan oleh suatu *enterprise* asuransi jiwa atau yang menyediakan jaminan hari tua. Hanya transaksi untuk asuransi jiwa dan jaminan hari tua yang dicatat pada neraca finansial, yakni selisih antara premi bersih yang diterima dan klaim yang dibayar.

c. *Entitlement* pensiun

Entitlement pensiun menunjukkan perluasan klaim finansial yang dipegang pensiunan di masa kini dan di masa mendatang terhadap majikan atau terhadap suatu pendanaan yang ditunjuk majikan untuk membayar pendapatan pensiun sebagai bagian dari perjanjian kompensasi antara majikan dan pekerja. Transaksi *entitlement* pensiun yang dicatat pada neraca finansial adalah selisih bersih antara kontribusi yang diterima dan manfaat yang dibayarkan.

d. Klaim dana pensiun pada pengelola pensiun

Majikan dapat melakukan kontrak dengan pihak ketiga untuk mengelola dana pensiun bagi pekerjanya. Jika majikan memutuskan untuk menetapkan persyaratan di dalam skema pensiun dan bertanggung jawab atas defisit pendanaan serta hak menahan setiap kelebihan dana, maka majikan digambarkan sebagai pengelola pensiun dan unit kerja di bawahnya sebagai administrator pensiun.

e. Ketentuan untuk panggilan di bawah jaminan yang terstandar

Ketentuan untuk panggilan di bawah jaminan yang distandarisasi terdiri dari pembayaran biaya neto dan ketentuan untuk memenuhi *outstanding calls* di bawah jaminan terstandar.

7. Finansial *Derivative* dan Opsi Saham Pekerja

a. Finansial *derivatives*

Finansial *derivatives* merupakan instrumen finansial yang terkait dengan instrumen finansial tertentu atau indikator atau komoditas, melalui mana risiko finansial tertentu diperdagangkan di pasar finansial atas namanya sendiri.

b. Opsi

Opsi merupakan kontrak yang memberikan pada pembeli hak opsi, namun bukan suatu obligasi untuk membeli (suatu pilihan "*call*") atau menjual (suatu pilihan "*put*") instrumen finansial tertentu atau komoditas pada harga yang ditentukan sebelumnya (harga "*strike*") dalam rentang waktu tertentu (opsi Amerika) atau pada tanggal tertentu (opsi Eropa). Opsi, dijual atau "*written*" dalam banyak jenis basis *underlying* seperti ekuitas, suku bunga, mata uang asing, komoditas, dan indeks tertentu.

c. *Forward*

Suatu kontrak *forward* merupakan kontrak finansial tanpa syarat yang merupakan kewajiban untuk diselesaikan pada tanggal yang ditentukan. Kontrak *forward* dan kontrak *forward* lain biasanya, namun tidak selalu diselesaikan melalui pembayaran tunai atau penyediaan instrumen finansial lainnya daripada pengiriman aktual dari item yang mendasari, dan oleh karenanya dinilai dan diperdagangkan secara terpisah dari item yang mendasari.

d. Opsi saham pekerja (*employee stock options* atau ESOs)

Opsi saham pekerja merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada tanggal tertentu (the "*grant*" date) di bawah mana seorang pekerja dapat membeli sejumlah saham majikan pada harga lain (the "*strike*" price) baik pada saat tertentu (the "*vesting*" date) atau di dalam periode (the *exercise period*) segera setelah tanggal pemberian hak opsi.

8. Akun penerimaan dan pembayaran lainnya

a. Kredit dagang dan uang muka

Kategori ini terdiri dari kredit dagang barang dan jasa yang diberikan pada korporasi, pemerintah, LNPRT, Rumah Tangga dan Luar Negeri, serta uang muka untuk pekerjaan yang sedang berlangsung (jika diklasifikasi sebagai inventori) atau hal ini telah dan sedang berlangsung. Kredit dagang dan uang muka tidak mencakup kredit untuk membiayai kredit dagang yang diklasifikasi sebagai pinjaman.

b. Lainnya

Kategori ini mencakup penerimaan dan pembayaran selain yang dijelaskan sebelumnya, yaitu jumlah yang tidak berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Kategori ini mencakup jumlah yang terkait dengan pajak, dividen, pembelian

dan penjualan sekuritas, sewa, upah dan gaji, dan kontribusi sosial. Bunga yang diperoleh namun tidak dibayarkan termasuk dalam item ini, hanya jika bunga yang diperoleh tidak ditambahkan pada nilai aset yang mana bunga dibayar (seperti yang biasa terjadi).

3.2 Sumber Data dan Metode Penyusunan

Dalam penyusunan NAD Indonesia, untuk sektor-sektor domestik digunakan metode penghitungan menurut keseimbangan transaksi yang dikeluarkan dan diterima oleh sektor-sektor dalam ekonomi sedangkan transaksi antara residen dan non-residen yang tergabung dalam sektor Luar Negeri dihitung secara tersendiri. Data ini diambil dari publikasi BoP dan IIP yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Penghitungan keimbangan instrumen dihitung dengan metode yang berbeda-beda untuk setiap instrumen maupun sektor finansial yang ada. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing metode penghitungannya:

3.2.1 Penyusunan Arus Transaksi Finansial

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, NAD menggambarkan arus finansial yang terjadi antarsektor ekonomi selama satu periode tertentu (satu tahun). Dalam praktik, arus finansial ini disusun dengan cara menghitung selisih nilai dari masing-masing kategori transaksi dari dua neraca (bagan transaksi) pada tahun yang berurutan. Oleh karena itu, arus finansial untuk suatu tahun tertentu bisa negatif atau positif. Dalam NAD, arus finansial dikelompokkan menjadi dua kolom yaitu sumber dan penggunaan. Arus finansial sebagai sumber (*sources*) berasal dari semua kategori transaksi yang ada di sisi pasiva bagan transaksi. Sebaliknya, arus finansial sebagai penggunaan (*uses*) berasal dari semua kategori transaksi di sisi aktiva.

Untuk penyusunan masing-masing instrumen finansial akan dijelaskan pada pada keterangan dibawah ini:

3.2.1.1 Metodologi Penyusunan Emas Moneter

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) sektor eksternal. Data yang digunakan mencakup posisi cadangan devisa dan total transaksi cadangan devisa. Penilaian yang digunakan adalah nilai transaksi.

Tahapan penghitungan emas moneter dimulai dengan menghitung total *flow* yang merupakan selisih posisi cadangan devisa antara dua periode data. Kemudian untuk menghitung transaksi cadangan devisa termasuk emas moneter dengan menggunakan

proporsi dari posisi cadangan devisa. Setelah itu, dilakukan konversi satuan ke IDR dengan menggunakan kurs transaksi karena angka transaksi tersebut masih dalam satuan USD.

3.2.1.2 Metodologi Penyusunan Hak Tarik Khusus

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan hak tarik khusus berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) sektor eksternal. Data yang digunakan mencakup posisi cadangan devisa dan total transaksi cadangan devisa. Penilaian yang digunakan adalah nilai transaksi.

Tahapan penghitungan hak tarik khusus dimulai dengan menghitung total *flow* yang merupakan selisih posisi cadangan devisa antara dua periode data. Kemudian untuk menghitung transaksi cadangan devisa termasuk hak tarik khusus dengan menggunakan proporsi dari posisi cadangan devisa. Setelah itu, dilakukan konversi satuan ke IDR dengan menggunakan kurs transaksi karena angka transaksi tersebut masih dalam satuan USD.

3.2.1.3 Metodologi Penyusunan Uang

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Data yang digunakan mencakup uang kartal yang diedarkan dan posisi cadangan devisa. Penilaian yang digunakan adalah nilai transaksi.

Tahapan penghitungan uang dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data uang kartal yang diedarkan. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada uang dialokasikan pada sektor Korporasi Non Finansial, Korporasi Finansial, dan Rumah Tanggadengan proporsi tertentu.

Kemudian selain menggunakan data uang kartal yang diedarkan, dilakukan pula penghitungan total *flow* yang merupakan selisih posisi cadangan devisa antara dua periode data. Kemudian untuk menghitung transaksi cadangan devisa termasuk uang dengan menggunakan proporsi dari posisi cadangan devisa. Setelah itu, dilakukan konversi satuan ke IDR dengan menggunakan kurs transaksi karena angka transaksi tersebut masih dalam satuan USD. Sehingga, hasil penghitungan uang didapat dari

kedua penghitungan tersebut baik untuk sisi asset maupun untuk sisi liabilitas.

3.2.1.4 Metodologi Penyusunan *Transferable Deposits*

Jenis *transferable deposits* yang dimaksud mencakup *interbank position* dan *other transferable deposits*. Untuk *interbank position*, sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK setiap bulannya, sedangkan untuk *other transferable deposits*, sumber data yang digunakan berasal dari publikasi OJK dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia.

Tahapan penghitungan *interbank position* dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi antar bank. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada *interbank position* juga dialokasikan hanya pada sektor Korporasi Finansial.

Tahapan penghitungan *other transferable deposits* dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi giro. Untuk giro dalam bentuk rupiah, nilai transaksi sama dengan nilai total *flow*, sedangkan untuk giro dalam bentuk valas, akan dikeluarkan terlebih dahulu nilai *flow* akibat *exchange rate*. Sehingga formula yang digunakan untuk menghitung transaksi pada giro dalam bentuk valas adalah sebagai berikut:

$$\text{Transaksi}_n = \text{Outstanding}_n - \text{Outstanding}_{n-1} - \text{Exchange Rate}_n$$

Nilai transaksi tersebut baik giro dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valas merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada *interbank position* dialokasikan pada semua sektor kecuali sektor Luar Negeri.

3.2.1.5 Metodologi Penyusunan Simpanan Lainnya

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan, Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK setiap bulannya, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya, dan Laporan Realisasi APBN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan setiap bulannya. Data yang digunakan mencakup data *other investment*, tabungan, deposito, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri. Penilaian yang digunakan adalah nilai transaksi.

Tahapan penghitungan simpanan lainnya dimulai dengan menghitung secara

triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data *other investment*, tabungan, deposito, pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri. Untuk tabungan dan deposito dalam bentuk rupiah, nilai transaksi sama dengan nilai total *flow*, sedangkan untuk tabungan dan deposito dalam bentuk valas, akan dikeluarkan terlebih dahulu nilai *flow* akibat *exchange rate*. Sehingga formula yang digunakan untuk menghitung transaksi pada tabungan dan deposito dalam bentuk valas adalah sebagai berikut:

$$\text{Transaksi}_n = \text{Outstanding}_n - \text{Outstanding}_{n-1} - \text{Price Change}_n$$

Nilai transaksi tersebut baik tabungan dan deposito dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valas merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada simpanan lainnya dialokasikan pada semua sektor kecuali sektor Luar Negeri.

3.2.1.6 Metodologi Penyusunan Surat Berharga

Jenis surat berharga yang dimaksud mencakup surat berharga jangka pendek dan surat berharga jangka panjang. Untuk surat berharga jangka pendek, sumber data yang digunakan berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan, posisi surat berharga negara yang diterbitkan DJPPR Kementerian Keuangan setiap bulannya, dan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK setiap bulannya. Sedangkan untuk surat berharga jangka panjang, sumber data yang digunakan berasal dari posisi surat berharga negara yang diterbitkan DJPPR Kementerian Keuangan setiap bulannya.

Tahapan penghitungan surat berharga jangka pendek dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi untuk masing-masing sumber data. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial dan pemerintah. Sementara itu, isian sisi asset pada surat berharga jangka pendek dialokasikan pada semua sektor dengan proporsi tertentu.

Tahapan penghitungan surat berharga jangka panjang mirip seperti tahapan penghitungan surat berharga jangka pendek, yaitu dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi untuk masing-masing sumber data. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada sektor pemerintah dan Luar Negeri. Sementara itu, isian sisi asset pada surat berharga jangka panjang dialokasikan pada semua sektor dengan proporsi tertentu.

3.2.1.7 Metodologi Penyusunan Pinjaman

Jenis pinjaman yang dimaksud mencakup pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Untuk pinjaman jangka pendek, sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dan Surat Utang Luar Negeri (SULNI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk pinjaman jangka panjang, sumber data yang digunakan berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia/*Indonesia's Balance of Payments* yang diterbitkan Bank Indonesia setiap triwulan, Surat Utang Luar Negeri (SULNI), posisi utang pemerintah pusat yang diterbitkan DJPPR Kementerian Keuangan setiap bulannya, dan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK setiap bulannya.

Tahapan penghitungan pinjaman jangka pendek dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi untuk masing-masing sumber data. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada semua sektor kecuali LNPRT dan Luar Negeri dengan proporsi tertentu. Sementara itu, isian sisi asset pada surat berharga jangka pendek dialokasikan hanya pada sektor Korporasi Finansial dan Luar Negeri.

Tahapan penghitungan pinjaman jangka panjang mirip seperti tahapan penghitungan pinjaman jangka pendek, yaitu dimulai dengan menghitung secara triwulanan terlebih dahulu nilai total *flow* yang merupakan selisih dua periode data posisi untuk masing-masing sumber data. Nilai total *flow* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada semua sektor dengan proporsi tertentu. Sementara itu, isian sisi asset pada pinjaman jangka panjang dialokasikan hanya pada sektor Korporasi Non Finansial, Korporasi Finansial dan Luar Negeri.

3.2.1.8 Metodologi Penyusunan Ekuitas

Sumber data yang digunakan berasal dari data KSEI dan IDX. Data yang dikumpulkan berupa data *issuer/penerbit* ekuitas, data *holder/pemegang* ekuitas, data *amount outstanding* pada harga pasar, dan data IHSG harian. Data *issuer/penerbit* ekuitas didapatkan dari data master file efek di KSEI yang diterbitkan setiap bulannya, dimana data master file efek tersebut mencatat harga dan jumlah ekuitas yang dikeluarkan/diterbitkan oleh seluruh perusahaan. Kemudian, data *holder/pemegang* ekuitas didapatkan dari data kepemilikan efek di KSEI yang diterbitkan setiap bulannya, dimana data kepemilikan efek tersebut mencatat harga dan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Sedangkan, data *amount outstanding* pada harga

pasar didapatkan melalui publikasi *IDX Quarterly Statistics* yang diterbitkan oleh IDX setiap triwulannya.

Jenis ekuitas yang dihitung ada 3, yaitu ekuitas terdaftar, ekuitas tidak terdaftar untuk perusahaan terdaftar, dan ekuitas tidak terdaftar untuk perusahaan tidak terdaftar. Penghitungan instrumen ekuitas menggunakan *framework from whom to whom*. Penilaian yang digunakan adalah nilai transaksi. Tahapan penghitungan ekuitas terdaftar dimulai dengan melakukan *mapping/identifikasi* jenis perusahaan baik dari sisi *issuer* maupun sisi *holder* ke dalam klasifikasi perusahaan finansial (FC) atau perusahaan non finansial (NFC). Setelah itu, dilakukan penghitungan nilai *amount outstanding* untuk setiap jenis perusahaan baik dari sisi *issuer* maupun sisi *holder*. Setelah nilai *amount outstanding* untuk setiap jenis perusahaan didapat, maka nilai tersebut akan dialokasikan untuk tiap sektor institusi di KSEI. Untuk mendapat nilai transaksi, maka perlu dipisahkan nilai *flow* akibat *price change*.

Nilai *flow* akibat *price change* dihitung dengan menggunakan selisih nilai *amount outstanding* dari dua periode data yang dikalikan dengan pergerakan IHSG triwulanan. Kemudian setelah itu, nilai transaksi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Transaksi}_n = \text{Outstanding}_n - \text{Outstanding}_{n-1} - \text{Price Change}_n$$

Setelah semua nilai transaksi untuk setiap sektor institusi di KSEI diperoleh, maka dilakukan mapping sektor institusi di KSEI ke sektor institusi di NAD.

Menurut SNA 2008 dan BPM 6, ada 6 metode yang dapat dilakukan untuk menghitung nilai ekuitas tidak terdaftar. Didalam NAD ini, metode penghitungan yang digunakan adalah metode *own funds at book value* (OFBV). Metode ini membandingkan nilai *own funds* dari korporasi tidak terdaftar dengan korporasi terdaftar. Adapun formulanya sebagai berikut:

$$\text{Nilai share tidak terdaftar} = \text{harga pasar dari share terdaftar yang sama} \times \frac{\text{own funds dari korporasi tidak terdaftar}}{\text{own funds dari korporasi terdaftar yang sama}}$$

3.2.1.9 Metodologi Penyusunan *Money Market Fund* (MMF) & *Non Money Market Fund* (NonMMF)

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Statistik Pasar Modal yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap minggu terakhir pada akhir periode triwulanan seperti akhir Maret, akhir Juni, akhir September, dan akhir Desember. Data yang digunakan mencakup Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana per Jenis, Komposisi Kepemilikan Efek Asing/Lokal yang Tercatat di KSEI, dan Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG). Penilaian yang digunakan adalah *transaction value*. Tahapan penghitungan dimulai dengan memperoleh angka triwulanan dari selisih antara dua periode data kemudian angka tahunan merupakan jumlah dari 4 triwulan.

Pada penghitungan MMF, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Jenis Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang pada masing-masing periode dijumlahkan kemudian dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan untuk sisi Liabilitas pada sektor Korporasi Finansial. Sedangkan pada sisi Asset jumlah NAB Jenis Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang pada masing-masing periode didistribusikan menurut sektor berdasarkan proporsi Komposisi Kepemilikan Efek Asing/lokal yang Tercatat di KSEI. Kemudian hasil proporsi tersebut dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan untuk sisi Asset pada sektor Rumah Tangga, Korporasi Non Finansial, Korporasi Finansial, LNPRT, dan Luar Negeri. Selanjutnya, angka tahunan baik untuk sisi Liabilitas maupun sisi Asset diperoleh dari jumlahan 4 triwulan.

Penghitungan NonMMF sedikit berbeda dengan MMF, NAB Reksa Dana yang dijumlahkan pada masing-masing periode adalah jenis selain Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang kemudian dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan. Selanjutnya angka triwulanan tersebut dikalikan dengan pergerakan IHSG triwulanan untuk mendapatkan nilai NonMMF sisi liabilitas pada sektor Korporasi Finansial yang telah berdasarkan *transaction value*. Sedangkan pada sisi Asset jumlah NAB Jenis selain Pasar Uang dan Syariah Pasar Uang pada masing-masing periode didistribusikan menurut sektor berdasarkan proporsi Komposisi Kepemilikan Efek Asing/lokal yang Tercatat di KSEI. Kemudian hasil proporsi tersebut dihitung selisih antara dua periode data sehingga diperoleh angka triwulanan. Sama halnya dengan penghitungan pada sisi liabilitas, untuk mendapatkan nilai NonMMF untuk sisi Asset pada *transaction value* maka angka triwulanan menurut sektor tersebut dikalikan dengan pergerakan IHSG triwulanan. Selanjutnya, angka tahunan baik untuk sisi Liabilitas maupun sisi Asset diperoleh dari jumlah 4 triwulan.

3.2.1.10 Metodologi Penyusunan Asuransi Jiwa & Asuransi Non Jiwa

Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi Statistik Perasuransian yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tahunan. Data yang digunakan adalah jumlah cadangan teknis menurut jenis asuransi. Cadangan teknis asuransi jiwa terdiri dari asuransi jiwa; program asuransi untuk PNS/TNI/POLRI; dan asuransi jiwa syariah. Sementara itu, cadangan teknis asuransi non jiwa terdiri dari usaha asuransi kerugian dan resuransi; program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja; serta usaha

asuransi dan reasuransi syariah.

Penghitungan asuransi jiwa maupun asuransi non jiwa dilakukan secara tahunan diperoleh dari selisih dua periode data cadangan teknis. Nilai *flow transaction* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada asuransi jiwa dialokasikan hanya pada sektor rumah tangga, sedangkan sisi asset untuk asuransi non jiwa dialokasikan pada sektor rumah tangga, Korporasi Non Finansial, dan Korporasi Finansial dengan proporsi tertentu.

3.2.1.11 Metodologi Penyusunan Dana Pensiun

Data yang digunakan bersumber dari Laporan Ikhtisar Data Keuangan Dana Pensiun dan Statistik dana Pensiun yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu nilai Aktiva/Aset Bersih. Penghitungan dana pensiun dilakukan secara tahunan yang diperoleh dari selisih dua periode data nilai aktiva/asset bersih. Nilai *flow transaction* tersebut merupakan isian untuk sisi liabilitas pada Korporasi Finansial. Sementara itu, isian sisi asset pada asuransi jiwa dialokasikan hanya pada sektor rumah tangga.

3.2.1.12 Metodologi Penyusunan *Financial Derivatives*

Data transaksi finansial derivatives sangat terbatas sehingga saat ini NAD Indonesia hanya mencatat transaksi yang terdapat dalam BoP.

3.2.1.13 Metodologi Penyusunan Hutang/Piutang Lainnya

Hutang/piutang lainnya mencakup semua transaksi yang tidak termasuk dalam kategori yang tersebut diatas.

3.2.2 Rekonsiliasi NAD

NAD Indonesia disusun berdasarkan neraca finansial yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, konsistensi data dari berbagai sumber tersebut harus dijaga melalui suatu tahap yang disebut rekonsiliasi. Bank Indonesia di samping menyediakan data untuk Otoritas Moneter dan Bank Pencipta Uang Giral, mampu pula menunjukkan alokasinya (*counterpart accounts*) pada sektor-sektor terkait. Misalnya untuk arus uang dan rekening giro sebagai sumber di Perbankan, dapat diketahui sektor apa saja pemiliknya dan berapa besarnya. Di lain pihak, transaksi yang sama juga dapat diketahui dari sektor yang bersangkutan, tetapi nilainya belum tentu sama. Pada dasarnya, rekonsiliasi NAD bertujuan untuk menciptakan kelayakan dan konsistensi isian NAD baik ditinjau dari sektor maupun dari jenis instrumen finansial yang digunakan. Apabila dilihat menurut sektor, selisih antara jumlah penggunaan finansial dan sumber finansial harus sama dengan pinjaman neto. Sedangkan dari segi kategori transaksi,

jumlah sumber harus sama dengan jumlah penggunaan.

3.2.3 Masalah dalam Proses Penyusunan

Seperti telah dijelaskan, data yang digunakan untuk penyusunan NAD diperoleh dari sumber yang sangat beragam. Umumnya, data tersebut diperoleh dalam bentuk neraca akhir tahun baik yang sudah dikonsolidasikan maupun yang masih berbentuk neraca individu perusahaan. Masalah utama yang dihadapi dalam proses penyusunan adalah pada saat mengidentifikasi pos-pos neraca ke dalam kode transaksi NAD. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kandungan dan makna dari setiap pos neraca tersebut. Begitu pula penggunaan istilah dan kekhususan dari setiap pos neraca yang dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses untuk mempelajari dan memahami setiap neraca individu ini cukup memakan waktu.

Masalah kedua adalah seringkali terjadi pos-pos dalam neraca ini kurang didukung oleh keterangan yang memadai. Bahkan, itu disajikan dalam bentuk kelompok besarnya saja (tidak rinci). Kondisi ini sangat menyulitkan proses transformasi dari pos-pos neraca ke kode transaksi NAD serta dapat menyebabkan kekeliruan pemberian kode. Masalah lainnya adalah belum dibangunnya sistem pengadaan data NAD yang baku dan konsisten pada instansi-instansi terkait, sehingga sering dibutuhkan pengolahan ulang yang bersifat khusus untuk kepentingan penyusunan NAD. Jika sistem ini dapat berjalan, maka proses penyusunan dan penyajian NAD dapat lebih dipercepat.

BAB IV

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN NAD INDONESIA TAHUN 2011-2015

4.1 GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2015

Perekonomian global pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 3,1 persen (*y-on-y*) lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 sebesar 3,4 persen (*y-on-y*). Namun, masih terdapat ketidakmerataan kinerja perekonomian antara negara maju dengan negara berkembang pada tahun 2015. Perekonomian beberapa negara maju menunjukkan adanya sinyal peningkatan pertumbuhan meski secara gradual, sedangkan di beberapa negara berkembang dan emerging market ekonominya cenderung melambat. Pertumbuhan ekonomi negara maju mencapai 1,9 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,8 persen. Fenomena ini tercermin dari kondisi perekonomian Jerman, Swedia, dan Jepang yang mengalami peningkatan, yakni masing-masing sebesar 1,7 persen, 4,1 persen, dan 0,5 persen (*y-on-y*) pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yakni masing-masing sebesar 1,6 persen, 2,3 persen dan -0,1 persen (*y-on-y*). Sedangkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2015 relatif sama dengan tahun 2014 yaitu sebesar 2,4 persen (*y-on-y*).

Sementara itu, ekonomi Indonesia melambat dengan pertumbuhan 4,79 persen (*c-to-c*). Padahal pada tahun 2014 Indonesia mampu mencapai angka 5,02 persen (*c-to-c*). Perlambatan tersebut dipicu oleh melambatnya laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terindikasi dari melambatnya pertumbuhan penjualan ritel, motor, dan mobil penumpang. Kontraksi pertumbuhan juga terjadi pada pengeluaran konsumsi LNPR yang disebabkan karena pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 tidak mampu mengimbangi ekspansi kegiatan Ormas dan Parpol dalam Pileg dan Pilpres yang terjadi pada tahun 2014. Selain itu, pertumbuhan ekspor barang juga mengalami kontraksi akibat turunnya ekspor nonmigas. Meskipun demikian, selama tahun 2015 terjadi percepatan pertumbuhan pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja barang terutama pada belanja barang untuk pemeliharaan dan operasional, sedangkan pertumbuhan pada komponen PMTB terutama didukung oleh pertumbuhan barang modal jenis bangunan/konstruksi lain, peralatan lainnya, serta CBR (*Cultivated Biological Resources*).

Dari sisi produksi, pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen akibat pertumbuhan industri komunikasi yang diselenggarakan oleh swasta yang didukung oleh peningkatan inovasi dalam bidang telekomunikasi, seperti teknologi jaringan 4G LTE. Pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,53 persen dan jasa lainnya sebesar 8,08 persen. Jika dilihat strukturnya perekonomian Indonesia tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Kondisi tersebut didukung oleh situasi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif memungkinkan sektor Rumah Tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Namun, kuatnya permintaan domestik ditengah melemahnya kinerja ekspor menyebabkan ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan. Akibatnya, secara kumulatif neraca perdagangan sepanjang tahun 2015 mencatat defisit sebesar 17,7 miliar dolar AS. Meskipun demikian, kondisi tersebut lebih baik dibandingkan defisit tahun 2014 sebesar 27,5 miliar dolar AS. Perbaikan tersebut didorong oleh kinerja neraca perdagangan barang nonmigas yang mencapai surplus sebesar 19,0 miliar dolar AS pada tahun 2015. Capaian surplus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tersebut utamanya dipengaruhi oleh kontraksi impor nonmigas yang lebih dalam daripada kontraksi ekspor.

Pada sisi lain, neraca transaksi modal dan finansial pada tahun 2015 tercatat surplus secara total sebesar 17,1 miliar dolar AS. Surplus tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 44,9 miliar dolar AS. Kondisi tersebut disebabkan oleh kinerja transaksi modal finansial yang sempat menurun signifikan sampai dengan triwulan III, walaupun akhirnya mulai membaik sejak triwulan IV 2015 seiring dengan berkurangnya ketidakpastian global dan meningkatnya optimisme ekonomi domestik. Sedangkan posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2015 mencapai 105,93 miliar dolar AS atau setara dengan 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah.

Sebaliknya, nilai tukar rupiah cenderung mengalami pelemahan selama triwulan I-III 2015 utamanya pada September 2015. Pelemahan rupiah tidak dapat dipisahkan dari pengaruh eksternal maupun internal. Pengaruh eksternal terkait normalisasi kebijakan moneter AS, krisis utang Yunani, devaluasi Yuan, serta divergensi kebijakan moneter global. Sedangkan, dari dalam negeri pelemahan rupiah dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Meskipun demikian, sejak Oktober 2015

rupiah memasuki periode stabilisasi. Secara rata-rata rupiah terdepresiasi sebesar 13,2 persen dari Rp 11.885 per dolar AS pada tahun 2014 menjadi Rp 13.458 per dolar AS pada tahun 2015. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS tersebut lebih tinggi dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS pada tahun sebelumnya. Sementara itu, secara point-to-point rupiah terdepresiasi sebesar 10,9 persen mencapai level Rp 13.795 per dolar AS (akhir Desember 2015).

Pada Desember 2015 terjadi inflasi umum sebesar 3,35 persen (tahun kalender dan *y-on-y*). Besaran inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 8,36 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi yaitu makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 6,42 persen kemudian kesehatan sebesar 5,32 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 1,53 persen.

Perkembangan suku bunga (sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi pasar uang) selama tahun 2015 menunjukkan kondisi yang menurun dibanding tahun 2014. Suku bunga deposito pada tahun 2015 (7,94 persen) lebih rendah dibandingkan tahun 2014 (8,78 persen). Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan kompetisi perbankan dalam menarik Dana Pihak Ketiga (DPK) dan masih tingginya pertumbuhan DPK hingga triwulan III 2015 serta menurunnya penyaluran kredit. Penurunan suku bunga deposito juga diikuti dengan penurunan suku bunga kredit tetapi dengan besaran yang lebih rendah dan waktu penyesuaian yang lebih lambat. Penurunan suku bunga kredit dipengaruhi oleh meningkatnya resiko kredit yang diindikasikan melalui tren peningkatan rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) pada tahun 2015. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada akhir tahun 2015 sebesar 12,8 persen sedangkan akhir tahun 2014 sebesar 12,9 persen.

Kinerja industri perbankan mengalami sedikit perlambatan selama tahun 2015. Pertumbuhan kredit perbankan tahun 2015 sebesar 10,4 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 11,6 persen. Hal tersebut merupakan dampak dari perlambatan ekonomi domestik yang menyebabkan korporasi mengurangi permintaannya terhadap kredit yang digunakan untuk modal kerja. Menurut jenis penggunaannya, pada akhir tahun 2015 pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 9,0 persen dan kredit konsumsi sebesar 9,1 persen melambat dibandingkan dengan tahun 2014 masing-masing mencapai 10,8 persen dan 11,5 persen. Sedangkan kredit investasi tumbuh sedikit lebih tinggi pada akhir tahun 2015 mencapai 14,7 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 13,2 persen. Selain itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami perlambatan menjadi 7,3 persen pada akhir tahun 2015

dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 12,3 persen.

Berdasarkan rasio keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) kinerja Bank Umum terjaga baik. Hal tersebut tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR) pada tahun 2015 yang mencapai 21,2 persen jauh di atas cadangan minimum 8 persen. Kondisi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 19,4 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) gross juga terkendali dengan capaian 2,5 persen (di bawah batas aman 5 persen). NPL tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar 2,2 persen. Peningkatan NPL tersebut disebabkan oleh penurunan kinerja korporasi pada sektor yang terkena dampak penurunan harga komoditas. Sektor yang mengalami peningkatan NPL utamanya terjadi pada sektor pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan.

Kondisi pasar saham domestik menunjukkan penurunan kinerja selama tahun 2015. Pada akhir tahun 2015 IHSG tercatat pada level 4.593,01 turun 12,13 persen dari IHSG pada akhir tahun 2014 yang tercatat pada level 5.226,95. Tren penurunan IHSG terjadi sejak triwulan II 2015 yang diawali dengan sentimen negatif kinerja emiten utama pada triwulan I 2015 yang dibawah ekspektasi. Meskipun demikian, koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah mampu menahan tren penurunan IHSG. Kebijakan pemerintah seperti Paket Kebijakan Pemerintah Jilid 2 yang dirilis pada tanggal 9 September 2015 juga menjadi salah satu penopang yang menahan tren penurunan IHSG.

Sejalan dengan pasar saham, kinerja pasar obligasi selama tahun 2015 tercatat mengalami penurunan. Hal tersebut ditunjukkan melalui peningkatan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun yang tercatat pada akhir tahun 2015 sebesar 8,8 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 7,8 persen. Penurunan kinerja tersebut disebabkan dari ketidakpastian perekonomian global, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih melambat. Selain itu, rilis pertumbuhan ekonomi domestik yang dibawah perkiraan cukup berdampak pada penurunan kinerja pasar obligasi.

4.2 PERKEMBANGAN TABUNGAN BRUTO

Tabel 4.1 Tabungan Bruto Menurut Sektor, Tahun 2011-2015 (Triliun Rupiah)					
SEKTOR	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	1.999,82	2.072,41	2.090,64	2.280,62	2.802,88
2. Korporasi Finansial	62,49	122,69	167,11	315,07	208,90
3. Pemerintah	33,46	-8,20	-30,81	-79,34	-83,06
4. Rumah Tangga	491,51	592,98	691,16	795,83	806,38
5. LNPRT	10,82	12,15	12,01	14,97	16,48
6. Luar Negeri	-14,86	229,63	299,48	325,29	237,15
JUMLAH	2.583,24	3.021,66	3.229,59	3.652,43	3.988,73

*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Perkembangan tabungan bruto menurut sektor selama tahun 2011-2015 disajikan pada tabel 4.1. Selama kurun waktu 2011-2015, tabungan bruto memperlihatkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata-rata setahun sebesar 12,12 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 16,97 persen. Tahun 2015 tabungan bruto mengalami peningkatan sebesar Rp 336,30 triliun (lihat tabel 4.1), atau meningkat 9,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara sektoral, sektor Korporasi Non Finansial mengalami peningkatan tabungan bruto yang tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya selama periode tersebut. Sedangkan sektor Korporasi Finansial mengalami penurunan tabungan bruto yang tertinggi.

Tabel 4.2 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor, Tahun 2011-2015 (Persen)					
SEKTOR	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	77,42	68,58	64,73	62,44	70,27
2. Korporasi Finansial	2,42	4,06	5,17	8,63	5,24
3. Pemerintah	1,30	-0,27	-0,95	-2,17	-2,08
4. Rumah Tangga	19,03	19,62	21,40	21,79	20,22
5. LNPRT	0,42	0,40	0,37	0,41	0,41
6. Luar Negeri	-0,58	7,60	9,27	8,91	5,95
JUMLAH	100	100	100	100	100

*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa selama periode 2011-2015 sektor Korporasi Non Finansial memiliki peranan yang paling dominan dalam pembentukan tabungan bruto secara keseluruhan. Kontribusi sektor ini dalam pembentukan tabungan

bruto rata-rata mencapai 68,69 persen. Kontribusi tertinggi dari sektor ini terhadap total tabungan bruto selama periode tersebut terjadi di tahun 2011 sebesar 77,42 persen dan kontribusi terendah terjadi di tahun 2014 sebesar 62,44 persen. Hal tersebut menunjukkan besarnya peran yang dimainkan oleh sektor ini dalam kontribusinya terhadap pembentukan tabungan bruto secara nasional. Tabungan tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan investasi baik investasi fisik maupun investasi finansial.

Sedangkan pada sektor Pemerintah, walaupun kontribusinya terhadap pembentukan tabungan bruto secara nasional tidak signifikan, namun perannya sebagai penanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat sangat menentukan terhadap jalannya roda perekonomian nasional. Pada periode 2011-2015, kontribusi tabungan bruto sektor Pemerintah secara rata-rata hanya sebesar -0,84 persen/tahun. Kontribusi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor Rumah Tangga, Luar Negeri, Korporasi Finansial, dan LNPRT yang kontribusinya masing-masing sebesar 20,41 persen/tahun, 6,23 persen/tahun, 5,10 persen/tahun, dan 0,40 persen/tahun (terhadap pembentukan tabungan bruto nasional).

SEKTOR	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	25,53	24,05	21,90	21,58	24,29
2. Korporasi Finansial	0,80	1,42	1,75	2,98	1,81
3. Pemerintah	0,43	-0,10	-0,32	-0,75	-0,72
4. Rumah Tangga	6,28	6,88	7,24	7,53	6,99
5. LNPRT	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14
6. Luar Negeri	-0,19	2,67	3,14	3,08	2,05
JUMLAH	32,98	35,07	33,83	34,57	34,56
PDB (Triliun Rp)	7.831,73	8.615,70	9.546,13	10.565,82	11.540,79

*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Tabel 4.3 memperlihatkan persentase struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor, dimana secara umum persentase struktur ini cenderung bervariasi. Selama periode 2011-2015, persentase struktur tabungan bruto terhadap PDB dari seluruh sektor berkisar antara 32,98 persen hingga 35,07 persen. Selama periode tersebut, persentase terbesar dari struktur⁶ ini masih pada sektor Korporasi Non Finansial. Persentase terkecil pada sektor Korporasi Non Finansial ini terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 21,58 persen, sedangkan persentase terbesar

⁶ Untuk mempersingkat, yang dimaksud struktur di sini adalah struktur tabungan bruto terhadap PDB

terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 25,35 persen. Pada sektor Korporasi Finansial, persentase struktur selama periode 2011-2015 berkisar antara 0,80 persen (tahun 2011) hingga 2,98 persen (tahun 2014). Sedangkan sektor Pemerintah, persentase strukturnya selama periode tersebut berada pada kisaran -0,75 persen (tahun 2014) hingga 0,43 persen (tahun 2011). Pada sektor Rumah Tangga, persentase strukturnya selama periode tersebut berada pada kisaran 6,28 persen (tahun 2011) hingga 7,53 persen (tahun 2014). Sedangkan pada sektor Luar Negeri, persentase strukturnya selama periode tersebut berada pada kisaran -0,19 persen (tahun 2011) hingga 3,14 persen (tahun 2013). Persentase struktur selama periode tersebut untuk sektor LNPRT menunjukkan angka yang relatif stabil, yaitu sekitar 0,14 persen.

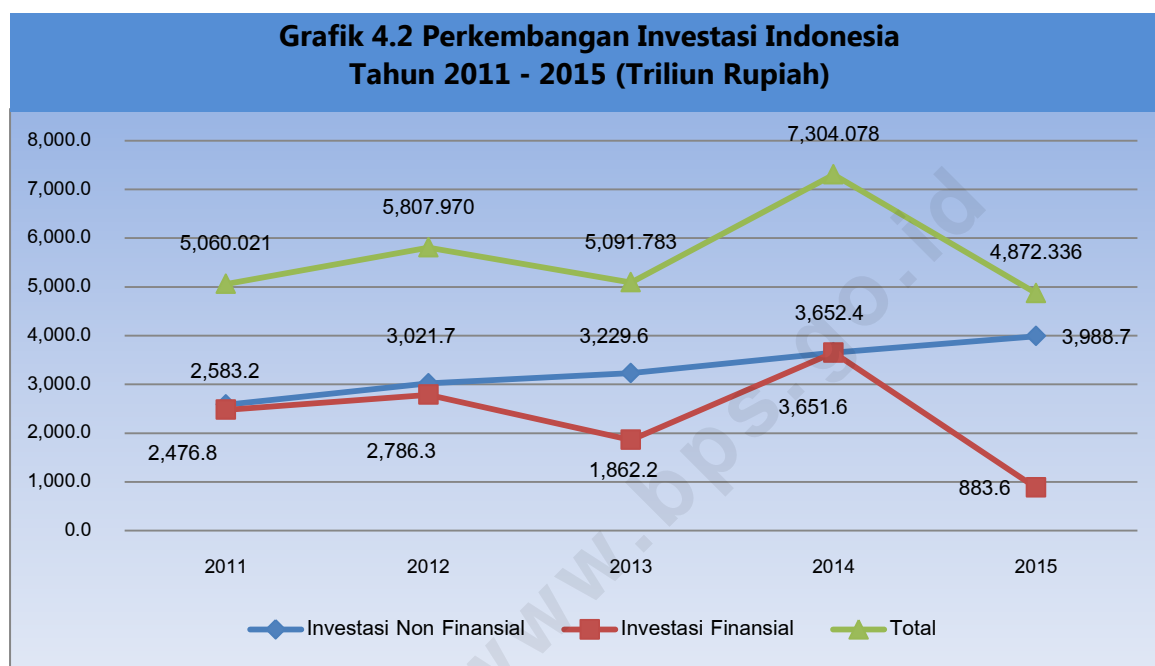
4.3 PERKEMBANGAN INVESTASI

4.3.1. Gambaran Umum Investasi Indonesia 2011-2015

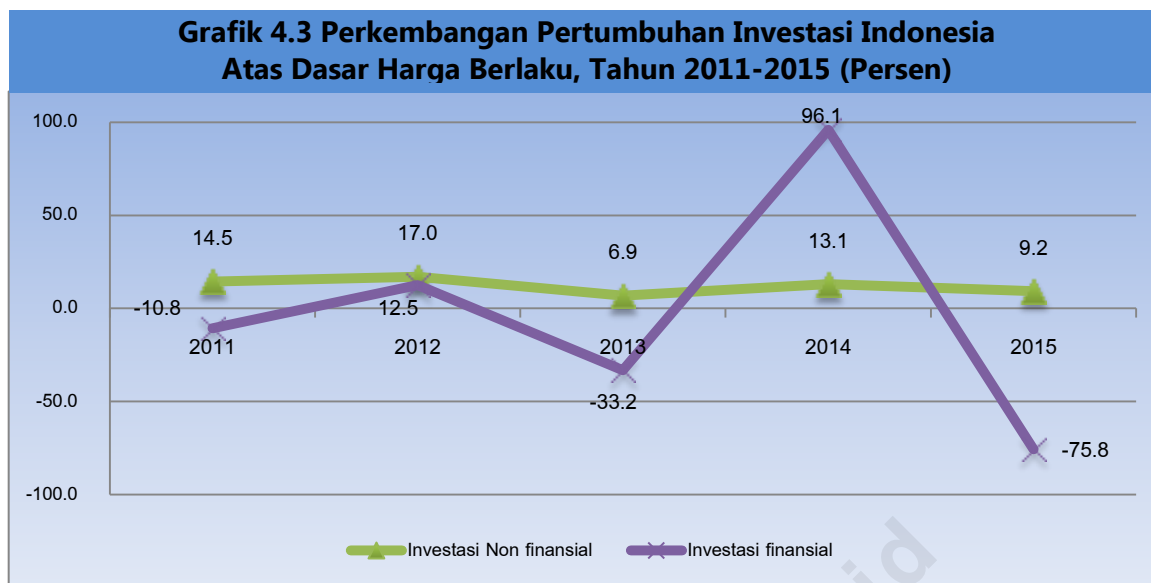
Perkembangan investasi dalam konteks ini adalah investasi non finansial dan investasi finansial. Investasi non finansial terjadi akibat adanya proses perubahan (penambahan maupun pengurangan) aset non finansial berupa barang modal dan persediaan (inventori). Sedangkan investasi finansial terjadi karena adanya transaksi finansial oleh para pelaku ekonomi di pasar keuangan melalui berbagai macam instrumen finansial, seperti saham, obligasi, SBI, pinjaman, valas, dan sebagainya.



Selama periode 2011-2015, peran investasi non finansial lebih dominan dibandingkan dengan investasi finansial. Walaupun pada tahun 2014, selisih antara investasi non finansial dengan investasi finansial sangatlah kecil. Pada tahun 2015 kontribusi investasi non finansial meningkat cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 81,86 persen. Kenaikan kontribusi investasi non finansial pada tahun 2015 disebabkan oleh terjadinya penurunan pada kontribusi investasi finansial yaitu dari 49,99 persen di tahun 2014 menjadi 18,14 persen ditahun 2015.



Berdasarkan grafik 4.2, terlihat bahwa selama periode 2011-2015 nilai total investasi Indonesia menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Hal ini disebabkan karena nilai investasi finansial yang juga berfluktuatif. Pertumbuhan total investasi mengalami kontraksi pada tahun 2013 dan 2015 dengan kontraksi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 33,29 persen. Namun sebaliknya, nilai investasi non finansial menunjukkan tren yang terus meningkat walaupun di beberapa periode pertumbuhan investasi non finansial sempat mengalami perlambatan seperti yang terjadi di tahun 2013 dan 2015 (grafik 4.3). Pada tahun 2013 pertumbuhan investasi non finansial ini hanya sebesar 6,88 persen jauh di bawah tahun sebelumnya yang sebesar 16,97 persen. Begitu pula ditahun 2015, pertumbuhannya yang sebesar 9,21 persen mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 13,09 persen.



Pada tahun 2011 investasi finansial Indonesia tertekan sehingga terjadi kontraksi 10,8 persen. Kondisi tersebut sedikit membaik di tahun berikutnya dimana investasi finansial mengalami pertumbuhan sebesar 12,5 persen. Sedangkan pada tahun 2013, investasi finansial mengalami kontraksi sebesar 33,2 persen dan kembali naik secara tajam di tahun 2014 sebesar 96,1 persen. Namun, pada tahun 2015, terjadi kontraksi yang dalam pada investasi finansial yaitu sebesar 75,8 persen.

4.3.2. Perkembangan Investasi Non Finansial Indonesia Tahun 2011 - 2015

Dalam teori ekonomi makro dijelaskan bahwa tabungan bruto dan investasi non finansial apabila dilihat secara total, akan bernilai sama. Tetapi jika dilihat secara sektoral maka antara tabungan bruto dan investasi non finansial dapat memiliki nilai yang berbeda. Pola perkembangan yang ditunjukkan oleh investasi non finansial secara nasional sama dengan pola perkembangan tabungan bruto.

Tabel 4.4 Investasi Non Finansial Menurut Sektor Tahun 2011-2015 (Triliun Rupiah)

SEKTOR	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	2.158,34	2.505,34	2.571,38	2.930,81	3.197,34
2. Korporasi Finansial	1,90	18,52	33,50	37,58	38,85
3. Pemerintah	117,86	145,10	180,86	147,35	215,43
4. Rumah Tangga	300,69	347,14	437,45	531,19	529,78
5. LNPRT	4,46	5,57	6,40	5,50	7,33
6. Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.583,24	3.021,66	3.229,59	3.652,43	3.988,73

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Definisi dari investasi non finansial (INF) disajikan secara rinci pada lampiran 2 di halaman belakang buku ini. Tabel 4.4.menyajikan perkembangan INF yang dilakukan masing-masing sektor beserta nilainya selama tahun 2011-2015. Sedangkan Tabel 4.5 menggambarkan kontribusi dari masing-masing sektor dalam menciptakan INF selama tahun 2011-2015. Secara sektoral, sektor Korporasi Non Finansial mengambil peran yang sangat dominan dalam melakukan INF. Hal ini terlihat jelas dari besarnya dana untuk investasi ini yang mencapai Rp 3.197,34 triliun pada tahun 2015. Jumlah tersebut merupakan 80,16 persen dari nilai INF yang dilakukan oleh seluruh sektor. Besarnya nilai INF yang dikeluarkan oleh sektor ini merupakan salah satu ciri khas dari sektor ini, dimana untuk menjamin kegiatan ekonominya dapat berjalan dengan baik, biasanya diperlukan investasi yang cukup besar dalam bentuk investasi non finansial (berupa barang modal dan stok). Selain sektor Korporasi Non Finansial, sektor-sektor yang juga berperan cukup dominan dalam pembentukan INF adalah Rumah Tangga dan Pemerintah. Selama tahun 2011-2015, nilai INF sektor Rumah Tangga berkisar antara Rp 300,69 triliun hingga Rp 531,19 triliun. Sedangkan nilai INF sektor Pemerintah berkisar antara Rp 117,86 triliun hingga Rp 215,43 triliun. Hal sebaliknya terjadi pada sektor Korporasi Finansial dan LNPRT dimana INF sektor ini kecil.

SEKTOR	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	83,55	82,91	79,62	80,24	80,16
2. Korporasi Finansial	0,07	0,61	1,04	1,03	0,97
3. Pemerintah	4,56	4,80	5,60	4,03	5,40
4. Rumah Tangga	11,64	11,49	13,55	14,54	13,28
5. LNPRT	0,17	0,18	0,20	0,15	0,18
6. Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	100	100	100	100	100

*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Dari tabel 4.5.diatas jelas terlihat bahwa hampir sebagian besar INF dilakukan oleh sektor Korporasi Non Finansial. Selama tahun 2011-2015, secara rata-rata sektor ini mengambil porsi sebesar 81,30 persen dari total INF seluruh sektor. Nilai INF yang dikeluarkannya pun cukup besar, dimana pada tahun 2015 mencapai Rp 3.197,34 triliun. Berdasarkan Tabel 4.5 juga, terlihat bahwa selama periode 2011-2015, kontribusi sektor Korporasi Non Finansial terhadap INF secara umum berfluktuatif. Kontribusi tertinggi dari sektor ini selama periode tersebut terjadi di tahun 2011 sebesar 83,55 persen dan kontribusi terendah terjadi di tahun 2014 sebesar 79,62 persen.

Sektor yang juga mempunyai kontribusi nyata terhadap pembentukan INF adalah sektor Rumah Tangga dan Pemerintah. Selama tahun 2011-2015 rata-rata kontribusi sektor-sektor ini sebesar 12,90 persen dan 4,88 persen. Kontribusi INF sektor Rumah Tangga cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2011 kontribusinya sebesar 11,64 persen turun menjadi 11,49 persen pada 2012 dan kembali naik hingga 13,55 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 kontribusi tersebut juga mengalami peningkatan menjadi 14,54 persen, tetapi kembali turun di tahun 2015 menjadi 13,28 persen. Sedangkan kontribusi INF sektor Pemerintah secara umum mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 kontribusinya sebesar 4,56 persen naik menjadi 4,80 persen pada tahun 2012 dan naik kembali menjadi 5,60 persen pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014 kontribusi tersebut mengalami penurunan menjadi 4,03 persen, sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 5,40 persen.

Kontribusi sektor Korporasi Finansial dan LNPRT terhadap keseluruhan investasi non finansial tidak terlalu signifikan. Bahkan selama periode 2011-2015, rata-rata kontribusi sektor tersebut tidak mencapai 1 persen.

Tabel 4.6 Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2011-2015 (persen)

SEKTOR	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Korporasi Non Finansial	27,56	29,08	26,94	27,74	27,70
2. Korporasi Finansial	0,02	0,21	0,35	0,36	0,34
3. Pemerintah	1,50	1,68	1,89	1,39	1,87
4. Rumah Tangga	3,84	4,03	4,58	5,03	4,59
5. LNPRT	0,06	0,06	0,07	0,05	0,06
6. Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	32,98	35,07	33,83	34,57	34,56
PDB (Triliun Rp)	7.831,73	8.615,70	9.546,13	10.565,82	11.540,79

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

Tabel 4.6 memperlihatkan persentase struktur investasi non finansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor. Selama periode 2011-2015, secara umum persentase struktur investasi non finansial terhadap PDB dari semua sektor berfluktuatif. Persentase terbesar dari struktur ini masih pada sektor Korporasi Non Finansial. Rata-rata kontribusi dari semua sektor tersebut masing-masing sebesar 27,80 (sektor Korporasi Non Finansial), 0,26 (sektor Korporasi Finansial), 1,67 (sektor Pemerintah), 4,41 (sektor Rumah Tangga), dan 0,06 (sektor LNPRT).

4.3.3. Perkembangan Investasi Finansial Indonesia Tahun 2015

Tabel 4.7 menggambarkan komposisi jenis-jenis investasi finansial berdasarkan instrumen finansial. Selama tahun 2015 investasi finansial mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014.

Tabel 4.7 Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial Tahun 2015 (Triliun Rupiah)		
Instrumen Finansial	Penambahan/ Pengurangan	%
(1)	(2)	(3)
F1. Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	0,00	0,00
F2. Uang dan Simpanan	507,31	57,41
F3. Surat Berharga	282,32	31,95
F4. Pinjaman	373,55	42,28
F5. Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-265,50	-30,05
F6. Asuransi, Dana Pensiun, dan Jaminan Terstandar	18,52	2,10
F7. Financial Derivatives	-17,50	-1,98
F8. Hutang/Piutang Lainnya	-15,09	-1,71
Jumlah	883,60	100,00

Investasi finansial yang tercipta pada tahun 2015 sebesar Rp 883,60 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 75,8 persen dibandingkan tahun 2014. Penurunan terjadi pada semua instrumen finansial. Selama tahun 2015, uang dan simpanan menjadi instrumen yang paling menarik untuk berinvestasi, dimana kontribusinya terhadap investasi finansial adalah paling besar yaitu 57,41 persen atau senilai Rp 507,31 triliun. Kemudian diikuti pinjaman dan surat berharga yang masing-masing sebesar Rp 373,55 triliun dan Rp 282,32 triliun.

Tabel 4.8 Komposisi Perubahan Kepemilikan Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif Menurut Sektor, Tahun 2015 (Triliun Rupiah)	
Sektor	Penambahan/ Pengurangan
(1)	(2)
1. Korporasi Non Finansial	-328,90
2. Korporasi Finansial	0,58
3. Pemerintah	24,02
4. Rumah Tangga	-202,48
5. LNPRT	-0,96
6. Luar Negeri	242,24
Jumlah	-265,50

Tabel 4.8 menggambarkan perubahan kepemilikan ekuitas dan unit penyertaan

investasi kolektif masing-masing sektor selama tahun 2015. Sektor Luar Negeri merupakan sektor yang paling dominan dalam menempatkan dananya di instrumen ini (*net buying*) yaitu sebesar Rp 242,24 triliun. Diikuti sektor Pemerintah dan Korporasi Finansial yang menempatkan dananya masing-masing sebesar Rp 24,02 triliun dan Rp 0,58 triliun. Sedangkan sektor lain yang melakukan *net selling* pada instrumen ini adalah Korporasi Non Finansial, Rumah Tangga, dan LNPRT yaitu masing-masing sebesar Rp 328,90 triliun, Rp 202,48 triliun, dan Rp 0,96 triliun.

Berkaitan dengan kepemilikan investasi, menarik untuk disimak bagaimana pola kegiatan investasi dari investor asing di pasar keuangan domestik. Tabel 4.9 memperlihatkan perubahan kepemilikan beberapa jenis investasi dari investor asing di pasar keuangan domestik.

Tabel 4.9 Investasi Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik Menurut Jenis Investasi, Tahun 2015 (Triliun Rupiah)			
Jenis Investasi	INVESTASI LN	TOTAL INVESTASI	% TERHADAP TOTAL INVESTASI
(1)	(2)	(3)	(4)
F1. Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	1,05	0,00	
F2. Uang dan Simpanan	10,61	507,31	2,09
F3. Surat Berharga	253,21	282,32	89,69
F4. Pinjaman	11,23	373,55	3,01
F5. Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	242,24	-265,50	-91,24
F6. Asuransi, Dana Pensiun, dan Jaminan Terstandar	0,00	18,52	0,00
F7. Financial Derivatives	-8,65	-17,50	49,40
F8. Hutang/Piutang Lainnya	0,19	-15,09	-1,23

Pada tabel tersebut terlihat bahwa investor asing selama tahun 2015 telah menguasai beberapa instrumen finansial, di antaranya dalam surat berharga. Bahkan dalam surat berharga, penambahan kepemilikan dari investor asing terhadap total penambahannya mencapai 89,69 persen. Selain menambah investasi dalam beberapa instrumen, investor asing selama tahun 2015 juga melepas investasinya, diantaranya *financial derivatives*. Sehingga pada instrumen *financial derivatives*, investor asing melakukan *net selling* hingga Rp 8,65 triliun.

4.4 PERKEMBANGAN CELAH TABUNGAN DAN INVESTASI (*S-I Gap*) TAHUN 2011-2015

Tabel 4.10 menggambarkan nilai celah tabungan dan investasi (*S-I Gap*) menurut sektor selama tahun 2011-2015. *S-I Gap* (*Saving Investment Gap*) dapat menggambarkan kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (*net lending*) atau memperoleh hutang dari sektor lain (*net borrowing*) dalam membiayai investasi non finansialnya. Dalam kaitan dengan sektor Korporasi Non Finansial, jika *S-I Gap* sektor ini negatif berarti sektor Korporasi Non Finansial memperoleh pinjaman dari sektor lainnya terutama sektor Rumah Tangga. Dalam hal ini sektor Rumah Tangga mengalami *net lending*, begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.10 *S-I Gap* Menurut Sektor Tahun 2011-2015 (Triliun Rupiah)

SEKTOR (1)	2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014*) (6)	2015**) (7)
1. Korporasi Non Finansial	-158,52	-432,93	-480,73	-650,20	-394,46
2. Korporasi Finansial	60,59	104,18	133,61	277,49	170,05
3. Pemerintah	-84,40	-153,30	-211,67	-226,69	-298,50
4. Rumah Tangga	190,83	245,84	253,71	264,64	276,60
5. LNPRT	6,36	6,58	5,61	9,47	9,15
6. Luar Negeri	-14,86	229,63	299,48	325,29	237,15
JUMLAH	-	-	-	-	-

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Selama tahun 2011-2015, sektor Korporasi Non Finansial senantiasa mengalami *net borrowing*. Kekurangan dana tersebut dapat disediakan, terutama oleh sektor Rumah Tangga. Jika sektor Rumah Tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut, maka akan dipenuhi dari sektor Luar Negeri. Dalam hal ini sektor Luar Negeri dan sektor Rumah Tangga mengalami *net lending*.

Berbeda dengan sektor Korporasi Non Finansial dan Pemerintah yang merupakan sektor defisit, sektor Rumah Tangga, Luar Negeri, Korporasi Finansial, dan LNPRT adalah sektor surplus. Sektor-sektor ini memiliki kemampuan untuk memberi pinjaman kepada sektor lain yang kekurangan dana. Selama tahun 2011-2015 rata-rata surplus sektor Rumah Tangga mencapai Rp 246,32 triliun pertahun, dan rata-rata surplus sektor Luar Negeri hanya sebesar Rp 215,34 triliun pertahun. Sedangkan rata-rata defisit pada sektor Korporasi Non Finansial adalah sebesar Rp 423,37 triliun pertahun. Sehingga selama periode tersebut masih diperlukan tambahan dana terutama dari sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri untuk menutupi kekurangan dana pada sektor Korporasi Non Finansial.

4.5 PERCEPATAN UANG BEREDAR (*VELOCITY OF MONEY*) DAN PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN (*FINANCIAL DEEPENING*)

4.6.1. Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*)

Velocity of Money (V) merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk melihat kecepatan perputaran uang beredar. Peredaran uang disebabkan adanya transaksi-transaksi ekonomi yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu perekonomian. Jika V rendah artinya perputaran uang yang beredar lambat atau dengan kata lain masyarakat memegang uang lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan untuk transaksi. Sebaliknya, jika V tinggi berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepat atau masyarakat tidak berlama-lama untuk menggunakan uang dalam melakukan transaksi.

Sebagai contoh sederhana, pada suatu periode, A menjual barang dagangannya ke B sebesar Rp50 ribu, maka V yang terjadi adalah 1. Selanjutnya jika A menggunakan uang Rp50 ribu tersebut untuk membayar jasa perbaikan barang misalnya, maka terjadi perpindahan uang (V) satu kali lagi. Walaupun secara nominal uangnya masih yang sama yaitu Rp50 ribu namun secara agregat jumlah uang yang beredar adalah Rp100 ribu, sehingga perpindahan uang yang terjadi ada sebanyak 2 kali atau:

$$V = \frac{100}{50} = 2$$

Velocity of money dapat juga dipakai sebagai ukuran dalam menentukan inflasi. Disamping itu fluktuasi yang terjadi dalam *velocity of money* biasanya selalu diikuti dengan fluktuasi pada suku bunga (*interest rate*).

Secara umum *Velocity of Money* diukur dengan rumus:

$$V = \frac{PDB}{M_1}$$

Di mana : V = *Velocity of Money*
 PDB = Produk Domestik Bruto
 M_1 = Uang beredar sempit

4.6.2. Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*)

Pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengembangkan pasar keuangan suatu negara. Memperdalam pasar keuangan juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk menarik

ekses likuiditas di perekonomian dan memperkecil risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang berasal dari gejolak nilai tukar maupun fluktuasi di pasar saham atau obligasi.

Pasar keuangan yang dalam mempunyai beberapa efek positif, yaitu:

- (i) Dari sisi dunia usaha, pasar keuangan yang dalam diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi dengan tersedianya berbagai alternatif pembiayaan.
- (ii) Dari sisi investor, pasar keuangan yang dalam memberikan beragam pilihan instrumen investasi sehingga mereka dapat mengoptimalkan imbal hasil dari investasinya.
- (iii) Dapat mendorong lebih banyak investor untuk menanamkan dananya di pasar keuangan sehingga dapat berdampak positif terhadap pembiayaan ekonomi.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan pasar keuangan yang dalam adalah dengan memperkaya instrumen investasi, seperti instrumen berjangka panjang maupun instrumen *structured product* dan *derivative product* yang dapat digunakan sebagai instrumen *hedging* atau sebagai asuransi transaksi keuangan. Hal ini perlu diupayakan karena keterbatasan instrumen investasi akan mengakibatkan investor menjadi kurang aktif dalam melakukan transaksi sehingga pasar keuangan menjadi tidak likuid. Indikator yang lazim digunakan untuk melihat kedalaman sektor keuangan adalah rasio kewajiban likuid dari sistem keuangan terhadap Produk Domestik Bruto, dalam hal ini M2/PDB (King dan Levine, 1993).

4.6.3. Uraian Ringkas *Velocity of Money* dan *Financial Deepening* Indonesia Tahun 2011-2015

Pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas tentang perkembangan *velocity of money* (V) dan *financial deepening* (FD) selama periode 2011-2015. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu secara ringkas mengenai agregat moneter lainnya, yaitu perkembangan uang beredar.

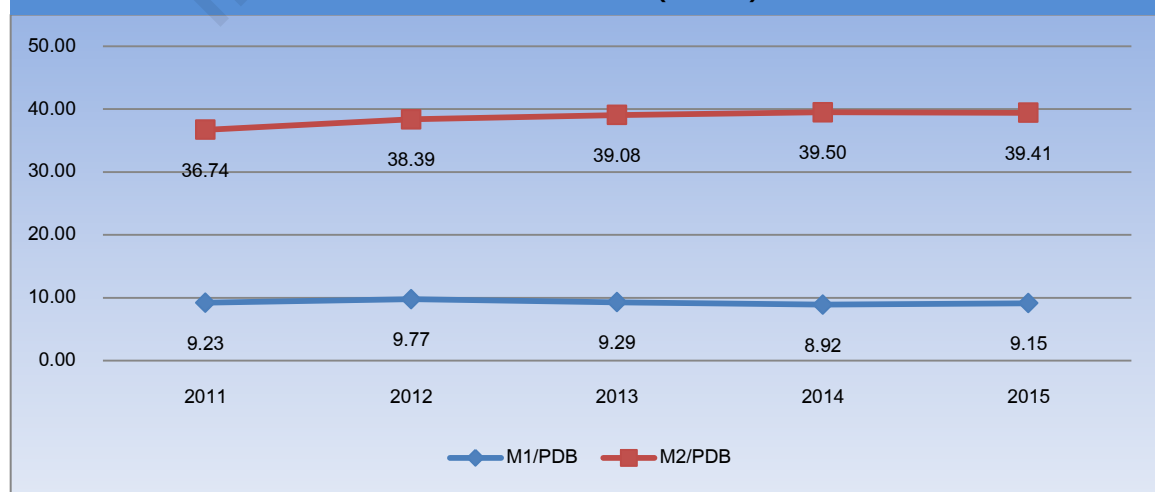
**Tabel 4.11 Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto
Tahun 2011-2015**

Tahun	Uang Beredar (Triliun Rp) ¹				PDB ² (Triliun Rp)	Velocity PDB/M1	Rasio (%)	
	M1	Uang Tunai	Surat Berharga Selain Saham	M2			M1/PDB	M2/PDB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2011	722,99	2.139,84	14,39	2.877,22	7.831,73	10,83	9,23	36,74
2012	841,65	2.455,44	10,42	3.307,51	8.615,70	10,24	9,77	38,39
2013	887,08	2.820,52	22,81	3.730,41	9.546,13	10,76	9,29	39,08
2014	942,22	3.209,48	21,63	4.173,33	10.565,82	11,21	8,92	39,50
2015	1.055,44	3.479,96	13,40	4.548,80	11.540,79	10,93	9,15	39,41

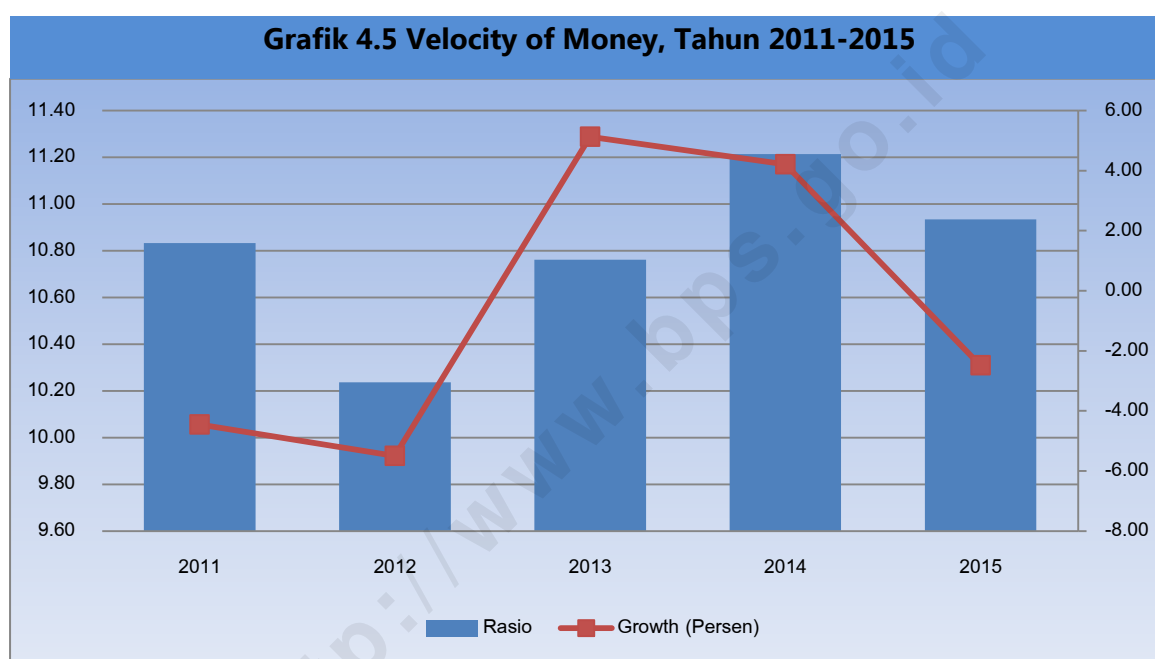
Sumber: ¹) Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, Bank Indonesia
²) Pendapatan Nasional Indonesia

Perkembangan uang beredar sempit (M1) dan uang beredar luas (M2) serta kaitannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2011-2015 ditunjukkan pada Tabel 4.17. Posisi M2 pada suatu periode sangat dipengaruhi oleh posisi uang kuasi. Selama periode 2011-2015 kontribusi uang kuasi terhadap pembentukan M2 rata-rata sebesar 75,53 persen. Kontribusi lainnya ditentukan oleh M1 yang rata-rata kontribusinya terhadap M2 sebesar 24,03 persen, dan sisanya sebesar 0,45 persen berasal dari surat berharga selain saham. Pertumbuhan uang kuasi meningkat lebih pesat dibandingkan pertumbuhan M1. Selama periode 2011-2015, uang kuasi tumbuh rata-rata sebesar 13,42 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan M1 yang rata-rata tumbuh sebesar 11,89 persen. Hal ini mencerminkan bahwa uang kuasi lebih diminati untuk dimiliki oleh masyarakat dibandingkan uang kuasi.

**Grafik 4.4 Rasio M1 dan M2 terhadap PDB,
Tahun 2011 - 2015 (Persen)**



Gambaran lain yang menunjukkan keadaan perekonomian nasional dalam kaitannya dengan uang beredar adalah pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*). Kondisi pendalaman pasar uang Indonesia selama periode 2011–2015 dapat dilihat dari Grafik 4.8. Untuk kasus Indonesia, upaya pendalaman sektor keuangan sedang dilakukan karena sektor keuangan Indonesia masih dianggap dangkal (*shallow*) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia. Masih dangkalnya sektor keuangan Indonesia tercermin dari perkembangan rasio M2/PDB. Pada akhir tahun 2011 rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah selama periode 2011–2015 yaitu sebesar 36,74 persen. Namun, seiring dengan berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah, rasio tersebut sedikit demi sedikit mengalami peningkatan.



Disamping *financial deepening*, masalah percepatan perputaran uang beredar (*velocity of money*) juga merupakan hal penting yang patut diperhatikan untuk melihat gambaran tentang stabilitas keuangan moneter. Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2011-2015 menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya rasio antara PDB dengan M1 selama periode tersebut yang hanya berada di kisaran angka 10 sampai 11 persen. Perlambatan perputaran uang beredar yang terjadi selama tahun 2011-2015 disebabkan pertumbuhan yang terjadi pada kedua variabel tersebut sangat berfluktuasi serta tidak sejalan antara satu dengan lainnya.

Lampiran 1
Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD)
Indonesia

<http://www.bps.go.id>

DEFINISI SEKTOR NERACA ARUS DANA (NAD) INDONESIA

1. Sektor Korporasi Non-Finansial

Korporasi non-finansial adalah korporasi yang aktivitas utamanya memproduksi barang atau jasa non-finansial. Seluruh korporasi non-finansial residen termasuk dalam sektor korporasi non-finansial, dan di dalam praktek mencakup sebagian besar korporasi. Selain itu, mencakup lembaga non-profit (LNP) yang terlibat produksi pasar non-finansial seperti rumah sakit, sekolah, atau perguruan tinggi yang memungkinkan mereka menutup biaya produksi, atau asosiasi bisnis yang dibiayai korporasi non-finansial, atau *un-incorporated enterprises* yang berperan mempromosikan dan melayani kepentingan enterprise. Cakupan dari korporasi Non-finansial diantaranya:

1.1 Badan Usaha Milik Negara (State Enterprises)

Mencakup badan usaha milik pemerintah pusat yang bentuk badan hukumnya ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Dasar Pementukan BUMN. Sedangkan tatacara pembinaan dan pengawasan BUMN diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Berdasarkan UU No. 9 tahun 1969, bentuk badan hukum perusahaan milik negara dibedakan menjadi: Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PESERO), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk).

Pertamina dan BULOG termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Negara BUMN. Badan hukum Pertamina dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971, sedangkan BULOG dibentuk berdasarkan Keppres RI No. 11 Tahun 1969. Selain itu, masih ada BUMN yang disebut, PN atau PT (murni) yang berdiri sebelum lahirnya UU No. 9 tersebut, dan bentuk badan hukumnya diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

BUMN yang dicakup di sini hanya yang bergerak di bidang non finansial, dan jenis usahanya lebih berorientasi pada usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, seperti: usaha pengangkutan, pos dan telekomunikasi, listrik dan sebagainya. BUMN-BUMN yang bergerak di bidang finansial seperti perbankan, sudah dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Bank.

1.2 Badan Usaha Milik Daerah (Local Government Enterprises)

Sektor ini mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang

pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1962. Jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan objek wisata/taman hiburan dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.

1.3 Bisnis (Business Enterprises)

Sektor ini mencakup Koperasi dan Korporasi Non Finansial.

1.3.1 Koperasi (Cooperative)

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 jo.UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melakukan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam sektor ini, koperasi dibagi menjadi dua, yaitu Koperasi Perkotaan (non-KUD) dan Koperasi Pedesaan (KUD). Pembagian ini umumnya didasarkan pada wilayah kerjanya.

Koperasi yang berbentuk bank (seperti BUKOPIN) dan asuransi (Koperasi Asuransi Indonesia) berturut-turut masuk ke sektor bank umum dan asuransi. Untuk meningkatkan efisiensi, maka koperasi primer dapat membentuk berbagai jenis koperasi sekunder. Jenis koperasi sekunder dapat berupa pusat (daerah tingkat II), gabungan (propinsi), dan induk (nasional).

1.3.1.1 Koperasi Perkotaan (Non rural Cooperative)

Koperasi non-KUD umumnya adalah koperasi yang menghimpun anggota dan warga masyarakat nonpedesaan berdasarkan fungsi atau peran tertentu serta pembagian kerja atau profesi dalam masyarakat. Koperasi tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- (i) Koperasi fungsional seperti pegawai negeri, ABRI, karyawan, dan lainnya.
- (ii) Golongan menurut bidang usaha seperti jasa, produksi, industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (iii) koperasi serba usaha dan simpan-pinjam.

1.3.1.2 Koperasi Pedesaan (Rural Cooperative)

Koperasi Pedesaan (KUD) adalah jenis koperasi yang berkedudukan di desa dan yang menghimpun warga desa untuk menjalankan berbagai fungsi usaha, terutama di sektor pertanian, seperti koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi perikanan/nelayan, koperasi peternak, koperasi pengrajin dan simpan-pinjam.

1.3.2 Korporasi Non finansial (*Private Nonfinancial Enterprises*)

Mencakup semua perusahaan nonfinansial yang berbadan hukum milik masyarakat. Kegiatan utamanya adalah memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mencari untung. Usaha ini bisa dimiliki oleh perorangan, kelompok, gabungan perusahaan, usaha keluarga, dan sebagainya dengan maksud untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bentuk badan hukumnya bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), CV dan NV. Dalam kelompok ini tidak termasuk usaha rumah tangga, karena usaha rumah tangga dimasukan sebagai bagian dari sektor rumah tangga.

2. Sektor Korporasi Finansial

Sektor Korporasi Finansial mencakup seluruh korporasi residen yang aktivitas utamanya menyediakan jasa keuangan, termasuk jasa perantara keuangan, asuransi, dan dana pensiun, serta unit yang memfasilitasi perantara keuangan. Selain itu, sektor (termasuk LNP) lain yang terlibat dalam produksi pasar keuangan, seperti yang dibiayai oleh pelanggan enterprise finansial yang berperan mempromosi dan melayani kepentingan enterprise.

2.1 Bank Sentral (*Central Bank*)

Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi sbb: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa, (3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan, dan (4) sebagai pemegang kas pemerintah.

Di Indonesia fungsi-fungsi Bank Sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain memiliki sejumlah fungsi, BI juga memiliki sejumlah kewajiban antara lain kewajiban atas uang kartal (uang logam dan uang kertas) yang berada di luar BI dan Kas Negara, serta simpanan giro BPUG dan sektor swasta pada BI. Kewajiban-kewajiban tersebut seringkali disebut sebagai uang primer.

Oleh karena kewenangan Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI), maka dalam Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia, neraca Bank Sentral hanya terdiri dari neraca BI.

2.2 Perbankan (*Banks*)

Sektor ini mencakup Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional, dan BPR Syariah, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

2.2.1 Bank Umum Konvensional (*Deposit Money Banks*)

Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. Bank Umum Konvensional terdiri dari Bank Pesero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) devisa, BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing. Secara umum, kegiatan utama bank-bank tersebut (kecuali bank non devisa) adalah menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan. Selain itu bank-bank tersebut juga memberikan atau menyalurkan kredit baik untuk modal kerja maupun untuk investasi, dan melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

2.2.2 Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Banks*)

Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit untuk skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang kecil terutama yang berada di wilayah pedesaan. Sehingga wilayah kerja BPR umumnya lebih bersifat lokal tingkat desa. Dilihat dari jenisnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari BPR-BKD dan BPR-Non BKD.

2.2.3 Perbankan Syariah (*Sharia Banks*)

Dimasukkannya konsep perbankan syariah ini sesuai dengan amanat dan semangat UU No.7 tahun 1992 yang telah meletakkan dasar bagi terwujudnya perbankan sistem ganda yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (syariah) dan bank yang beroperasi secara konvensional. Kemudian di dalam UU perbankan yang baru yaitu UU. No.10 tahun 1998 kembali menindaklanjuti dan secara transparan telah menyebutkan tentang latar belakang diperkenalkannya sistem perbankan syariah dalam struktur perbankan di Indonesia. Menurut UU tersebut kegiatan perbankan syariah terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dan mengembangkan pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.

UU No. 10 tahun 1998 tersebut juga menjelaskan tiga cara dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu (a) pendirian bank baru, (b) konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, dan (c) pembukaan kantor cabang syariah (full branch) pada bank umum konvensional.

2.3 Lembaga Keuangan Lainnya (*Other Financial Institutions*)

Sektor ini mencakup semua lembaga keuangan selain bank yang terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Perusahaan Penunjang Asuransi, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Pegadaian, dan Pasar Modal.

2.3.1 Perusahaan Pembiayaan (*Finance Companies*)

Perusahaan Pembiayaan adalah jenis perusahaan finansial yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Cakupan kegiatan Perusahaan Pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing), Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring), Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) dan Kartu Kredit (Credit Card). Perusahaan Pembiayaan secara umum dimaksudkan untuk memberikan penyaluran dana kepada para nasabah dalam bentuk pembiayaan, dan tidak dibenarkan menarik dana secara langsung dari pihak ketiga (non depositories institution) sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sebagian besar sumber dana Perusahaan Pembiayaan berasal dari kredit perbankan baik bank dalam negeri maupun bank asing.

2.3.1.1 Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan jenis sewa guna usaha ini adalah memberikan pembiayaan (lessor) kepada para penyewa guna usaha (lease) untuk penyediaan barang-barang modal baik secara "finance lease" maupun "operating lease" dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

2.3.1.2 Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang bisa dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha. Kegiatan usaha Anjak Piutang adalah membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* maupun *promissory notes* atas dasar tingkat diskonto tertentu dari si penjual baik *with recourse* maupun *without recourse*. Anjak Piutang jenis *with recourse* berarti tanggung jawab penagihan piutang selanjutnya akan beralih kepada pihak yang melakukan anjak piutang.

2.3.1.3 Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

Pembiayaan Konsumen adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah terutama untuk pengadaan barang-barang konsumsi dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

2.3.1.4 Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card)

Pembiayaan Kartu Kredit adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah untuk kepentingan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit. Biasanya pihak bank disebut sebagai issuer, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau pemegang kartu kreditnya disebut sebagai card holder. Pemegang kartu kredit dapat menggunakan untuk berbelanja di tempat-tempat yang sudah terdaftar sebagai penerima kartu kredit (merchant).

2.3.2 Modal Ventura (Venture Capital)

Modal Ventura adalah kegiatan usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam jangka waktu tertentu umumnya selama sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang kembali. Selain memberikan bantuan modal kepada PPU, perusahaan modal ventura juga seringkali memberikan bimbingan manajemen kepada PPU. Bentuk usaha modal ventura ini umumnya dikembangkan oleh pihak swasta besar dalam rangka mewujudkan kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahaan kecil.

2.3.3 Usaha Perasuransian (Insurance Business)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 pasal 3, Usaha Perasuransian dibedakan menjadi dua yaitu (a) Usaha Asuransi, dan (b) Usaha Penunjang Usaha Asuransi.

2.3.3.1 Usaha Asuransi (Insurance Business)

Usaha Asuransi terdiri dari Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa dan Reasuransi.

2.3.3.1.1 Usaha Asuransi Kerugian (Loss Insurance Business)

Usaha Asuransi Kerugian adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2.3.3.1.2 Usaha Asuransi Jiwa (Life Insurance Business)

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

2.3.3.1.3 Usaha Reasuransi (Reinsurance Business)

Usaha Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertanggung jawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

2.3.3.2 Usaha Jasa Penunjang Usaha Asuransi (Insurance Supporting Business)

Usaha Jasa Penunjang Asuransi terdiri dari (i) Usaha Pialang Asuransi, (ii) Usaha Pialang Reasuransi, (iii) Usaha Penilai Kerugian Asuransi, (iv) Usaha Konsultan Aktuaria, dan (v) Usaha Agen Asuransi.

2.3.3.2.1 Usaha Pialang Asuransi (Insurance Brokerage Business)

Usaha Pialang Asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2.3.3.2.2 Usaha Pialang Reasuransi (Reinsurance Brokerage Business)

Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi.

2.3.3.3 Program Asuransi Sosial (Social Insurance Program)

Sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 1992 tidak dikenal lagi perusahaan Asuransi Sosial seperti sebelumnya. Undang-undang itu mengatur program asuransi sosial yaitu sebagai suatu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa program asuransi sosial yang ada diantaranya adalah :

- Program asuransi sosial bidang asuransi kerugian, yaitu asuransi wajib kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh BUMN PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- Program asuransi sosial bidang asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASKES
- Program asuransi sosial yang mengelola Tabungan Hari Tua (THT) dan asuransi kesehatan bagi anggota ABRI dan para karyawan sipil ABRI diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASABRI.

- Program asuransi sosial yang mengelola THT dan asuransi kematian bagi pegawai negeri sipil, diselenggarakan oleh PT (pesero) TASPEN.
- Program asuransi sosial yang mengelola THT, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, diselenggarakan oleh PT (Pesero). Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK).

Mulai tahun 2013 perusahaan asuransi kerugian melebur menjadi satu menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan masuk ke dalam sektor pemerintah.

2.3.4 Pegadaian (Pawnshops)

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang tugasnya membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan nilai barang jaminan yang diserahkan oleh pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

2.3.5 Dana Pensiun (Pension Fund)

Sesuai dengan UU No.11 tahun 1992 tentang perusahaan Dana Pensiun, perusahaan ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial karyawan perusahaan, melalui pemberian santunan hari tua/uang pensiun. Umumnya dana yang terkumpul dari iuran peserta dan pemberi kerja selain digunakan untuk membayar tunjangan hari tua/pensiun karyawan, juga diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, saham, maupun disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito.

Terdapat tiga pilihan bentuk program pensiun yaitu (i) Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK), (ii) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan (iii) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Sedangkan berdasarkan bentuk badan hukumnya, Dana Pensiun dibedakan menjadi dua yaitu (i) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan (ii) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

2.3.5.1. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK)

Pada program pensiun jenis ini, karyawan biasanya tidak perlu ikut membayar iuran, sedangkan perusahaan sebagai pemberi kerja membayar iuran dalam batas persentase tertentu dari keuntungannya dalam tahun tertentu. Dalam hal risiko, kegagalan pengolahan berada pada pihak peserta.

2.3.5.2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pada program pensiun jenis ini, kewajiban membayar iuran ditanggung oleh pihak

pemberi kerja dan peserta yang telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam keadaan bagaimanapun pihak perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus tetap membayar iuran kepada pihak dana pensiun sesuai yang telah disepakati. Dalam hal risiko kegagalan pengolahan risiko berada pada pihak peserta.

2.3.5.3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pada jenis program ini manfaat pasti telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program ini besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja berubah-ubah sesuai dengan hasil perhitungan aktuarial dan hasil pengelolaan dananya. Sedangkan bagi peserta, besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh peserta besarnya tetap. Dalam hal risiko kegagalan pengelolaan berada pada pihak pemberi kerja. Sebaliknya jika pengelolaan dana pensiun berhasil maka akan mengurangi beban iuran pihak pemberi kerjanya.

2.4 Pasar Modal (Capital Market)

Pasar Modal adalah sarana yang dapat mempertemukan kepentingan pihak investor dengan pihak emiten. Dalam hal ini, pasar modal menjadi sarana alternatif bagi pihak perusahaan yang menginginkan sumber dana di luar kredit perbankan. Pihak perusahaan yang melakukan penawaran saham (emiten) dapat memperoleh sumber dana melalui penawaran perdana di pasar primer atau Initial Public Offering (IPO). Selain terjadi transaksi jual beli saham, di pasar modal juga dilakukan transaksi jual beli obligasi. Sarana untuk melangsungkan transaksi pasar modal di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti halnya pada kegiatan peransuransian, pada kegiatan di pasar modal juga memunculkan kegiatan usaha derivatif seperti Broker Pasar Modal, Underwriter, Adjuster dan Penjamin Emisi.

3. Pemerintah (Government)

Pengertian sektor Pemerintah adalah sektor yang semata-mata melakukan kegiatan administrasi pemerintah dan melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharap balas jasa. Termasuk dalam kegiatan pemerintah juga meliputi kegiatan lembaga-lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah, tetapi tidak termasuk badan usaha milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Dalam penyusunan NAD Indonesia, kedua sektor tersebut (BUMN dan BUMD) dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Perusahaan Pemerintah. Sektor Pemerintah sendiri dibedakan

menjadi dua yaitu (i) Pemerintah Pusat dan (ii) Pemerintah Daerah.

3.1. Pemerintah Pusat (Central Government)

Mencakup semua unit pemerintah baik yang berada di pusat seperti: Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah lain, serta semua unit vertikalnya yang berada di daerah. Lembaga ini umumnya melakukan jasa pelayanan umum, seperti administrasi, pertahanan dan keamanan, membuat peraturan-peraturan pemerintah, merencanakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat, menyelenggarakan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi dan jasa pelayanan sosial lainnya secara cuma-cuma (di bawah tingkat harga normalnya).

3.2 Pemerintah Daerah (Local Government)

Mencakup semua unit kegiatan pemerintah yang berada di tingkat propinsi, kabupaten dan desa, kecuali unit vertikal pemerintah pusat di daerah. Lembaga ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonom).

4. Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga

LNPRT terdiri dari seluruh LNP residen (kecuali yang dikendalikan oleh pemerintah) yang menyediakan barang atau jasa non-pasar untuk rumah tangga atau masyarakat luas.

5. Rumah Tangga (Households)

Mencakup kegiatan rumah tangga biasa, badan-badan nirlaba dan usaha rumah tangga. Rumah Tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu bangunan dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-harinya secara bersama. Badan yang tidak mencari laba mencakup badan-badan swasta yang menghasilkan jasa pelayanan rumah sakit, sekolah, yayasan, tempat peribadatan dan sebagainya. Usaha rumah tangga adalah kegiatan ekonomi tidak berbentuk badan hukum yang dilakukan oleh rumah tangga, dan risiko usahanya ditanggung seorang atau lebih anggota rumah tangga dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, misalnya, usaha pertanian, industri/kerajinan dan sebagainya.

6. Luar Negeri (Rest of the World)

Mencakup kegiatan antara penduduk Indonesia (residen) baik individu maupun institusi dan bukan penduduk (non residen/luar negeri). Transaksi yang terjadi antara residen dengan non residen ini dicatat di dalam Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*).

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 2
Definisi Kategori Transaksi
Neraca Arus Dana (NAD)
Indonesia

<http://www.bps.go.id>

DEFINISI KATEGORI TRANSAKSI NERACA ARUS DANA INDONESIA

B8g Tabungan Bruto

Tabungan Bruto merupakan jumlah dari penyusutan barang modal tetap dan tabungan neto.

P51c Penyusutan Barang Modal

Penyusutan Barang Modal (PBM) merupakan biaya penyusutan barang modal tetap (pabrik, mesin dan peralatan) karena aus/rusak dalam proses produksi yang dibebankan pada biaya operasi perusahaan. Biaya penyusutan sesungguhnya bukan merupakan pengeluaran dana. Selain itu, penyusutan barang modal juga meliputi perkiraan penyusutan rumah yang dimiliki perorangan dan barang modal tetap milik perusahaan.

B8n Tabungan Neto

Tabungan Neto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan ekonomi suatu sektor setelah dikurangi penyusutan barang modal. Penerimaan disini meliputi: pendapatan dari penjualan barang dan jasa, balas jasa faktor tenaga kerja seperti upah dan gaji, serta pendapatan kepemilikan seperti bunga dan sewa. Penerimaan juga mencakup pendapatan dari transfer (bukan transfer modal), seperti subsidi dari pemerintah yang diterima oleh sektor usaha, bantuan luar negeri yang diterima pemerintah, pensiun yang diterima oleh sektor rumah tangga, dan pajak yang diterima oleh pemerintah. Sedangkan pengeluaran mencakup baik pengeluaran barang dan jasa yang dibayarkan kepada sektor lain, maupun pembayaran transfer (seperti pembayaran pajak) dan dividen. Pengeluaran untuk barang modal tetap dan persediaan dikategorikan sebagai pengeluaran modal.

P5g Investasi Non finansial

Merupakan penjumlahan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori.

P51g Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Yang dimaksud dengan PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal,

bangunan lain seperti jalan, dan bandara, serta mesin dan peralatan.

P52AN12 Perubahan Inventori

Perubahan Inventori adalah perubahan nilai persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Persediaan meliputi bahan baku, pekerjaan yang masih dalam proses dan barang jadi yang belum terjual. Termasuk juga persediaan di bidang pertanian seperti ternak dan hasil pertanian. Perubahan persediaan emas yang dikuasai oleh Bank Sentral merupakan bagian dari kategori transaksi Cadangan Valuta Asing Pemerintah (0800).

B9(P) Net Lending/Borrowing = B8g – P5g

Pinjaman Neto merupakan selisih antara Tabungan Bruto dengan Perolehan Harta Non Finansial. Istilah ini disebut juga Celah Tabungan dan Investasi atau Saving Investment Gap (S-I Gap).

Selisih Statistik = B9(P) – B9(F)

Selisih Statistik adalah selisih antara Pinjaman Neto (sisi transaksi riil, bagian atas NAD) dan Investasi Finansial Neto (sisi finansial NAD). Penyebab utama adanya Selisih Statistik di beberapa sektor adalah adanya perbedaan sumber data antara bagian atas NAD dan sisi finansialnya.

Jika dalam persamaan akuntansi total aset sama dengan kewajiban plus kekayaan neto, maka Pinjaman Neto harus sama dengan Investasi Finansial Neto. Tetapi karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang berbeda cakupannya, maka terjadi ketidakkonsistenan yang menimbulkan selisih tersebut.

B9(F) Net Lending/Borrowing = 0600 - 0700

Investasi Finansial Neto merupakan selisih antara jumlah penggunaan finansial (kenaikan harta finansial neto) dengan jumlah sumber finansial (kenaikan kewajiban finansial neto).

Jumlah Penggunaan Finansial

Jumlah Penggunaan Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi aktiva. Kenaikan dari penggunaan finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

Jumlah Sumber Finansial

Jumlah Sumber Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi pasiva. Kenaikkan sumber finansial berarti positif dan

penurunannya berarti negatif.

F1 Emas Moneter dan SDRs

Emas moneter dan *Special Drawing Rights* (SDR) yang diterbitkan *Internasional Monetary Fund* (IMF) merupakan aset yang umumnya dimiliki hanya oleh otoritas moneter.

F11 Emas moneter

Emas moneter merupakan emas dengan mana otoritas moneter (atau pihak lain yang tunduk pada kontrol efektif dari otoritas moneter) mempunyai hak dan dipegang sebagai aset cadangan. Emas moneter terdiri dari emas batangan (termasuk emas yang dipegang dalam neraca alokasi emas) dan neraca emas tidak dialokasi pada non-residen yang memberi hak untuk mengklaim pengiriman emas.

F12 SDRs

Special Drawing Rights (SDRs) merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF dan dialokasi pada anggotanya untuk melengkapi cadangan aset yang ada. *Department of Special Drawing Rights IMF* mengelola cadangan aset dengan mengalokasi SDRs di antara negara anggota IMF dan badan internasional (secara kolektif dikenal sebagai peserta).

F2 Uang Tunai dan Simpanan

Transaksi finansial dalam uang tunai dan simpanan terdiri atas penambahan atau pelepasan uang tunai, serta peningkatan atau penambahan simpanan atau penarikannya.

F21 Uang tunai

Uang tunai terdiri dari uang kertas dan koin dengan nilai nominal yang tetap dan diterbitkan atau di bawah otoritas bank sentral atau pemerintah (koin *commemorative* yang tidak beredar harus dikeluarkan, sebagaimana yang belum diterbitkan, atau uang tunai *demonetized*). Suatu perbedaan harus tergambar antara mata uang domestik (yaitu mata uang yang menjadi kewajiban unit residen, seperti bank sentral, bank lain, dan pemerintah pusat) dan mata uang asing yang merupakan kewajiban unit non-residen (seperti bank sentral, bank lain, dan pemerintah dari negara lain).

F22 Simpanan transferable

Simpanan *transferable* (simpanan yang dapat ditransfer) terdiri dari seluruh simpanan yang:

- a. dapat ditukarkan dengan uang kertas dan uang logam atas permintaan pada nilai nominal dan tanpa penalty atau pembatasan; dan
- b. dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran melalui cek, wesel, giro order, debet/kredit langsung, atau fasilitas pembayaran langsung lainnya.

F221 Posisi antar bank

Posisi antar bank umumnya dapat diidentifikasi dan berguna untuk mencatat kategori instrumen secara terpisah. Hal ini merupakan salah satu alasan dalam memisahkan pinjaman dan simpanan antar bank dari pinjaman dan simpanan lain. Alasan ke dua tertuju pada penghitungan biaya jasa perantara keuangan yang diukur tidak langsung (FISIM).

F229 Simpanan *transferable* lainnya

Simpanan *transferable* lainnya adalah di mana satu pihak atau kedua belah pihak dalam transaksi, atau baik kreditur atau debitur atau kedua posisi itu, merupakan institusi bukan bank.

F29 Simpanan lainnya

Simpanan lainnya terdiri dari seluruh klaim, selain simpanan transferable yang dinyatakan oleh bukti simpanan. Bentuk simpanan tertentu yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tabungan (yang selalu tidak dapat ditransfer), deposito berjangka, dan sertifikat deposito yang tidak dapat dinegoisasi. Kategori ini juga mencakup saham atau bukti simpanan semacam itu yang diterbitkan asosiasi tabungan dan pinjaman, pembangunan masyarakat, serikat kredit dsj. Simpanan dengan kemampuan transfer terbatas, yang dikecualikan dari kategori simpanan yang transferable disertakan di sini. Klaim terhadap IMF yang merupakan komponen cadangan devisa dan tidak dibuktikan melalui pinjaman, dicatat dalam bentuk simpanan lain. (Klaim pada IMF yang dibuktikan melalui pinjaman, harus masuk dalam pinjaman). Pembayaran margin yang dibayar tunai terkait kontrak finansial derivatif (dijelaskan di bawah), termasuk dalam simpanan lain, seperti halnya overnight dan perjanjian membeli kembali jangka sangat pendek jika dianggap bagian dari definisi uang nasional yang diperluas. Perjanjian membeli kembali lainnya diklasifikasi sebagai pinjaman.

F3 Surat Hutang (*Debt Securities*)

Surat hutang atau sekuritas hutang merupakan *negotiable instruments* yang memberikan suatu bukti hutang. Surat hutang mencakup tagihan, obligasi, sertifikat simpanan yang *negotiable*, *commercial paper*, *debentures*, sekuritas aset *backed*, dan instrumen sejenis yang umum diperdagangkan di pasar finansial.

F31 Surat Hutang Jangka pendek

Surat hutang atau sekuritas hutang jangka pendek, mencakup sekuritas yang mempunyai saat jatuh tempo *original* satu tahun atau kurang. Sekuritas dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang diklasifikasi sebagai jangka pendek, bahkan jika dikeluarkan di bawah fasilitas jangka panjang, seperti dalam menerbitkan fasilitas *note*.

F32 Surat Hutang Jangka Panjang

Surat hutang atau sekuritas hutang jangka panjang mencakup sekuritas yang mempunyai saat jatuh tempo *original* lebih dari satu tahun. Klaim dengan tanggal jatuh tempo *optional* terakhirnya lebih dari satu tahun dan klaim dengan tanggal jatuh tempo tidak terbatas, diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

F4 Pinjaman

Pinjaman merupakan aset finansial yang:

- a. Dibuat saat kreditur meminjamkan dana secara langsung pada debitur, dan
- b. Dibuktikan dengan dokumen yang tidak dapat dinegoisasi (*negotiable*).

F41 Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek terdiri dari pinjaman yang mempunyai *original* jatuh tempo satu tahun atau kurang. Pinjaman yang dibayar kembali atas permintaan kreditur diklasifikasi sebagai jangka pendek, bahkan ketika pinjaman itu diharapkan berumur lebih dari setahun.

F42 Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang terdiri dari pinjaman yang mempunyai masa jatuh tempo lebih setahun.

F5 Ekuitas dan Dana Investasi Saham

Ekuitas dan dana investasi saham memiliki fitur berbeda, yaitu pemegangnya memiliki sisa klaim atas aset dari unit institusi yang menerbitkan instrumen. Ekuitas mewakili pemilik dana dalam unit institusi. Berbeda dengan hutang, ekuitas umumnya tidak memberi hak pada pemiliknya sejumlah yang ditentukan atau yang ditentukan menurut suatu rumusan yang tetap. Dana investasi saham memiliki peran khusus di dalam aktivitas perantara finansial sebagai jenis investasi kolektif atas aset lain, sehingga diidentifikasi secara terpisah.

F51 Ekuitas

Ekuitas terdiri dari semua instrumen dan catatan pengakuan klaim pada nilai sisa

dari suatu korporasi atau kuasi-korporasi setelah klaim dari seluruh kreditur dipenuhi. Ekuitas diperlakukan sebagai tanggungan dari unit institusi yang menerbitkan.

F511 Ekuitas/Saham Terdaftar

Saham terdaftar merupakan sekuritas ekuitas yang tercatat di dalam bursa saham.

F512 Ekuitas/Saham Tidak Terdaftar

Saham tidak terdaftar merupakan sekuritas ekuitas yang tidak terdaftar dalam bursa saham.

F519 Ekuitas lainnya

Ekuitas lainnya merupakan ekuitas yang tidak berbentuk sekuritas.

F52 Dana investasi saham atau *units*

Dana investasi merupakan investasi kolektif yang berlangsung jika para investor mengumpulkan dana untuk investasi aset finansial atau aset non-finansial.

F521 Saham MMF atau *units*

MMF merupakan dana investasi yang diinvestasikannya atau utamanya dalam pasar uang sekuritas jangka pendek seperti *treasury bills*, *certificates of deposit*, dan *commercial paper*. MMF terkadang secara fungsional mirip dengan simpanan *transferable*, seperti akun dengan hak menulis cek yang terbatas. Jika dana saham tersebut termasuk uang beredar dalam pelaporan ekonomi, mereka dicatat sebagai bagian yang terpisah *to allow* rekonsiliasi dengan statistik moneter. Saham atau unit MMF merepresentasi suatu klaim yang proporsional atas nilai MMF yang dibentuk.

F522 Dana investasi saham lainnya atau *units*

Dana investasi saham lainnya atau unit menggambarkan klaim atas suatu proporsi nilai dana investasi yang dibangun selain dari dana pasar uang.

F6 Asuransi, Skema Pensiun, dan Jaminan Terstandar

Asuransi, skema pensiun dan jaminan yang terstandar berfungsi sebagai bentuk redistribusi pendapatan atau kekayaan yang dimediasi oleh institusi finansial. Redistribusi terjadi antar unit individu institusi pada periode sama, atau antar unit institusi yang sama pada periode yang berbeda, atau kombinasi keduanya.

F61 Cadangan teknis asuransi non-jiwa

Cadangan teknis asuransi non-jiwa terdiri dari pembayaran di muka atas premi

asuransi non-jiwa dan cadangan neto guna memenuhi klaim asuransi non-jiwa yang mungkin terjadi.

F62 *Entitlement* asuransi jiwa dan jaminan hari tua

Entitlement asuransi jiwa dan jaminan hari tua memperlihatkan perluasan klaim finansial milik pemegang polis yang ditawarkan oleh suatu *enterprise* asuransi jiwa atau yang menyediakan jaminan hari tua. Hanya transaksi untuk asuransi jiwa dan jaminan hari tua yang dicatat pada neraca finansial, yakni selisih antara premi bersih yang diterima dan klaim yang dibayar.

F63 *Entitlement* pensiun

Entitlement pensiun menunjukkan perluasan klaim finansial yang dipegang pensiunan di masa kini dan di masa mendatang terhadap majikan atau terhadap suatu pendanaan yang ditunjuk majikan untuk membayar pendapatan pensiun sebagai bagian dari perjanjian kompensasi antara majikan dan pekerja. Transaksi *entitlement* pensiun yang dicatat pada neraca finansial adalah selisih bersih antara kontribusi yang diterima dan manfaat yang dibayarkan.

F64 Klaim dana pensiun pada pengelola pensiun

Majikan dapat melakukan kontrak dengan pihak ketiga untuk mengelola dana pensiun bagi pekerjanya. Jika majikan memutuskan untuk menetapkan persyaratan di dalam skema pensiun dan bertanggung jawab atas defisit pendanaan serta hak menahan setiap kelebihan dana, maka majikan digambarkan sebagai pengelola pensiun dan unit kerja di bawahnya sebagai administrator pensiun.

F66 Ketentuan untuk panggilan di bawah jaminan yang terstandar

Ketentuan untuk panggilan di bawah jaminan yang distandarisasi terdiri dari pembayaran biaya neto dan ketentuan untuk memenuhi *outstanding calls* di bawah jaminan terstandar.

F7 Finansial *Derivative* dan Opsi Saham Pekerja

F71 Finansial *derivatives*

Finansial *derivatives* merupakan instrumen finansial yang terkait dengan instrumen finansial tertentu atau indikator atau komoditas, melalui mana risiko finansial tertentu diperdagangkan di pasar finansial atas namanya sendiri.

F711 Opsi

Opsi merupakan kontrak yang memberikan pada pembeli hak opsi, namun bukan

suatu obligasi untuk membeli (suatu pilihan “*call*”) atau menjual (suatu pilihan “*put*”) instrumen finansial tertentu atau komoditas pada harga yang ditentukan sebelumnya (harga “*strike*”) dalam rentang waktu tertentu (opsi Amerika) atau pada tanggal tertentu (opsi Eropa). Opsi, dijual atau “*written*” dalam banyak jenis basis *underlying* seperti ekuitas, suku bunga, mata uang asing, komoditas, dan indeks tertentu.

F712 Forward

Suatu kontrak *forward* merupakan kontrak finansial tanpa syarat yang merupakan kewajiban untuk diselesaikan pada tanggal yang ditentukan. Kontrak *forward* dan kontrak *forward* lain biasanya, namun tidak selalu diselesaikan melalui pembayaran tunai atau penyediaan instrumen finansial lainnya daripada pengiriman aktual dari item yang mendasari, dan oleh karenanya dinilai dan diperdagangkan secara terpisah dari item yang mendasari.

F72 Opsi saham pekerja (*employee stock options* atau ESOs)

Opsi saham pekerja merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada tanggal tertentu (the “*grant*” date) di bawah mana seorang pekerja dapat membeli sejumlah saham majikan pada harga lain (the “*strike*” price) baik pada saat tertentu (the “*vesting*” date) atau di dalam periode (the *exercise period*) segera setelah tanggal pemberian hak opsi.

F8 Akun penerimaan dan pembayaran lainnya

F81 Kredit dagang dan uang muka

Kategori ini terdiri dari kredit dagang barang dan jasa yang diberikan pada korporasi, pemerintah, LNPRT, Rumah Tanggadan Luar Negeri, serta uang muka untuk pekerjaan yang sedang berlangsung (jika diklasifikasi sebagai inventori) atau hal ini telah dan sedang berlangsung. Kredit dagang dan uang muka tidak mencakup kredit untuk membiayai kredit dagang yang diklasifikasi sebagai pinjaman.

F89 Lainnya

Kategori ini mencakup penerimaan dan pembayaran selain yang dijelaskan sebelumnya, yaitu jumlah yang tidak berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Kategori ini mencakup jumlah yang terkait dengan pajak, dividen, pembelian dan penjualan sekuritas, sewa, upah dan gaji, dan kontribusi sosial. Bunga yang diperoleh namun tidak dibayarkan termasuk dalam item ini, hanya jika bunga yang diperoleh tidak ditambahkan pada nilai aset yang mana bunga dibayar (seperti yang biasa terjadi).

Lampiran 3

Matrik NAD Indonesia
Menurut Kategori Transaksi dan Sektor
2011-2015

<http://www.bps.go.id>

TABEL 1. NERACA ARUS DANA
TABLE 1. INDONESIAN FLOW OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		NON-FINANCIAL CORPORATIONS		FINANCIAL CORPORATIONS		GOVERNMENT		HOUSEHOLDS	
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL
B8g	Tabungan Bruto		1,999.82		62.49		33.46		491.51
P5g	Investasi NonFinansial	2,158.34		1.90		117.86		300.69	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-158.52		60.59		-84.40		190.83	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	21.13		101.60		-47.25		-22.70	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-179.65		-41.00		-37.15		213.53
A	Perolehan neto aset finansial	850.29		804.51		65.32		487.22	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		1,029.94		845.51		102.47		273.69
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			5.52					
F11	Emas Moneter			2.96					
F12	Hak Tarik Khusus			2.56					
F2	Uang dan Simpanan	152.36		-19.82	471.24	63.00		265.06	
F21	Uang	20.35		21.05	54.40	0.00		20.35	
F22	<i>Transferable deposits</i>	77.81		-72.66	29.38	16.38		3.55	
F29	Simpanan lainnya	54.20		31.78	387.47	46.62		241.16	
F3	Surat Berharga	132.42	-8.04	174.72	143.31	0.08	120.19	0.06	
F31	Jangka pendek	-0.78	0.00	114.00	117.98	0.00	7.31	0.00	
F32	Jangka panjang	133.20	-8.04	60.71	25.33	0.08	112.88	0.06	
F4	Pinjaman	39.29	248.75	511.30	55.24	0.00	-17.72	0.54	309.71
F41	Jangka pendek	0.00	69.68	58.95	4.20	0.00	-4.66	0.54	34.44
F42	Jangka panjang	39.29	179.07	452.36	51.03	0.00	-13.06	0.00	275.26
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	436.23	690.64	44.32	110.19	18.62	0.00	206.32	0.00
F51	Ekuitas	438.43	690.64	61.29	91.27	18.62		206.11	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-2.20	0.00	-16.97	18.93	0.00		0.21	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	1.08	0.00	0.72	53.06	0.00	0.00	51.26	0.00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	1.08		0.72	3.60	0.00		1.80	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				38.29			38.29	
F63	Hak pensiunan				11.17			11.17	
F7	Transaksi <i>derivatives</i>	0.00		-4.68	-4.08	0.00		0.00	
F8	Hutang/Piutang lainnya	88.91	98.59	92.43	16.55	-16.38	0.00	-36.01	-36.01
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	54.56	9.58		0.00	0.00	0.00	-25.23	-25.23
F89	Hutang/Piutang lainnya	34.35	89.02	92.43	16.55	-16.38	0.00	-10.79	-10.79
	TOTAL	850.29	850.29	804.51	804.51	65.32	65.32	487.22	487.22

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

INDONESIA, 2011 (Triliun Rp)
FUNDS ACCOUNTS, 2011 (Trillion Rp)

LNPRT		TOTAL EKONOMI DOMESTIK		LUAR NEGERI		TOTAL		Transaction Categories	Code
NPISHs		TOTAL ECONOMY		REST OF THE WORLD		TOTAL			
ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL		
	10.82		2,598.11		-14.86		2,583.24	Saving, gross	B8g
4.46			2,583.24				2,583.24	Gross Capital Formation	P5g
6.36			14.86		-14.86		0.00	Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
-19.75			33.03		-33.03		0.00	<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
	26.11		-18.17		18.17		0.00	Net change in financial position (A-L)	B9f
11.07			2,218.41		258.37		2,476.78	Net acquisition of financial assets	A
	-15.04		2,236.58		240.20		2,476.78	Net acquisition of financial liabilities	L
			5.52		-5.52		0.00	Monetary gold and SDRs	F1
			2.96		-2.96		0.00	<i>Monetary gold</i>	F11
			2.56		-2.56		0.00	<i>SDRs</i>	F12
8.76		469.36	471.24	10.68	8.80	480.04	480.04	Currency and deposits	F2
0.00		61.75	54.40	0.00	7.35	61.75	61.75	<i>Currency</i>	F21
4.29		29.38	29.38	0.00	0.00	29.38	29.38	<i>Transferable deposits</i>	F22
4.47		378.23	387.47	10.68	1.45	388.91	388.91	<i>Other deposits</i>	F29
0.08		307.35	255.46	47.00	98.89	354.35	354.35	Debt securities	F3
0.00		113.23	125.29	12.07	0.00	125.29	125.29	<i>Short-term</i>	F31
0.08		194.13	130.17	34.93	98.89	229.06	229.06	<i>Long-term</i>	F32
0.00	-15.04	551.14	580.94	65.94	36.15	617.09	617.09	Loans	F4
0.00	0.00	59.49	103.66	44.17	0.00	103.66	103.66	<i>Short-term</i>	F41
0.00	-15.04	491.65	477.27	21.77	36.15	513.42	513.42	<i>Long-term</i>	F42
2.23	0.00	707.71	800.83	140.19	47.07	847.90	847.90	Equity and investment fund shares	F5
0.60		725.04	781.90	103.93	47.07	828.98	828.98	<i>Equity</i>	F51
1.63		-17.33	18.93	36.26	0.00	18.93	18.93	<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0.00	0.00	53.06	53.06	0.00	0.00	53.06	53.06	Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0.00		3.60	3.60	0.00	0.00	3.60	3.60	<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
		38.29	38.29	0.00	0.00	38.29	38.29	<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
		11.17	11.17	0.00	0.00	11.17	11.17	<i>Pension entitlements</i>	F63
0.00		-4.68	-4.08	-4.08	-4.68	-8.76	-8.76	Financial derivatives	F7
0.00	0.00	128.94	79.13	4.15	53.97	133.10	133.10	Other accounts receivable/payable	F8
		29.33	-15.65	9.58	54.56	38.91	38.91	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0.00	0.00	99.61	94.78	-5.42	-0.59	94.19	94.19	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
11.07	11.07	2,218.41	2,218.41	258.37	258.37	2,476.78	2,476.78	TOTAL	

Note:
CiA = Changes in assets
CiL = Changes in liabilities and net worth

TABEL 2. NERACA ARUS DANA
TABLE 2. INDONESIAN FLOW OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		NON-FINANCIAL CORPORATIONS		FINANCIAL CORPORATIONS		GOVERNMENT		HOUSEHOLDS	
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL
B8g	Tabungan Bruto		2,072.41		122.69		-8.20		592.98
P5g	Investasi NonFinansial	2,505.34		18.52		145.10		347.14	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-432.93		104.18		-153.30		245.84	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	-25.21		89.80		-51.17		-10.02	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-407.72		14.38		-102.13		255.86
A	Perolehan neto aset finansial	991.28		794.24		40.54		547.55	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		1,399.00		779.86		142.68		291.69
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			0.21					
F11	Emas Moneter			0.15					
F12	Hak Tarik Khusus			0.06					
F2	Uang dan Simpanan	159.29		84.46	540.95	38.33		243.77	
F21	Uang	25.78		19.99	66.75	0.00		25.78	
F22	Transferable deposits	77.97		32.59	130.03	16.44		-1.11	
F29	Simpanan lainnya	55.55		31.89	344.17	21.89		219.10	
F3	Surat Berharga	56.91	9.61	10.71	-25.56	0.35	159.99	1.84	
F31	Jangka pendek	23.33	0.00	-46.29	-36.82	0.00	0.43	0.00	
F32	Jangka panjang	33.58	9.61	57.00	11.27	0.35	159.57	1.84	
F4	Pinjaman	61.51	397.95	547.48	-4.94	0.00	-17.32	9.04	250.55
F41	Jangka pendek	0.00	31.67	56.75	-20.46	0.00	-3.71	9.04	36.07
F42	Jangka panjang	61.51	366.28	490.73	15.51	0.00	-13.61	0.00	214.47
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	650.29	953.56	111.21	169.42	18.30	0.00	200.17	0.00
F51	Ekuitas	646.58	953.56	96.81	130.73	18.30		200.39	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	3.71	0.00	14.40	38.68	0.00		-0.22	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	4.49	0.00	2.99	59.08	0.00	0.00	51.59	0.00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	4.49		2.99	14.96	0.00		7.48	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				27.33			27.33	
F63	Hak pensiunan				16.79			16.79	
F7	Transaksi derivatives	0.00		-3.10	-2.99	0.00		0.00	
F8	Hutang/Piutang lainnya	58.79	37.88	40.27	43.91	-16.44	0.00	41.15	41.15
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	48.76	2.95		0.00	0.00	0.00	-18.20	-18.20
F89	Hutang/Piutang lainnya	10.02	34.93	40.27	43.91	-16.44	0.00	59.35	59.35
	TOTAL	991.28	991.28	794.24	794.24	40.54	40.54	547.55	547.55

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

INDONESIA, 2012 (Triliun Rp)
FUNDS ACCOUNTS, 2012 (Trillion Rp)

LNPRT		TOTAL EKONOMI DOMESTIK		LUAR NEGERI		TOTAL		Transaction Categories	Code
NPISHs		TOTAL ECONOMY		REST OF THE WORLD		TOTAL			
ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL		
	12.15		2,792.03		229.63		3,021.66	Saving, gross	B8g
5.57		3,021.66				3,021.66		Gross Capital Formation	P5g
6.58		-229.63		229.63		0.00		Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
-0.60		2.80		-2.80		0.00		<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
	7.19		-232.44		232.44		0.00	Net change in financial position (A-L)	B9f
8.66		2,382.27		404.03		2,786.30		Net acquisition of financial assets	A
	1.48		2,614.71		171.60		2,786.30	Net acquisition of financial liabilities	L
		0.21		-0.21		0.00	0.00	Monetary gold and SDRs	F1
		0.15		-0.15		0.00	0.00	<i>Monetary gold</i>	F11
		0.06		-0.06		0.00	0.00	<i>SDRs</i>	F12
10.87		536.72	540.95	11.01	6.78	547.73	547.73	Currency and deposits	F2
0.00		71.54	66.75	0.00	4.79	71.54	71.54	<i>Currency</i>	F21
4.15		130.03	130.03	0.00	0.00	130.03	130.03	<i>Transferable deposits</i>	F22
6.71		335.15	344.17	11.01	1.99	346.16	346.16	<i>Other deposits</i>	F29
0.35		70.15	144.05	122.15	48.25	192.30	192.30	Debt securities	F3
0.00		-22.96	-36.40	-13.43	0.00	-36.40	-36.40	<i>Short-term</i>	F31
0.35		93.12	180.45	135.58	48.25	228.70	228.70	<i>Long-term</i>	F32
0.00	1.48	618.04	627.71	35.69	26.02	653.73	653.73	Loans	F4
0.00	0.00	65.79	43.58	-22.22	0.00	43.58	43.58	<i>Short-term</i>	F41
0.00	1.48	552.24	584.13	57.91	26.02	610.16	610.16	<i>Long-term</i>	F42
-2.55	0.00	977.42	1,122.97	191.17	45.61	1,168.58	1,168.58	Equity and investment fund shares	F5
0.74		962.82	1,084.29	167.08	45.61	1,129.90	1,129.90	<i>Equity</i>	F51
-3.29		14.60	38.68	24.09	0.00	38.68	38.68	<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0.00	0.00	59.08	59.08	0.00	0.00	59.08	59.08	Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0.00		14.96	14.96	0.00	0.00	14.96	14.96	<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
		27.33	27.33	0.00	0.00	27.33	27.33	<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
		16.79	16.79	0.00	0.00	16.79	16.79	<i>Pension entitlements</i>	F63
0.00		-3.10	-2.99	-2.99	-3.10	-6.09	-6.09	Financial derivatives	F7
0.00	0.00	123.76	122.94	47.21	48.03	170.97	170.97	Other accounts receivable/payable	F8
		30.56	-15.25	2.95	48.76	33.51	33.51	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0.00	0.00	93.20	138.19	44.26	-0.73	137.46	137.46	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
8.66	8.66	2,382.27	2,382.27	404.03	404.03	2,786.30	2,786.30	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

TABEL 3. NERACA ARUS DANA
TABLE 3. INDONESIAN FLOW OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		NON-FINANCIAL CORPORATIONS		FINANCIAL CORPORATIONS		GOVERNMENT		HOUSEHOLDS	
		ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL
B8g	Tabungan Bruto		2,090.64		167.11		-30.81		691.16
P5g	Investasi NonFinansial	2,571.38		33.50		180.86		437.45	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-480.73		133.61		-211.67		253.71	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	387.67		-104.07		-33.11		-270.91	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-868.41		237.68		-178.56		524.61
A	Perolehan neto aset finansial	-217.68		884.23		39.45		750.27	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		650.72		646.54		218.01		225.66
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-4.23					
F11	Emas Moneter			-2.58					
F12	Hak Tarik Khusus			-1.65					
F2	Uang dan Simpanan	119.26		-27.58	367.76	15.10		256.63	
F21	Uang	29.23		3.01	60.30	0.00		29.23	
F22	<i>Transferable deposits</i>	40.11		-54.32	-30.26	-10.66		-4.34	
F29	Simpanan lainnya	49.92		23.74	337.72	25.76		231.75	
F3	Surat Berharga	-110.86	1.30	149.76	35.70	0.27	221.65	32.30	
F31	Jangka pendek	12.27	0.00	45.52	30.53	0.00	1.71	1.11	
F32	Jangka panjang	-123.13	1.30	104.24	5.17	0.27	219.94	31.19	
F4	Pinjaman	38.09	335.07	539.45	60.19	0.00	-3.63	-20.84	216.73
F41	Jangka pendek	0.00	16.36	45.98	-7.35	0.00	9.19	-20.84	10.30
F42	Jangka panjang	38.09	318.70	493.47	67.53	0.00	-12.83	0.00	206.43
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-311.97	307.07	219.10	103.26	13.42	0.00	421.85	0.00
F51	Ekuitas	-311.99	307.07	219.37	123.18	13.42		421.59	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0.02	0.00	-0.27	-19.92	0.00		0.26	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	7.20	0.00	4.80	63.39	0.00	0.00	51.40	0.00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	7.20		4.80	23.99	0.00		12.00	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				35.33			35.33	
F63	Hak pensiunan				4.08			4.08	
F7	Transaksi <i>derivatives</i>	0.00		-3.71	-7.21	0.00		0.00	
F8	Hutang/Piutang lainnya	40.61	7.29	6.64	23.45	10.66	0.00	8.93	8.93
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	9.29	5.65		0.00	0.00	0.00	-52.13	-52.13
F89	Hutang/Piutang lainnya	31.32	1.64	6.64	23.45	10.66	0.00	61.06	61.06
	TOTAL	-217.68	-217.68	884.23	884.23	39.45	39.45	750.27	750.27

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

INDONESIA, 2013 (Triliun Rp)
FUNDS ACCOUNTS, 2013 (Trillion Rp)

LNPRT	TOTAL EKONOMI DOMESTIK				LUAR NEGERI		TOTAL		Transaction Categories	Code
	NPISHs		TOTAL ECONOMY		REST OF THE WORLD		TOTAL			
	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL		
	12.01		2,930.11		299.48		3,229.59	Saving, gross	B8g	
6.40			3,229.59				3,229.59	Gross Capital Formation	P5g	
5.61			-299.48		299.48		0.00	Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c	
20.78			0.37		-0.37		0.00	<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>		
	-15.17		-299.85		299.85		0.00	Net change in financial position (A-L)	B9f	
7.15			1,463.41		398.79		1,862.20	Net acquisition of financial assets	A	
	22.32		1,763.26		98.93		1,862.20	Net acquisition of financial liabilities	L	
			-4.23		4.23		0.00	Monetary gold and SDRs	F1	
			-2.58		2.58		0.00	<i>Monetary gold</i>	F11	
			-1.65		1.65		0.00	<i>SDRs</i>	F12	
2.82			366.23	367.76	15.77	14.24	382.00	382.00	Currency and deposits	F2
0.00			61.46	60.30	0.00	1.16	61.46	61.46	<i>Currency</i>	F21
-1.05			-30.26	-30.26	0.00	0.00	-30.26	-30.26	<i>Transferable deposits</i>	F22
3.87			335.04	337.72	15.77	13.09	350.80	350.80	<i>Other deposits</i>	F29
0.27			71.73	258.65	144.20	-42.72	215.93	215.93	Debt securities	F3
0.00			58.90	32.24	-26.66	0.00	32.24	32.24	<i>Short-term</i>	F31
0.27			12.83	226.41	170.86	-42.72	183.70	183.70	<i>Long-term</i>	F32
0.00	22.32		556.69	630.67	64.02	-9.96	620.71	620.71	Loans	F4
0.00	0.00		25.13	28.51	3.38	0.00	28.51	28.51	<i>Short-term</i>	F41
0.00	22.32		531.56	602.16	60.65	-9.96	592.20	592.20	<i>Long-term</i>	F42
4.06	0.00		346.47	410.32	189.11	125.25	535.58	535.58	Equity and investment fund shares	F5
3.02			345.41	430.25	210.09	125.25	555.50	555.50	<i>Equity</i>	F51
1.04			1.05	-19.92	-20.98	0.00	-19.92	-19.92	<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0.00	0.00		63.39	63.39	0.00	0.00	63.39	63.39	Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0.00			23.99	23.99	0.00	0.00	23.99	23.99	<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
			35.33	35.33	0.00	0.00	35.33	35.33	<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
			4.08	4.08	0.00	0.00	4.08	4.08	<i>Pension entitlements</i>	F63
0.00			-3.71	-7.21	-7.21	-3.71	-10.91	-10.91	Financial derivatives	F7
0.00	0.00		66.83	39.67	-11.34	15.82	55.49	55.49	Other accounts receivable/payable	F8
			-42.85	-46.48	5.65	9.29	-37.19	-37.19	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0.00	0.00		109.68	86.15	-17.00	6.53	92.69	92.69	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
7.15	7.15		1,463.41	1,463.41	398.79	398.79	1,862.20	1,862.20	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

TABEL 4. NERACA ARUS DANA
TABLE 4. INDONESIAN FLOW OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		NON-FINANCIAL CORPORATIONS		FINANCIAL CORPORATIONS		GOVERNMENT		HOUSEHOLDS	
		Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL
B8g	Tabungan Bruto		2,280.62		315.07		-79.34		795.83
P5g	Investasi NonFinansial	2,930.81		37.58		147.35		531.19	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-650.20		277.49		-226.69		264.64	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	65.18		430.89		-70.82		-390.06	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-715.38		-153.40		-155.87		654.69
A	Perolehan neto aset finansial	1,200.29		955.02		32.71		800.57	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		1,915.67		1,108.42		188.59		145.88
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			9.59					
F11	Emas Moneter			5.21					
F12	Hak Tarik Khusus			4.38					
F2	Uang dan Simpanan	73.04		200.89	572.63	31.18		289.58	
F21	Uang	15.67		42.88	28.52	0.00		15.67	
F22	Transferable deposits	12.27		83.39	108.20	8.94		1.61	
F29	Simpanan lainnya	45.10		74.62	435.91	22.24		272.30	
F3	Surat Berharga	53.76	-7.18	43.06	-7.14	-0.36	249.26	-2.57	
F31	Jangka pendek	-7.97	0.00	-2.95	1.42	0.00	4.14	-0.11	
F32	Jangka panjang	61.73	-7.18	46.01	-8.55	-0.36	245.12	-2.46	
F4	Pinjaman	54.36	303.73	381.57	114.40	0.00	-60.67	-20.97	186.38
F41	Jangka pendek	0.00	37.70	18.11	70.49	0.00	-59.04	-20.97	1.84
F42	Jangka panjang	54.36	266.03	363.46	43.91	0.00	-1.64	0.00	184.55
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	957.13	1,553.14	259.94	347.14	10.84	0.00	490.84	0.00
F51	Ekuitas	957.04	1,553.14	203.39	302.69	10.84		490.85	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0.09	0.00	56.55	44.45	0.00		-0.01	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	4.55	0.00	3.03	91.77	0.00	0.00	84.19	0.00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	4.55		3.03	15.16	0.00		7.58	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				52.78			52.78	
F63	Hak pensiunan				23.83			23.83	
F7	Transaksi derivatives	0.00		-5.27	-7.02	0.00		0.00	
F8	Hutang/Piutang lainnya	57.45	65.99	62.21	-3.36	-8.94	0.00	-40.51	-40.51
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	10.59	3.44		0.00	0.00	0.00	-144.28	-144.28
F89	Hutang/Piutang lainnya	46.86	62.55	62.21	-3.36	-8.94	0.00	103.77	103.77
	TOTAL	1,200.29	1,200.29	955.02	955.02	32.71	32.71	800.57	800.57

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

INDONESIA, 2014 (Triliun Rp)
FUNDS ACCOUNTS, 2014 (Trillion Rp)

LNPRT	TOTAL EKONOMI DOMESTIK				LUAR NEGERI		TOTAL		Transaction Categories	Code	
	NPISHs		TOTAL ECONOMY		REST OF THE WORLD		TOTAL				
	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL			
	14.97		3,327.14			325.29		3,652.43	Saving, gross	B8g	
5.50			3,652.43					3,652.43	Gross Capital Formation	P5g	
9.47			-325.29			325.29		0.00	Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c	
-9.04			26.16			-26.16		0.00	<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>		
	18.51		-351.45			351.45		0.00	Net change in financial position (A-L)	B9f	
14.75			3,003.34			648.30		3,651.64	Net acquisition of financial assets	A	
	-3.76		3,354.80			296.85		3,651.64	Net acquisition of financial liabilities	L	
			9.59			-9.59		0.00	Monetary gold and SDRs	F1	
			5.21			-5.21		0.00	<i>Monetary gold</i>	F11	
			4.38			-4.38		0.00	<i>SDRs</i>	F12	
8.99			603.67	572.63		27.75	58.79	631.42	631.42	Currency and deposits	F2
0.00			74.22	28.52		0.00	45.70	74.22	74.22	<i>Currency</i>	F21
1.99			108.20	108.20		0.00	0.00	108.20	108.20	<i>Transferable deposits</i>	F22
7.00			421.25	435.91		27.75	13.09	449.00	449.00	<i>Other deposits</i>	F29
-0.36			93.53	234.94		237.69	96.29	331.23	331.23	Debt securities	F3
0.00			-11.02	5.55		16.58	0.00	5.55	5.55	<i>Short-term</i>	F31
-0.36			104.56	229.39		221.12	96.29	325.67	325.67	<i>Long-term</i>	F32
0.00	-3.76		414.96	540.08		127.57	2.46	542.53	542.53	Loans	F4
0.00	0.00		-2.85	50.99		53.84	0.00	50.99	50.99	<i>Short-term</i>	F41
0.00	-3.76		417.82	489.09		73.73	2.46	491.55	491.55	<i>Long-term</i>	F42
6.13	0.00		1,724.88	1,900.28		298.09	122.69	2,022.97	2,022.97	Equity and investment fund shares	F5
2.48			1,664.61	1,855.82		313.91	122.69	1,978.51	1,978.51	<i>Equity</i>	F51
3.64			60.27	44.45		-15.82	0.00	44.45	44.45	<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0.00	0.00		91.77	91.77		0.00	0.00	91.77	91.77	Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0.00			15.16	15.16		0.00	0.00	15.16	15.16	<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
			52.78	52.78		0.00	0.00	52.78	52.78	<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
			23.83	23.83		0.00	0.00	23.83	23.83	<i>Pension entitlements</i>	F63
0.00			-5.27	-7.02		-7.02	-5.27	-12.28	-12.28	Financial derivatives	F7
0.00	0.00		70.21	22.13		-26.19	21.89	44.01	44.01	Other accounts receivable/payable	F8
			-133.69	-140.84		3.44	10.59	-130.25	-130.25	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0.00	0.00		203.89	162.96		-29.64	11.30	174.26	174.26	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
14.75	14.75		3,003.34	3,003.34		648.30	648.30	3,651.64	3,651.64	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

TABEL 5. NERACA ARUS DANA
TABLE 5. INDONESIAN FLOW OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	KORPORASI NON FINANSIAL		KORPORASI FINANSIAL		PEMERINTAH		RUMAH TANGGA	
		NON-FINANCIAL CORPORATIONS		FINANCIAL CORPORATIONS		GOVERNMENT		HOUSEHOLDS	
		Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL
B8g	Tabungan Bruto		2,802.88		208.90		-83.06		806.38
P5g	Investasi NonFinansial	3,197.34		38.85		215.43		529.78	
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-394.46		170.05		-298.50		276.60	
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	-570.46		106.58		61.92		423.09	
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		176.00		63.47		-360.41		-146.49
A	Perolehan neto aset finansial	-157.46		450.96		4.98		48.37	
L	Perolehan neto kewajiban finansial		-333.46		387.48		365.39		194.86
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus			-1.05					
F11	Emas Moneter			-0.61					
F12	Hak Tarik Khusus			-0.44					
F2	Uang dan Simpanan	142.21		193.30	412.62	-34.99		168.45	
F21	Uang	48.71		7.47	58.23	0.00		48.71	
F22	Transferable deposits	51.64		158.16	206.90	-15.84		4.71	
F29	Simpanan lainnya	41.86		27.68	147.49	-19.14		115.04	
F3	Surat Berharga	-23.70	-0.59	41.53	-70.29	0.10	360.55	11.07	
F31	Jangka pendek	65.70	0.00	-78.23	-73.09	0.00	27.61	0.25	
F32	Jangka panjang	-89.39	-0.59	119.76	2.80	0.10	332.94	10.82	
F4	Pinjaman	19.71	215.72	313.24	-44.13	0.00	4.84	29.37	166.21
F41	Jangka pendek	0.00	-9.78	-2.86	-109.50	0.00	-24.65	29.37	30.76
F42	Jangka panjang	19.71	225.50	316.10	65.37	0.00	29.49	0.00	135.45
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-328.90	-465.43	0.58	81.15	24.02	0.00	-202.48	0.00
F51	Ekuitas	-329.07	-465.43	-36.57	46.43	24.02		-202.29	
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0.18	0.00	37.15	34.72	0.00		-0.19	
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	3.13	0.00	2.08	18.52	0.00	0.00	13.31	0.00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	3.13		2.08	10.42	0.00		5.21	
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa				-10.68			-10.68	
F63	Hak pensiunan				18.78			18.78	
F7	Transaksi derivatives	0.00		-8.85	-8.65	0.00		0.00	
F8	Hutang/Piutang lainnya	30.10	-83.15	-89.86	-1.75	15.84	0.00	28.65	28.65
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	26.05	6.59		0.00	0.00	0.00	-56.92	-56.92
F89	Hutang/Piutang lainnya	4.05	-89.74	-89.86	-1.75	15.84	0.00	85.57	85.57
	TOTAL	-157.46	-157.46	450.96	450.96	4.98	4.98	48.37	48.37

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

INDONESIA, 2015 (Triliun Rp)
FUNDS ACCOUNTS, 2015 (Trillion Rp)

LNPRT	TOTAL EKONOMI DOMESTIK				LUAR NEGERI		TOTAL		Transaction Categories	Code
	NPISHs		TOTAL ECONOMY		REST OF THE WORLD		TOTAL			
	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL		
	16.48		3,751.58		237.15		3,988.73	Saving, gross	B8g	
7.33			3,988.73				3,988.73	Gross Capital Formation	P5g	
9.15			-237.15		237.15		0.00	Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c	
-14.13			6.99		-6.99		0.00	<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>		
	23.28		-244.14		244.14		0.00	Net change in financial position (A-L)	B9f	
26.86			373.71		509.89		883.60	Net acquisition of financial assets	A	
	3.58		617.85		265.75		883.60	Net acquisition of financial liabilities	L	
			-1.05		1.05		0.00	Monetary gold and SDRs	F1	
			-0.61		0.61		0.00	<i>Monetary gold</i>	F11	
			-0.44		0.44		0.00	<i>SDRs</i>	F12	
27.72			496.69	412.62	10.61	94.69	507.31	507.31	Currency and deposits	F2
0.00			104.88	58.23	0.00	46.65	104.88	104.88	<i>Currency</i>	F21
8.24			206.90	206.90	0.00	0.00	206.90	206.90	<i>Transferable deposits</i>	F22
19.48			184.91	147.49	10.61	48.04	195.53	195.53	<i>Other deposits</i>	F29
0.10			29.10	289.67	253.21	-7.36	282.32	282.32	Debt securities	F3
0.00			-12.29	-45.48	-33.19	0.00	-45.48	-45.48	<i>Short-term</i>	F31
0.10			41.39	335.15	286.41	-7.36	327.80	327.80	<i>Long-term</i>	F32
0.00	3.58		362.32	346.22	11.23	27.33	373.55	373.55	Loans	F4
0.00	0.00		26.51	-113.17	-139.68	0.00	-113.17	-113.17	<i>Short-term</i>	F41
0.00	3.58		335.81	459.39	150.91	27.33	486.72	486.72	<i>Long-term</i>	F42
-0.96	0.00		-507.74	-384.28	242.24	118.78	-265.50	-265.50	Equity and investment fund shares	F5
1.62			-542.29	-419.00	242.07	118.78	-300.22	-300.22	<i>Equity</i>	F51
-2.59			34.55	34.72	0.18	0.00	34.72	34.72	<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0.00	0.00		18.52	18.52	0.00	0.00	18.52	18.52	Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0.00			10.42	10.42	0.00	0.00	10.42	10.42	<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
			-10.68	-10.68	0.00	0.00	-10.68	-10.68	<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
			18.78	18.78	0.00	0.00	18.78	18.78	<i>Pension entitlements</i>	F63
0.00			-8.85	-8.65	-8.65	-8.85	-17.50	-17.50	Financial derivatives	F7
0.00	0.00		-15.27	-56.25	0.19	41.17	-15.09	-15.09	Other accounts receivable/payable	F8
			-30.87	-50.33	6.59	26.05	-24.28	-24.28	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0.00	0.00		15.60	-5.92	-6.40	15.12	9.19	9.19	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
26.86	26.86		373.71	373.71	509.89	509.89	883.60	883.60	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

Lampiran 4

**Matrik NAD Indonesia Menurut Sektor
2011-2015**

<http://www.bps.go.id>

**TABEL 6. NERACA ARUS DANA INDONESIA SEKTOR
TABLE 6. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF NON-**

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2011		2012		2013
		Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA
B8g	Tabungan Bruto		1,999.82		2,072.41	
P5g	Investasi NonFinansial	2,158.34		2,505.34		2,571.38
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-158.52		-432.93		-480.73
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	-21.13		25.21		-387.67
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-179.65		-407.72	
A	Perolehan neto aset finansial	850.29		991.28		-217.68
L	Perolehan neto kewajiban finansial		1,029.94		1,399.00	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus					
F11	Emas Moneter					
F12	Hak Tarik Khusus					
F2	Uang dan Simpanan	152.36		159.29		119.26
F21	Uang	20.35		25.78		29.23
F22	<i>Transferable deposits</i>	77.81		77.97		40.11
F29	Simpanan lainnya	54.20		55.55		49.92
F3	Surat Berharga	132.42	-8.04	56.91	9.61	-110.86
F31	Jangka pendek	-0.78	0.00	23.33	0.00	12.27
F32	Jangka panjang	133.20	-8.04	33.58	9.61	-123.13
F4	Pinjaman	39.29	248.75	61.51	397.95	38.09
F41	Jangka pendek	0.00	69.68	0.00	31.67	0.00
F42	Jangka panjang	39.29	179.07	61.51	366.28	38.09
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	436.23	690.64	650.29	953.56	-311.97
F51	Ekuitas	438.43	690.64	646.58	953.56	-311.99
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-2.20	0.00	3.71	0.00	0.02
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	1.08		4.49		7.20
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	1.08		4.49		7.20
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa					
F63	Hak pensiunan					
F7	Transaksi derivatives	0.00		0.00		0.00
F8	Hutang/Piutang lainnya	88.91	98.59	58.79	37.88	40.61
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	54.56	9.58	48.76	2.95	9.29
F89	Hutang/Piutang lainnya	34.35	89.02	10.02	34.93	31.32
	TOTAL	850.29	850.29	991.28	991.28	-217.68

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

KORPORASI NON-FINANSIAL, 2011-2015 (TRILIUN Rp)
FINANCIAL CORPORATIONS SECTOR, 2011-2015 (TRILLION Rp)

2013	2014		2015		Transaction Categories	Code	
	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA			ΔKewajiban CiL
2,090.64		2,280.62			2,802.88	Saving, gross	B8g
	2,930.81		3,197.34			Gross Capital Formation	P5g
	-650.20		-394.46			Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	-65.18		570.46			<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
-868.41		-715.38			176.00	Net change in financial position (A-L)	B9f
	1,200.29		-157.46			Net acquisition of financial assets	A
650.72		1,915.67			-333.46	Net acquisition of financial liabilities	L
						Monetary gold and SDRs	F1
						<i>Monetary gold</i>	F11
						<i>SDRs</i>	F12
	73.04		142.21			Currency and deposits	F2
	15.67		48.71			<i>Currency</i>	F21
	12.27		51.64			<i>Transferable deposits</i>	F22
	45.10		41.86			<i>Other deposits</i>	F29
1.30	53.76	-7.18	-23.70	-0.59		Debt securities	F3
0.00	-7.97	0.00	65.70	0.00		<i>Short-term</i>	F31
1.30	61.73	-7.18	-89.39	-0.59		<i>Long-term</i>	F32
335.07	54.36	303.73	19.71	215.72		Loans	F4
16.36	0.00	37.70	0.00	-9.78		<i>Short-term</i>	F41
318.70	54.36	266.03	19.71	225.50		<i>Long-term</i>	F42
307.07	957.13	1,553.14	-328.90	-465.43		Equity and investment fund shares	F5
307.07	957.04	1,553.14	-329.07	-465.43		<i>Equity</i>	F51
0.00	0.09	0.00	0.18	0.00		<i>Investment fund shares/units</i>	F52
	4.55		3.13			Insurance, pension and standardized guarantee	F6
	4.55		3.13			<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
						<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
						<i>Pension entitlements</i>	F63
	0.00		0.00			Financial derivatives	F7
7.29	57.45	65.99	30.10	-83.15		Other accounts receivable/payable	F8
5.65	10.59	3.44	26.05	6.59		<i>Trade credits and advances</i>	F81
1.64	46.86	62.55	4.05	-89.74		<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
-217.68	1,200.29	1,200.29	-157.46	-157.46		TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

TABEL 7. NERACA ARUS DANA INDONESIA SEKTOR
TABLE 7. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF FINAN

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2011		2012		2013
		Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA
B8g	Tabungan Bruto		62.49		122.69	
P5g	Investasi NonFinansial	1.90		18.52		33.50
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	60.59		104.18		133.61
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	-101.60		-89.80		104.07
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-41.00		14.38	
A	Perolehan neto aset finansial	804.51		794.24		884.23
L	Perolehan neto kewajiban finansial		845.51		779.86	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	5.52		0.21		-4.23
F11	Emas Moneter	2.96		0.15		-2.58
F12	Hak Tarik Khusus	2.56		0.06		-1.65
F2	Uang dan Simpanan	-19.82	471.24	84.46	540.95	-27.58
F21	Uang	21.05	54.40	19.99	66.75	3.01
F22	<i>Transferable deposits</i>	-72.66	29.38	32.59	130.03	-54.32
F29	Simpanan lainnya	31.78	387.47	31.89	344.17	23.74
F3	Surat Berharga	174.72	143.31	10.71	-25.56	149.76
F31	Jangka pendek	114.00	117.98	-46.29	-36.82	45.52
F32	Jangka panjang	60.71	25.33	57.00	11.27	104.24
F4	Pinjaman	511.30	55.24	547.48	-4.94	539.45
F41	Jangka pendek	58.95	4.20	56.75	-20.46	45.98
F42	Jangka panjang	452.36	51.03	490.73	15.51	493.47
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	44.32	110.19	111.21	169.42	219.10
F51	Ekuitas	61.29	91.27	96.81	130.73	219.37
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-16.97	18.93	14.40	38.68	-0.27
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0.72	53.06	2.99	59.08	4.80
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	0.72	3.60	2.99	14.96	4.80
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa		38.29		27.33	
F63	Hak pensiunan		11.17		16.79	
F7	Transaksi <i>derivatives</i>	-4.68	-4.08	-3.10	-2.99	-3.71
F8	Hutang/Piutang lainnya	92.43	16.55	40.27	43.91	6.64
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F89	Hutang/Piutang lainnya	92.43	16.55	40.27	43.91	6.64
	TOTAL	804.51	804.51	794.24	794.24	884.23

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

KORPORASI FINANSIAL, 2011-2015 (TRILIUN Rp)
CIAL CORPORATIONS SECTOR, 2011-2015 (TRILLION Rp)

2013	2014		2015		Transaction Categories	Code	
	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA			ΔKewajiban CiL
167.11		315.07			208.90	Saving, gross	B8g
	37.58		38.85			Gross Capital Formation	P5g
	277.49		170.05			Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	-430.89		-106.58			<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
237.68		-153.40			63.47	Net change in financial position (A-L)	B9f
	955.02		450.96			Net acquisition of financial assets	A
646.54		1,108.42			387.48	Net acquisition of financial liabilities	L
	9.59		-1.05			Monetary gold and SDRs	F1
	5.21		-0.61			<i>Monetary gold</i>	F11
	4.38		-0.44			<i>SDRs</i>	F12
367.76	200.89	572.63	193.30	412.62		Currency and deposits	F2
60.30	42.88	28.52	7.47	58.23		<i>Currency</i>	F21
-30.26	83.39	108.20	158.16	206.90		<i>Transferable deposits</i>	F22
337.72	74.62	435.91	27.68	147.49		<i>Other deposits</i>	F29
35.70	43.06	-7.14	41.53	-70.29		Debt securities	F3
30.53	-2.95	1.42	-78.23	-73.09		<i>Short-term</i>	F31
5.17	46.01	-8.55	119.76	2.80		<i>Long-term</i>	F32
60.19	381.57	114.40	313.24	-44.13		Loans	F4
-7.35	18.11	70.49	-2.86	-109.50		<i>Short-term</i>	F41
67.53	363.46	43.91	316.10	65.37		<i>Long-term</i>	F42
103.26	259.94	347.14	0.58	81.15		Equity and investment fund shares	F5
123.18	203.39	302.69	-36.57	46.43		<i>Equity</i>	F51
-19.92	56.55	44.45	37.15	34.72		<i>Investment fund shares/units</i>	F52
63.39	3.03	91.77	2.08	18.52		Insurance, pension and standardized guarantee	F6
23.99	3.03	15.16	2.08	10.42		<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
35.33		52.78		-10.68		<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
4.08		23.83		18.78		<i>Pension entitlements</i>	F63
-7.21	-5.27	-7.02	-8.85	-8.65		Financial derivatives	F7
23.45	62.21	-3.36	-89.86	-1.75		Other accounts receivable/payable	F8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<i>Trade credits and advances</i>	F81
23.45	62.21	-3.36	-89.86	-1.75		<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
884.23	955.02	955.02	450.96	450.96		TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

TABEL 8. NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 8. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2011		2012		2013
		Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA
B8g	Tabungan Bruto		33.46		-8.20	
P5g	Investasi NonFinansial	117.86		145.10		180.86
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-84.40		-153.30		-211.67
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	47.25		51.17		33.11
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		-37.15		-102.13	
A	Perolehan neto aset finansial	65.32		40.54		39.45
L	Perolehan neto kewajiban finansial		102.47		142.68	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus					
F11	Emas Moneter					
F12	Hak Tarik Khusus					
F2	Uang dan Simpanan	63.00		38.33		15.10
F21	Uang	0.00		0.00		0.00
F22	<i>Transferable deposits</i>	16.38		16.44		-10.66
F29	Simpanan lainnya	46.62		21.89		25.76
F3	Surat Berharga	0.08	120.19	0.35	159.99	0.27
F31	Jangka pendek	0.00	7.31	0.00	0.43	0.00
F32	Jangka panjang	0.08	112.88	0.35	159.57	0.27
F4	Pinjaman	0.00	-17.72	0.00	-17.32	0.00
F41	Jangka pendek	0.00	-4.66	0.00	-3.71	0.00
F42	Jangka panjang	0.00	-13.06	0.00	-13.61	0.00
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	18.62		18.30		13.42
F51	Ekuitas	18.62		18.30		13.42
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0.00		0.00		0.00
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0.00		0.00		0.00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	0.00		0.00		0.00
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa					
F63	Hak pensiunan					
F7	Transaksi derivatives	0.00		0.00		0.00
F8	Hutang/Piutang lainnya	-16.38	0.00	-16.44	0.00	10.66
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F89	Hutang/Piutang lainnya	-16.38	0.00	-16.44	0.00	10.66
	TOTAL	65.32	65.32	40.54	40.54	39.45

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

SEKTOR PEMERINTAH, 2011-2015 (TRILIUN Rp)
OF GOVERNMENT SECTOR, 2011-2015 (TRILLION Rp)

2013	2014		2015		Transaction Categories	Code
	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA		
-30.81		-79.34			Saving, gross	B8g
	147.35		215.43		Gross Capital Formation	P5g
	-226.69		-298.50		Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	70.82		-61.92		<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
-178.56		-155.87			Net change in financial position (A-L)	B9f
	32.71		4.98		Net acquisition of financial assets	A
218.01		188.59			Net acquisition of financial liabilities	L
					Monetary gold and SDRs	F1
					<i>Monetary gold</i>	F11
					<i>SDRs</i>	F12
	31.18		-34.99		Currency and deposits	F2
	0.00		0.00		<i>Currency</i>	F21
	8.94		-15.84		<i>Transferable deposits</i>	F22
	22.24		-19.14		<i>Other deposits</i>	F29
221.65	-0.36	249.26	0.10	360.55	Debt securities	F3
1.71	0.00	4.14	0.00	27.61	<i>Short-term</i>	F31
219.94	-0.36	245.12	0.10	332.94	<i>Long-term</i>	F32
-3.63	0.00	-60.67	0.00	4.84	Loans	F4
9.19	0.00	-59.04	0.00	-24.65	<i>Short-term</i>	F41
-12.83	0.00	-1.64	0.00	29.49	<i>Long-term</i>	F42
	10.84		24.02		Equity and investment fund shares	F5
	10.84		24.02		<i>Equity</i>	F51
	0.00		0.00		<i>Investment fund shares/units</i>	F52
	0.00		0.00		Insurance, pension and standardized guarantee	F6
	0.00		0.00		<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
					<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
					<i>Pension entitlements</i>	F63
	0.00		0.00		Financial derivatives	F7
0.00	-8.94	0.00	15.84	0.00	Other accounts receivable/payable	F8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0.00	-8.94	0.00	15.84	0.00	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
39.45	32.71	32.71	4.98	4.98	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

TABEL 9. NERACA ARUS DANA INDONESIA SEK
TABLE 9. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2011		2012		2013
		Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA
B8g	Tabungan Bruto		491.51		592.98	
P5g	Investasi NonFinansial	300.69		347.14		437.45
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	190.83		245.84		253.71
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	22.70		10.02		270.91
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		213.53		255.86	
A	Perolehan neto aset finansial	487.22		547.55		750.27
L	Perolehan neto kewajiban finansial		273.69		291.69	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus					
F11	Emas Moneter					
F12	Hak Tarik Khusus					
F2	Uang dan Simpanan	265.06		243.77		256.63
F21	Uang	20.35		25.78		29.23
F22	<i>Transferable deposits</i>	3.55		-1.11		-4.34
F29	Simpanan lainnya	241.16		219.10		231.75
F3	Surat Berharga	0.06		1.84		32.30
F31	Jangka pendek	0.00		0.00		1.11
F32	Jangka panjang	0.06		1.84		31.19
F4	Pinjaman	0.54	309.71	9.04	250.55	-20.84
F41	Jangka pendek	0.54	34.44	9.04	36.07	-20.84
F42	Jangka panjang	0.00	275.26	0.00	214.47	0.00
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	206.32		200.17		421.85
F51	Ekuitas	206.11		200.39		421.59
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	0.21		-0.22		0.26
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	51.26		51.59		51.40
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	1.80		7.48		12.00
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa	38.29		27.33		35.33
F63	Hak pensiunan	11.17		16.79		4.08
F7	Transaksi derivatives	0.00		0.00		0.00
F8	Hutang/Piutang lainnya	-36.01	-36.01	41.15	41.15	8.93
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	-25.23	-25.23	-18.20	-18.20	-52.13
F89	Hutang/Piutang lainnya	-10.79	-10.79	59.35	59.35	61.06
	TOTAL	487.22	487.22	547.55	547.55	750.27

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

TOR RUMAH TANGGA, 2011-2015 (TRILIUN Rp)
OF HOUSEHOLDS SECTOR, 2011-2015 (TRILLION Rp)

ΔKewajiban CiL	2014		2015		Transaction Categories	Code
	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL		
691.16		795.83		806.38	Saving, gross	B8g
	531.19		529.78		Gross Capital Formation	P5g
	264.64		276.60		Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	390.06		-423.09		<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
524.61		654.69		-146.49	Net change in financial position (A-L)	B9f
	800.57		48.37		Net acquisition of financial assets	A
225.66		145.88		194.86	Net acquisition of financial liabilities	L
					Monetary gold and SDRs	F1
					<i>Monetary gold</i>	F11
					<i>SDRs</i>	F12
	289.58		168.45		Currency and deposits	F2
	15.67		48.71		<i>Currency</i>	F21
	1.61		4.71		<i>Transferable deposits</i>	F22
	272.30		115.04		<i>Other deposits</i>	F29
	-2.57		11.07		Debt securities	F3
	-0.11		0.25		<i>Short-term</i>	F31
	-2.46		10.82		<i>Long-term</i>	F32
216.73	-20.97	186.38	29.37	166.21	Loans	F4
10.30	-20.97	1.84	29.37	30.76	<i>Short-term</i>	F41
206.43	0.00	184.55	0.00	135.45	<i>Long-term</i>	F42
	490.84		-202.48		Equity and investment fund shares	F5
	490.85		-202.29		<i>Equity</i>	F51
	-0.01		-0.19		<i>Investment fund shares/units</i>	F52
	84.19		13.31		Insurance, pension and standardized guarantee	F6
	7.58		5.21		<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
	52.78		-10.68		<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
	23.83		18.78		<i>Pension entitlements</i>	F63
	0.00		0.00		Financial derivatives	F7
8.93	-40.51	-40.51	28.65	28.65	Other accounts receivable/payable	F8
-52.13	-144.28	-144.28	-56.92	-56.92	<i>Trade credits and advances</i>	F81
61.06	103.77	103.77	85.57	85.57	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
750.27	800.57	800.57	48.37	48.37	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

TABEL 10. NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 10. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2011		2012		2013
		Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA
B8g	Tabungan Bruto		10.82		12.15	
P5g	Investasi NonFinansial	4.46		5.57		6.40
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	6.36		6.58		5.61
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	19.75		0.60		-20.78
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		26.11		7.19	
A	Perolehan neto aset finansial	11.07		8.66		7.15
L	Perolehan neto kewajiban finansial		-15.04		1.48	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus					
F11	Emas Moneter					
F12	Hak Tarik Khusus					
F2	Uang dan Simpanan	8.76		10.87		2.82
F21	Uang	0.00		0.00		0.00
F22	<i>Transferable deposits</i>	4.29		4.15		-1.05
F29	Simpanan lainnya	4.47		6.71		3.87
F3	Surat Berharga	0.08		0.35		0.27
F31	Jangka pendek	0.00		0.00		0.00
F32	Jangka panjang	0.08		0.35		0.27
F4	Pinjaman	0.00	-15.04	0.00	1.48	0.00
F41	Jangka pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F42	Jangka panjang	0.00	-15.04	0.00	1.48	0.00
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	2.23		-2.55		4.06
F51	Ekuitas	0.60		0.74		3.02
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	1.63		-3.29		1.04
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0.00		0.00		0.00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	0.00		0.00		0.00
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa					
F63	Hak pensiunan					
F7	Transaksi derivatives	0.00		0.00		0.00
F8	Hutang/Piutang lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F89	Hutang/Piutang lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	11.07	11.07	8.66	8.66	7.15

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

SEKTOR LNPRT, 2011-2015 (TRILIUN Rp)
OF NPISHs SECTOR, 2011-2015 (TRILLION Rp)

ΔKewajiban CiL	2014		2015		Transaction Categories	Code
	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL		
12.01		14.97		16.48	Saving, gross	B8g
	5.50		7.33		Gross Capital Formation	P5g
	9.47		9.15		Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	9.04		14.13		<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
-15.17		18.51		23.28	Net change in financial position (A-L)	B9f
	14.75		26.86		Net acquisition of financial assets	A
22.32		-3.76		3.58	Net acquisition of financial liabilities	L
					Monetary gold and SDRs	F1
					<i>Monetary gold</i>	F11
					<i>SDRs</i>	F12
	8.99		27.72		Currency and deposits	F2
	0.00		0.00		<i>Currency</i>	F21
	1.99		8.24		<i>Transferable deposits</i>	F22
	7.00		19.48		<i>Other deposits</i>	F29
	-0.36		0.10		Debt securities	F3
	0.00		0.00		<i>Short-term</i>	F31
	-0.36		0.10		<i>Long-term</i>	F32
22.32	0.00	-3.76	0.00	3.58	Loans	F4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<i>Short-term</i>	F41
22.32	0.00	-3.76	0.00	3.58	<i>Long-term</i>	F42
	6.13		-0.96		Equity and investment fund shares	F5
	2.48		1.62		<i>Equity</i>	F51
	3.64		-2.59		<i>Investment fund shares/units</i>	F52
	0.00		0.00		Insurance, pension and standardized guarantee	F6
	0.00		0.00		<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
					<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
					<i>Pension entitlements</i>	F63
	0.00		0.00		Financial derivatives	F7
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Other accounts receivable/payable	F8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<i>Trade credits and advances</i>	F81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
7.15	14.75	14.75	26.86	26.86	TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

TABEL 11. NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 11. INDONESIAN FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	2011		2012		2013
		Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA	Δ Kewajiban CiL	Δ Aset CiA
B8g	Tabungan Bruto		-14.86		229.63	
P5g	Investasi NonFinansial	0.00		0.00		0.00
B9c	Pinjaman Neto (B8g-P5g)	-14.86		229.63		299.48
	<i>Selisih Statistik(B9c-B9f)</i>	33.03		2.80		0.37
B9f	Perubahan neto investasi finansial (A-L)		18.17		232.44	
A	Perolehan neto aset finansial	258.37		404.03		398.79
L	Perolehan neto kewajiban finansial		240.20		171.60	
F1	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus	-5.52		-0.21		4.23
F11	Emas Moneter	-2.96		-0.15		2.58
F12	Hak Tarik Khusus	-2.56		-0.06		1.65
F2	Uang dan Simpanan	10.68	8.80	11.01	6.78	15.77
F21	Uang	0.00	7.35	0.00	4.79	0.00
F22	<i>Transferable deposits</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F29	Simpanan lainnya	10.68	1.45	11.01	1.99	15.77
F3	Surat Berharga	47.00	98.89	122.15	48.25	144.20
F31	Jangka pendek	12.07	0.00	-13.43	0.00	-26.66
F32	Jangka panjang	34.93	98.89	135.58	48.25	170.86
F4	Pinjaman	65.94	36.15	35.69	26.02	64.02
F41	Jangka pendek	44.17	0.00	-22.22	0.00	3.38
F42	Jangka panjang	21.77	36.15	57.91	26.02	60.65
F5	Ekuitas dan Unit Penyertaan Investasi Kolektif	140.19	47.07	191.17	45.61	189.11
F51	Ekuitas	103.93	47.07	167.08	45.61	210.09
F52	Unit Penyertaan Investasi Kolektif	36.26	0.00	24.09	0.00	-20.98
F6	Asuransi, Dana Pensiun dan Jaminan Terstandar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F61	Cadangan teknis asuransi non-jiwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F62	Hak anuitas dan asuransi jiwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F63	Hak pensiunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F7	Transaksi derivatives	-4.08	-4.68	-2.99	-3.10	-7.21
F8	Hutang/Piutang lainnya	4.15	53.97	47.21	48.03	-11.34
F81	Kredit dagang dan pembayaran dimuka	9.58	54.56	2.95	48.76	5.65
F89	Hutang/Piutang lainnya	-5.42	-0.59	44.26	-0.73	-17.00
	TOTAL	258.37	258.37	404.03	404.03	398.79

Keterangan:

Δ Aset = Perubahan Aset

Δ Kewajiban = Perubahan Kewajiban

SEKTOR LUAR NEGERI, 2011-2015 (TRILIUN Rp)
REST OF THE WORLD SECTOR, 2011-2015 (TRILLION Rp)

2013	2014		2015		Transaction Categories	Code	
	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA	ΔKewajiban CiL	ΔAset CiA			ΔKewajiban CiL
299.48		325.29			237.15	Saving, gross	B8g
	0.00		0.00			Gross Capital Formation	P5g
	325.29		237.15			Net lending (+) / net borrowing (-) (B8g-P5g)	B9c
	26.16		6.99			<i>Net error and omissions (B9c-B9f)</i>	
299.85		351.45			244.14	Net change in financial position (A-L)	B9f
	648.30		509.89			Net acquisition of financial assets	A
98.93		296.85			265.75	Net acquisition of financial liabilities	L
	-9.59		1.05			Monetary gold and SDRs	F1
	-5.21		0.61			<i>Monetary gold</i>	F11
	-4.38		0.44			<i>SDRs</i>	F12
14.24	27.75	58.79	10.61	94.69		Currency and deposits	F2
1.16	0.00	45.70	0.00	46.65		<i>Currency</i>	F21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<i>Transferable deposits</i>	F22
13.09	27.75	13.09	10.61	48.04		<i>Other deposits</i>	F29
-42.72	237.69	96.29	253.21	-7.36		Debt securities	F3
0.00	16.58	0.00	-33.19	0.00		<i>Short-term</i>	F31
-42.72	221.12	96.29	286.41	-7.36		<i>Long-term</i>	F32
-9.96	127.57	2.46	11.23	27.33		Loans	F4
0.00	53.84	0.00	-139.68	0.00		<i>Short-term</i>	F41
-9.96	73.73	2.46	150.91	27.33		<i>Long-term</i>	F42
125.25	298.09	122.69	242.24	118.78		Equity and investment fund shares	F5
125.25	313.91	122.69	242.07	118.78		<i>Equity</i>	F51
0.00	-15.82	0.00	0.18	0.00		<i>Investment fund shares/units</i>	F52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Insurance, pension and standardized guarantee	F6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<i>Non-life insurance technical reserves</i>	F61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<i>Life insurance and annuity entitlements</i>	F62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<i>Pension entitlements</i>	F63
-3.71	-7.02	-5.27	-8.65	-8.85		Financial derivatives	F7
15.82	-26.19	21.89	0.19	41.17		Other accounts receivable/payable	F8
9.29	3.44	10.59	6.59	26.05		<i>Trade credits and advances</i>	F81
6.53	-29.64	11.30	-6.40	15.12		<i>Other accounts receivable/payable</i>	F82
398.79	648.30	648.30	509.89	509.89		TOTAL	

Note:

CiA = Changes in assets

CiL = Changes in liabilities and net worth

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, W.I. *National Income and Economic Accounting*, Prentise Hall Inc., Englewood, New Jersey, 1969.

Badan Pusat Statistik, *Studi Neraca Arus Indonesia 1980*, Jakarta, 1987.

_____, *Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan*, berbagai seri, Jakarta.

Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2015*, Jakarta, 2015

Board of Governors of the Federal Reserve System, *Guide to the Flow of Funds Accounts*, Washington, D.C, 2000.

Central Bank of the Philippines, *The Flow of Funds of the Philippines 1980 - 1983*, Manila, 1985.

_____, *Flow of Funds Manual of Accounts*, Manila, 1983.

Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operation and Development, United Nations, and World Bank, *System of National Accounts*, Brussels/Lexembourg, New York, Paris, Washington, D.C, 1993.

Copeland, M.A., *A study of Money of Flows in the United States*, New York, 1952.

Dawson, J.C., *Furthering the Development of Flow of Funds Analysis for Indonesia*, Final Report of a Mission Funded By USAID, Jakarta, 1991.

Geehan, Randy, *An Analysis of the Indonesia Flow of Funds*, Occasional Paper for the Seminar, Jakarta, Mei, 1990.

Geehan, Saldua, and Balances, *The Indonesian Flow of Funds*, Manual of Operation, Consultan Report, Jakarta, 1990.

Powelson, J.P., *National Income and Flow of Funds Analysis*, Mc.Graw Hillbook Company Inc., New York, 1960.

Ritter, Lawrence S. & Silber, William L., *Principles of money Banking and Financial Markets*, Harper Collins Publishers, 1991.

Samuelson, Paul A. & William D., *Ekonomi (Terjemahan)*, Edisi Kedua belas, Penerbit Erlangga, 1986.

United Nations , *Provisional International Guidelines on the National and Sectoral Balance Sheet and Reconciliation Accounts of the System of National Accounts*, Statistical Paper, Series M No. 60, New York, 1977.

_____, *Handbook of National Accounting, Public Sector*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

